

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019



DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG
DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketersediaan infrastruktur telah diyakini akan memegang peranan penting dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan hadirnya infrastruktur yang handal maka terwujudnya pemenuhan Hak Dasar Rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan hak-hak lainnya akan terdukung lebih optimal.

Oleh karenanya, pembangunan infrastruktur selain perlu terus ditingkatkan, juga harus benar-benar dirancang dan diimplementasikan secara sistematis dengan matang sesuai kondisi dan potensi ekonomi dan sosial serta tingkat kebutuhan dan perkembangan suatu wilayah. Tentunya termasuk dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur pekerjaan umum penataan ruang dan pertanahan yang harus selaras dan bersinergi dengan sektor- sektor lainnya disamping adanya kebersamaan langkah antara Pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi di dalam pelaksanaannya

Kondisi seperti digambarkan tersebut di atas, selaras pula dengan amanat Undang- Undang sektor ke PUPR-an yang meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Sejalan dengan itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah laut Tahun 2018 – 2023 Menetapkan visi yaitu **“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”**.

Terkait dengan peran infrastruktur PUPRP di atas serta ditambah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut telah memiliki 4 (empat) tujuan dalam pembangunannya yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah, 4 (empat) tujuan tersebut terdiri dari

1. Tujuan Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatkan inovasi pelayanan publik

2. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
3. Tujuan Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
4. Tujuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

KATAPENGANTAR

Sistem Akuntabilitas Kinerja dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap satuan organisasi/kerja, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap satuan organisasi/kerja secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategik organisasi kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja. Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepadapublik.

Semua itu memerlukan dukungan dan Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan menuangkan gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2019. Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Penataan Ruang dan Pertanahan untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan unit kerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan ini telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah melalui proses diskusi, khususnya di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sampai dengan tersusunnya laporan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Pelaihari, Maret 2019

P e n y u s u n

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATAPENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BABI PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang	1
B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	2
C. Kepegawaian	6
D. Isu Strategis DPUPR Kab. Tanah Laut	8
E. Produk dan Layanan	10
F. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. Visi RPJMD	13
B. Misi RPJMD	15
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	18
D. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, Sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)	28
E. Indikator Kinerja Utama	28
F. Program dan Kegiatan DPUPR TA. 2019	33
G. Perjanjian Kinerja DPUPRP Tahun 2019	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	44
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas PUPRP	44
B. Perbandingan Capaian IKU Dinas PUPRP	70
C. Capaian Sasaran Strategis	88
D. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Dinas PUPRP	89
E. Capaian IKU Eselon 3 Dinas PUPRP	91
F. Akuntabilitas Keuangan	149

BAB IV PENUTUP	156
A. Simpulan	156
B. Strategi Peningkatan Kinerja	156

DAFTAR GRAFIK

1. Grafik Kualifikasi Pendidikan.....	6
2. Jumlah PNS Menurut Golongan	7
3. Jumlah PNS DPUPRP	8
4. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Bina Marga	73
5. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang CKJK	77
6. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Sumber Daya Air	83
7. Perbandingan IKU Dinas pada Bidang Tata Ruang	85
8. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Pertanahan.....	88

DAFTAR GAMBAR

1. Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut Pada Periode 2018-2019	17
--	----

DAFTAR TABEL

1. Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kab. Tanah Laut.....	17
2. Keterkaitan Misi Kesatu dengan Tujuan dan Sasaran	19
3. Keterkaitan Misi Kedua dengan Tujuan dan Sasaran	21
4. Keterkaitan Misi Ketiga dengan Tujuan dan Sasaran	22
5. Keterkaitan Misi Keempat dengan Tujuan dan Sasaran	23
6. Keterkaitan Misi Kelima dengan Tujuan dan Sasaran	24
7. Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran DPUPRP Kab. Tanah Laut	27
8. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPUPRP Kab.Tanah Laut	28
9. Indikator Kinerja Utama	45
10. Target Indikator Kinerja Utama	46
11. Capaian Indikator Kinerja Utama	47

12. Capaian per Indikator Sasaran 1	49
13. Capaian per Indikator Sasaran 2	58
14. Capaian per Indikator Sasaran 3	62
15. Capaian per Indikator Sasaran 4	65
16. Capaian per Indikator Sasaran 5	68
17. Capaian per Indikator Sasaran 6	69
18. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017, 2018 dan 2019	70
19. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Bina Marga	73
20. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi	76
21. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Sumber Daya Air	82
22. Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Tata Ruang.....	84
23. Perbandingan Capaian IKU DInas pada Bidang Pertanahan.....	87
24. Capaian Sasaran Strategis	89
25. Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017, 2018 dan 2019	89
26. IKU Sekretariat.....	92
27. Target IKU Sekretariat Tahun 2019	92
28. Target dan Capaian IKU Sekretariat Tahun 2019	93
29. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	94
30. Target, Realisasi dan Capaian per Indikatpr Sasaran 2.....	96
31. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3.....	98
32. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 4.....	100
33. IKU Bidang Bina Marga.....	101
34. Target IKU Bidang Bina Marga Tahun 2019	101
35. Target dan Capaian IKU Bidang Bina Marga Tahun 2019	102
36. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	103
37. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	107
38. IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi.....	109
39. Target IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Tahun 2019.....	110
40. Target dan Capaian IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Tahun 2019.....	110
41. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	111
42. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	115
43. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3.....	117

44. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 4.....	118
45. IKU Bidang Tata Ruang	120
46. Target IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019.....	121
47. Target dan Capaian IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019	121
48. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	122
49. IKU Bidang Pertanahan	124
50. Target Bidang IKU Pertanahan Tahun 2018.....	124
51. Target dan Capaian IKU Bidang Pertanahan Tahun 2019.....	125
52. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1.....	126
53. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	127
54. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3.....	129
55. IKU Bidang Sumber Daya Air.....	130
56. Target IKU Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	131
57. Target dan Capaian IKU Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019	131
58. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1	132
59. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	135
60. IKU UPT Peralatan	140
61. Target IKU UPT Peralatan Tahun 2019	140
62. Target dan Capaian IKU UPT Peralatan Tahun 2019.....	140
63. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1.....	141
64. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	143
65. IKU UPT Laboratorium.....	144
66. Target IKU UPT Laboratorium Tahun 2019	145
67. Target dan Capaian IKU UPT Laboratorium Tahun 2019	145
68. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1.....	146
69. Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2.....	148
70. Rincian Anggaran Berdasarkan Program dan Sasaran Dinas PUPRP Tahun 2019.....	149
71. Analisis perbandingan Program dan Kegiatan Dinas PUPRP Tahun 2018 dan 2019	151
72. Perbandingan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2018 dan 2019	154
73. Perbandingan APBD Tahun 2018 dan 2019.....	155

DAFTAR GAMBAR

1. Visi RPJMD	13
2. Misi RPJMD	15
3. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18

LAMPIRAN

1. IKU DPUPRP Kab. Tanah Laut
2. Capaian IKU DPUPRP Tahun 2019
3. Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2018
4. Perjanjian Kinerja DPUPRP Tahun 2019
5. Pohon Kinerja
6. Capaian Kinerja DPUPRP Tahun 2014 s/d 2018
7. Laporan Rencana Aksi Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah senantiasa menuntut adanya percepatan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta Pemerintah juga memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Good governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “ good governance “ (kepemerintahan yang baik). Agar “ good governance “ dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya “ alignment “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya.

Dalam dunia pemerintahan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Instansi Pemerintah dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja (LAPKIN) Instansi Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka (LAPKIN) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan penyusunan (LAPKIN) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan (LAPKIN), yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
2. Inpres Nomor 7 tahun 1969 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
3. Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1) Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
- c. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Bina Marga.
- d. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
 - 2) Seksi Tata Bangunan; dan
 - 3) Seksi Bina Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
- f. Bidang Pertanahan terdiri dari :
 - 1) Seksi Administrasi Pertanahan; dan
 - 2) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum.
- g. UPT Dinas terdiri dari;
 - 1) UPT Peralatan; dan
 - 2) UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan

Kabupaten Tanah Laut, bahwa tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai berikut :

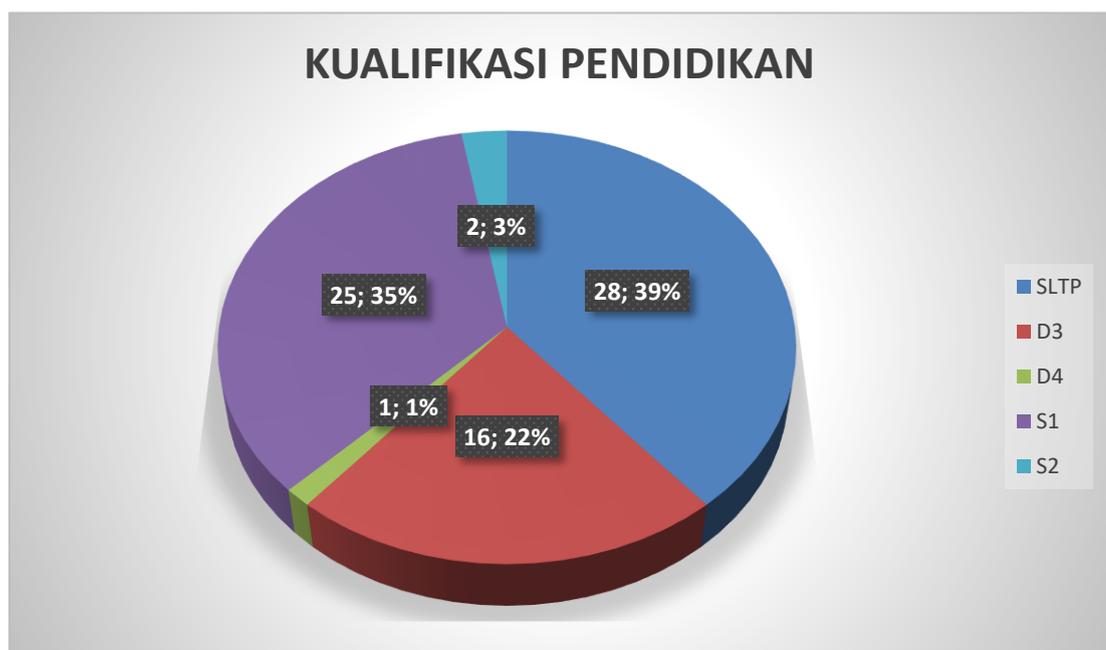
- a. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang bina marga;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang tata ruang;
- h. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanahan;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemberian perizinan, non perizinan / rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- k. membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Kepegawaian

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Pada tahun 2019, pegawai Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 262 orang, yang terdiri dari 72 orang PNS dan 76 orang.

Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 72 orang yang jika dikelompokkan berdasarkan posisi tingkat pendidikan, golongan, dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Grafik 1.1
Kualifikasi Pendidikan

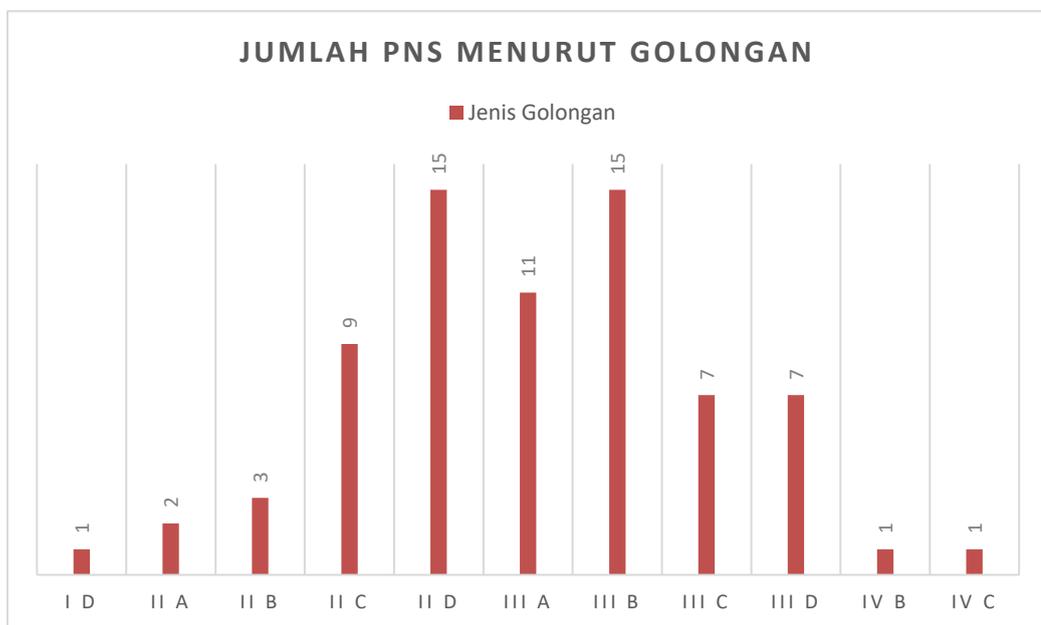


Dari diagram di atas dapat dikatakan bahwa 35 % pegawai sudah berpendidikan S1, sedangkan yang berpendidikan D3 sebesar 22%. Diharapkan yang mereka yang berpendidikan D3 dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu dengan memberi kesempatan kepada mereka melalui ijin belajar maupun tugas belajar. Begitu juga yang berpendidikan dibawah D3 memungkinkan kepada mereka untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh

pemerintah daerah.

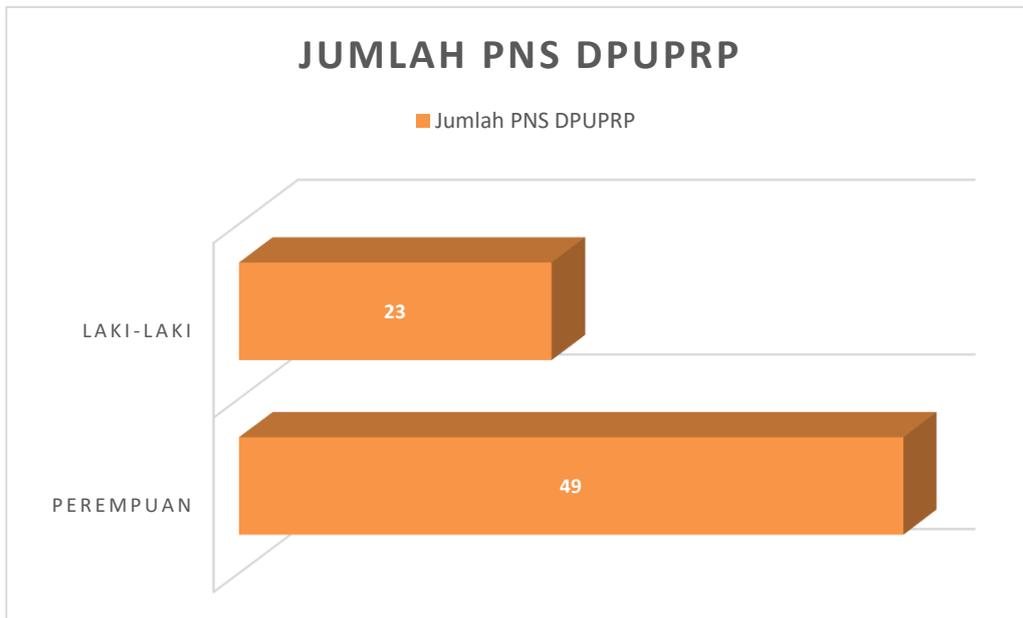
Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan jenis pendidikan sebanyak 33% merupakan lulusan teknik dan 67% lulusan non teknik yang mana semuanya mampu berkinerja dengan baik di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan. Namun Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan masih memerlukan pegawai yang pendidikan tingginya merupakan jurusan teknik.

Grafik 1.2
Jumlah PNS Menurut Golongan



Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan berdasarkan golongan seperti terlihat tabel di atas adalah 56% merupakan golongan III dan 3% merupakan IV dan sisanya 41% merupakan golongan I dan II dari total 72 orang Pegawai Negeri Sipil.

Grafik 1.3
Jumlah PNS DPUPRP



Berdasarkan diagram di atas dapat terlihat bahwa lebih dari 68% pegawai negeri sipil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut lebih banyak berjenis perempuan dibandingkan dengan jenis kelamin laki – laki sebesar 32% dari total pegawai negeri sipil.

D. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan capaian kinerja selama kurun waktu 2014-2018 serta proyeksi selama lima tahun mendatang kurun waktu 2019-2023, dapat digambarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan pengelolaan barang belum optimal
- Masih kurangnya pengelola kegiatan dan Administrasi yang bersertifikat
- Belum Optimalnya data dan Informasi yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat
- Belum seluruh jalan dan Jembatan dalam kondisi baik sesuai kapasitas jalan dan jembatan kabupaten

- Terdapat defisit imbalan air pada sebagian Daerah Irigasi (DI)
- Belum optimalnya penyediaan dan pengolahan air baku
- Ruang lingkup Penanganan yang kompleks
- Belum maksimalnya koordinasi lintas SKPD terkait bidang SDA
- Berkurangnya areal pertanian/tanaman pangan
- Kurangnya infrastruktur air baku
- Belum sinkronnya mapping antar sektor (one map)
- Masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap air minum yang layak
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan air limbah
- Belum adanya sarana dan prasarana
- Belum sepenuhnya RTRW menjadi acuan Program Pembangunan dan panduan masyarakat dalam memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
- Masih adanya permasalahan dan konflik kepemilikan dan hak atas tanah
- Belum optimalnya kesadaran masyarakat khususnya terkait alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lainnya

Di samping permasalahan tersebut di atas, terdapat juga permasalahan pelayanan SKPD dalam pemenuhan SPM di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

1. Kurangnya sumber daya manusia terutama tenaga teknis;
2. Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga fasilitas umum;
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan dan menambah kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur khususnya tenaga teknis;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya fasilitas umum;
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait

4. Meningkatkan kemantapan jalan kabupaten;
5. Meningkatkan ketersediaan air irigasi;
6. Meningkatkan cakupan layanan air minum permukiman;
7. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah permukiman;
8. Meningkatkan ketersediaan informasi penataan ruang;
9. Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
10. Meningkatkan implementasi SPIP;
11. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi.

E. Produk dan Layanan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dan untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
4. pelaksanaan administrasi dinas;
5. pembinaan UPT Dinas; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut produk dan layanan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing bidang.

Pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi :

1. Pembangunan ruang kelas, pagar sekolah, paving blok halaman dan parkir sekolah.
2. Pembangunan ruang kantor dan sarana pendukungnya, gedung serbaguna, pesantren dan gedung olah raga.
3. Pembuatan drainase.
4. Pembuatan sumur bor.
5. Pemasangan jaringan perpipaan.
6. Perluasan sambungan rumah.
7. Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal .
8. Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM .
9. Pendampng PANSIMAS.

Pada Bidang Bina Marga :

1. Rehab jalan dan jembatan.
2. Pembangunan Box Culvert.
3. Peningkatan Jalan.
4. Pelebaran jembatan.
5. Pembangunan jembatan Box Culvert.

Pada Bidang Sumber Daya Air :

1. Rehab embung, rehab tanggul, peningkatan jembatan penyeberangan pertanian.
2. Pembangunan pintu air.
3. Pembangunan jembatan pertanian.
4. Pembangunan siring sungai, bendungan dan embung.
5. Pembangunan talud irigasi.
6. Pembuatan embung dan siring sungai.
7. Pembuatan pembangunan pengaman pantai.
8. Normalisasi sungai.

Pada Bidang Tata Ruang :

1. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bati-Bati.
2. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Pelaihari.

3. Dokumen terkait pengendalian dan arahan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Pada Bidang Pertanahan :

1. Dokumen usulan terkait pemanfaatan lahan.
2. Dokumen terkait jumlah area / lahan yang dapat diinventarisasi / diidentifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum.
3. Melaksanakan fasilitasi terhadap konflik – konflik pertanahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 102 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut memiliki 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis, yaitu UPT Peralatan dan UPT Laboratorium.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut UPT Peralatan dan dan UPT Laboratorium mempunyai tugas :

UPT Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peralatan meliputi perawatan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan.

Berdasarkan tugas tersebut UPT Peralatan mempunyai layanan penyewaan alat – alat berat yang bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga, yang mana dari penyewaan alat – alat berat ini mampu memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut

UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengujian material konstruksi dan pengembangan teknologi untuk mendukung capaian kualitas hasil pembangunan/perbaikan konstruksi serta pelayanan informasi konstruksi.

Berdasarkan tugas tersebut UPT Laboratorium Pengujian Material Konstruksi mempunyai layanan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah, untuk melakukan uji material terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, yang mana ini juga mampu memberikan PAD bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

F. Sistematika Penyajian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan lakip, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, isu strategis, produk dan layanan dan sistematika penyajian.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan visi RPJMD, misi RPJMD, Tujuan sesuai renstra, sasaran strategis, tabel (tujuan, indikator, target selama 5 tahun), indikator kinerja utama, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian indikator kinerja utama yang berisi uraian tabel target dan capaian IKU dan Uraian dan analisis capaian IKU, capaian sasaran strategis berisi capaian strategis eselon II, eselon II dan eselon IV, tabel realisasi capaian sasaran strategis dan uraian dan analisa capaian strategis dan akuntabilitas keuangan berisi ringkasan realisasi APBD Tahun 2019.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan dan strategi peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (desired future) pada periode 2018–2023 adalah: “Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”.

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk ada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

- INOVASI** : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.
- TERTATA** : Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS** : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

- AKTUAL** : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI** : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotongroyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”**. Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**.

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang **BERINTERAKSI** pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** melalui **“KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS”**. Fokus pada lokus **“DESA DIBINA, KOTA DITATA”** adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

B. Misi Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “Tanah Laut yang BERINTERAKSI”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.

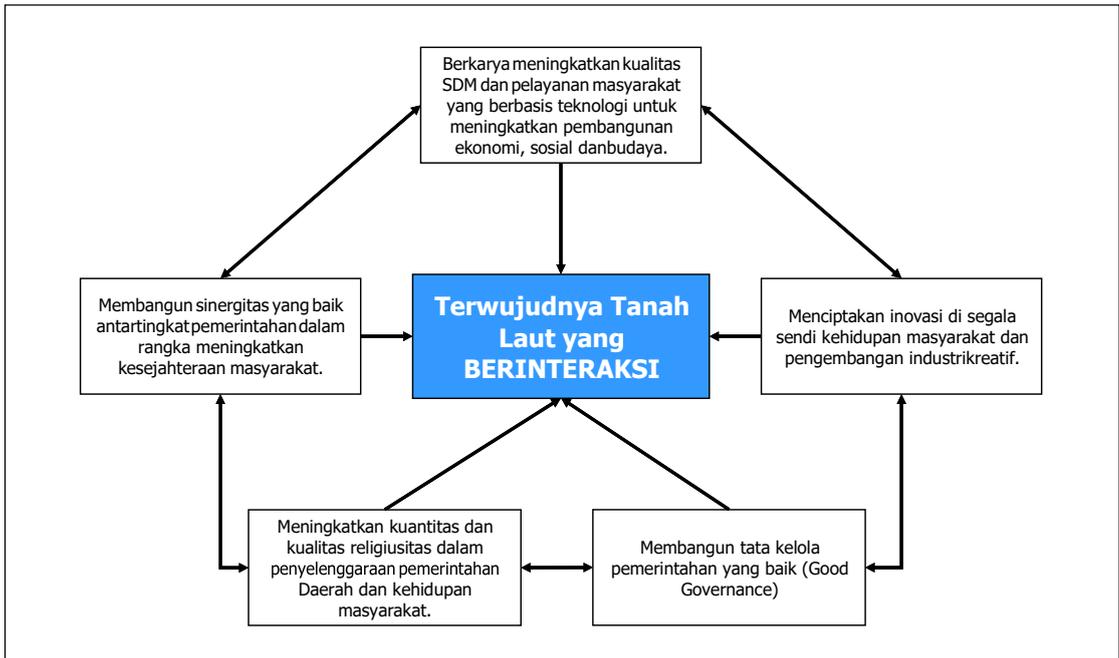
Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.

Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023



Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI :	Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI	
BERKARYA	1.	Berkarya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial da budaya.
INOVASI	2.	Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3.	Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5.	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

C.1. Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Dalam Misi 1 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu “Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya”, maka ditetapkan 3 (tiga) tujuan dan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

- Tujuan 1 : Peningkatan layanan bidang pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
- Sasaran 1.2 : Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi
- Tujuan 2 : Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan

Tujuan 3 : Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya

Sasaran 3.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya

Sasaran 3.2 : Meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga

Sasaran 3.3 : Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi

Tabel 2.2
Keterkaitan Misi Kesatu dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 1	Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.			
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan layanan bidang pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Harapan lama sekolah (tahun)
			Meningkatnya kompetensi pencari kerja yang ditempatkan melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Siap Kerja (Program Unggulan #4)
	Peningkatan layanan bidang kesehatan yang berkualitas, merata dan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan Angka	Angka Harapan Hidup

	terjangkau bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		
				Cakupan Kinerja Pelayanan Kesehatan On Call (Program Unggulan #5)
	Peningkatan kualitas layanan masyarakat lainnya secara merata dan terjangkau untuk mendukung ekonomi, sosial dan budaya	Indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (%)
				Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil (%) 100
				Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (%)
			Meningkatnya pelestarian/ pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olah raga Cakupan	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya daerah (%)
				Indeks Pembangunan Pemuda
				Jumlah Atlet yang berprestasi
			Meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi	Persentase permohonan pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang ditindaklanjuti oleh SKPD (%) 100

C.2. Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Dalam kerangka mewujudkan Misi 2 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif”, maka ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Sasaran 1.1 : Meningkatnya inovasi pelayanan publik

Tujuan 2 : Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif

Sasaran 2.1 : Meningkatnya Penerapan teknologiKontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian

Tabel 2.3
Keterkaitan Misi Kedua dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 2 Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang didaftarkan
	Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang memberi nilai tambah terhadap perekonomian	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Jumlah usaha dan kelompok masyarakat pengguna teknologi inovatif yang berkembang (unit)
			Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)

C.3. Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Dalam kerangka mewujudkan Misi 3 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

Sasaran 1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik

Sasaran 1.2 : Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik

Tabel 2.4
Keterkaitan Misi Ketiga dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 3				
Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)				
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah (kategori)
				Opini Pengawas Eksternal (BPK) terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (opini)
			Meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks keterbukaan informasi publik
				Persentase SKPD/OPD yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
			Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi	Perangkat daerah yang memiliki layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SKPD)

			aparatur Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur	
--	--	--	--	--

C.4. Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Dalam kerangka mewujudkan Misi 4 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat”, maka ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

Tujuan 1 : Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia

Sasaran 1.1 : Meningkatkan toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama

Sasaran 1.2 : Meningkatkan wawasan kebangsaan

Sasaran 1.3 : Meningkatkan aksi sosial keagamaan

Tabel 2.5
Keterkaitan Misi Keempat dengan Tujuan dan Sasaran

Misi 4	Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat			
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia	Persentase tingkat kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama	Jumlah konflik intern dan antarumat beragama (kasus)
			Meningkatnya wawasan kebangsaan	Jumlah konflik sosial (kasus)
			Meningkatnya aksi sosial keagamaan	Cakupan Kinerja Program Aksi Keagamaan dan Sosial lingkup Kecamatan (Program Unggulan #3) (jumlah)

C.5. Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Dalam kerangka mewujudkan Misi 5 pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, yaitu: “Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, maka ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran pembangunan daerah, yaitu :

- Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan sosial
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi
- Sasaran 1.2 : Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah
- Sasaran 1.3 : Menurunnya tingkat pengangguran
- Sasaran 1.4 : Meningkatnya perlindungan masyarakat
- Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas

Tabel 2.6
Keterkaitan Misi Kelima dengan Tujuan dan Sasaran

MISI 5	Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan (%)	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi
				Indeks Gini (skor)
				PDRB per kapita atas dasar harga konstan (Rp Juta)
			Meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Gender (skor)
			Menurunnya	Tingkat Pengangguran Terbuka

			tingkat pengangguran	(%)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat	Indeks Resiko Bencana Daerah (skor)
				Persentase Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)
				Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)
	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangu n Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
	Peningkatan kinerja sektor unggulan daerah	Persentase Pertumbuhan sector unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Jumlah pelaku usaha dan kelompok tani/ nelayan yang terfasilitasi pelayanan kredit tanpa agunan dan bunga 0% (program unggulan #1)
				Pertumbuhan sektor Pertanian
				Pertumbuhan sektor Industri olahan
				Jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata yang dikembangkan pemerintah (orang)
			Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH Ketersediaan (nilai)
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)
	Peningkatan	Indeks Desa	Meningkatnya	Cakupan desa yang tata kelola

	Upaya Membina Desa dan Menata Kota Indeks	Membangun (skor)	Pembinaan Desa	pemerintahannya baik (%)
				Cakupan Kinerja Pengelolaan ADD untuk Desa Membangun ((Program Unggulan #2) (%)
				Cakupan Kinerja Program Aksi Membangun Bersama Masyarakat (Program Unggulan #7) (desa)
				Jumlah Desa di bina berciri khas
			Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)
				Persentase Penataan Pasar Pelaihari (%)

Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, bahwa yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik
2. Tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
3. Tujuan Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas
4. Tujuan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tabel 2.7
Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas PUPRP
3.	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)

D. Tabel (Tujuan, Indikator, Target, sasaran, Indikator, Target 5 Tahun)

Tabel 2.8
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik dengan sasaran Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Jumlah penghargaan inovasi publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	70	75	75	75	75
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah	BB	BB	A	A	A
3.	Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam) (Program Unggulan #6) (%)	38	43	64	80	85
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	84	87	93	97	100
				Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak (%)	65	70	73	78	80
4.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (skor)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten (%)	70	78	87	92	98

E. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/ Sumber Data	
1	Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an	1	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik $\frac{\text{Panjang sungai dalam kondisi baik}}{\text{Panjang sungai Kabupaten}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Air	
		2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik $\frac{\text{Jaringan Irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas Irigasi}} \times 100 \%$		
		3	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Jumlah jembatan dalam Kondisi baik	Bidang Bina Marga
		4	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Panjang Jalan dalam kondisi baik	
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air baku $\frac{\text{Total kapasitas Ikk lt/Det TALA}}{\text{Jumlah Penduduk TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi	
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	Bidang Sumber Daya Air	
		2	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air $\frac{\text{Luas Kawasan Sungai dan Pesisir Pantai yang telah dilindungi}}{\text{Target Luas Kawasan Sungai dan Pesisir pantai yang akan dilindungi}} \times 100 \%$		
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman $\frac{\text{Total RT yang Terlayani}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi	
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak $\frac{\text{Total RT dengan sanitasi layak}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$		
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW $\frac{\text{Hasil evaluasi (audit) perwujudan struktur ruang}}{2} \times 100\%$	Bidang tata ruang	
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	1	Persentase teridentifikasinya tanah negara $\frac{\text{Jumlah tanah negara yang teridentifikasi}}{\text{Jumlah luas tanah negara}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan	

6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	2	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	$\frac{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terdata}} \times 100\%$	
---	---	---	---	--	--

Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.10
Indikator Kinerja Utama Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretariat
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan	
5	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (%)	Bidang Bina Marga
6	Meningkatnya jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	
7	Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat	Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman atau Tambahan jumlah sambungan rumah yang dapat dicapai kab/kota (SR)	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

8	Meningkatnya akses sanitasi bagi masyarakat	Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (%) atau jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (SR)	
9	Meningkatkan dan mengoptimisasi infrastruktur jaringan irigasi	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	Bidang Sumber Daya Air
10	Meningkatkan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air	persentase ketersediaan air baku	
11	Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan saluran sungai	persentase panjang sungai dalam kondisi baik	
12	Meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air	Persentase panjang garis pantai dalam kondisi baik	
	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase dokumen perencanaan	Bidang Tata Ruang
		Persentase pertimbangan teknis tata ruang	
		Persentase pengawasan tata ruang	
13	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Negara oleh Masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Nilai kumulatif penyelenggaraan penataan pertanahan kabupaten	Bidang Pertanahan
14	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di kabupaten tanah laut	Jumlah lahan / area tanah yang difasilitasi penyelesaian sengketa tanah	
15	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium	Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
16	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Persentase Indeks Kepuasan pengguna alat berat	Sub Bagian TU UPT Peralatan

Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.9
Indikator Kinerja Utama Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Penanggung Jawab
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	Sub Bagian Perencanaan
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Pemenuhan peningkatan daya aparatur	
3	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Sub bagian Keuangan
4	Terlaksananya Peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang akan ditingkatkan dan di bangun pada tahun berjalan	Seksi Peningkatan, Pemeliharaan & Pengawasan Jalan & Jembatan
5	Terlaksananya Pembangunan Jalan sesuai dengan standar Bina Marga	Jumlah pembangunan jembatan dan panjang jalan yang akan dibangun pada tahun berjalan	Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan
6	Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang akan di bangun	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan bidang bina marga	Seksi Perencanaan Bina Marga
7	Menyipakan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	Seksi Tata Bangunan
8	Menyiapkan Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	
9	Meningkatnya wilayah pelayanan air minum	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih	Seksi Air Bersih dan Sanitasi
10	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi	Jumlah Kumulatif Rumah Tangga Yang memiliki akses sanitasi	
11	Meningkatnya drainase yang terbangun	Jumlah kawasan yang terlayani oleh saluran drainase perkotaan	
	Meningkatnya Kinerja dan Produktivitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Total Penyedia Barang atau Jasa Yang aktif	Seksi Bina Jasa Konstruksi
	Meningkatnya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Kontruksi (SIPJAKI)	Jumlah Penyedia barang atau jasa yang terentry	
	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Midang Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga jkerja konstruksi yang tersertifikasi	

12	Melaksanakan perencanaan tata ruang yang sesuai peraturan per-UU-an	Jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan	Seksi Perencanaan Tata Ruang
		Jumlah realisasi penyebaran informasi tentang tata ruang	
		Jumlah Perda RTR dan peraturan Zonasi yang disahkan	
13	Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Jumlah layanan pertimbangan teknis tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Seksi Pemanfaatan Tata Ruang
		Jumlah dokumen berita acara tinjau lapangan	
		Jumlah pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang	
14	Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk tertib administrasi pertanahan	Seksi Administrasi Pertanahan
15	Memfasilitasi konflik-konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
16	Melaksanakan inventarisasi aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	Jumlah area / lahan yang dapat diinventarisasi/diidentifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
17	Melaksanakan penamaan rupa bumi/toponimi unsur pemerintah daerah	Jumlah dokumen terkait toponimi/penamaan rupa bumi	
18	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium	Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
19	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Persentase Indeks Kepuasan pengguna alat berat	Sub Bagian TU UPT Peralatan

E. Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019

Pada tahun anggaran 2019 program dan kegiatan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut yaitu berjumlah 22 program dengan 49 kegiatan yang terbagi kedalam 5 bidang dan 1 sekretariat. Sedangkan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut berjumlah 4 program dengan 20 kegiatan, yang terbagi kedalam 2 UPT yaitu UPT Laboratorium berjumlah 3 program dengan 11 kegiatan, dan UPT Peralatan berjumlah 1 program dengan 9 kegiatan.

Program dan kegiatan yang ada pada masing – masing bidang, sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Sekretariat
	1	Kegiatan penyediaan jasa omunikasi, sumber daya air dan listrik	
	2	Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
	3	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	
	4	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
	5	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	
	6	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	7	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	8	Kegiatan penyediaan peralatan dan perelengkapan kantor	
	9	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	
	10	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	
	11	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	
	12	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	
	13	Kegiatan penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	14	Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional	
	15	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	16	Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	17	Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	
5	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Bidang Bina Marga
	18	Kegiatan perncanaan pembangunan jalan	
	19	Kegiatan pembangunan jalan	

	20	Kegiatan perencanaan pembangunan jembatan	
	21	Kegiatan pembangunan jembatan	
6	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		Bidang Sumber Daya Air
	22	Kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Sekretariat
	23	Kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS	
8	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		Bidang Pertanahan
	24	Kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah		Sekretariat
	25	Kegiatan penyusunan tabulasi data aset tetap	
10	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		Bidang Bina Marga
	26	Kegiatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	
	27	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	
11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong		Bidang Sumber Daya Air
	28	Kegiatan perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	
12	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Sekretariat
	29	Kegiatan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	
13	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		Bidang Sumber Daya Air
	30	Kegiatan perencanaan pembanguna jaringan irigasi	
	31	Kegiatan pembangunan pintu air	
	32	Kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai	
	33	Kegiatan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	
	34	Kegiatan pemberdayaan petani pemakai air	
14	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		Bidang Sumber Daya Air
	35	Kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	
15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
	36	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	
	37	Kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi (pendamping PANSIMAS)	
	38	Kegiatan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler)	
	39	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi	

		masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENUGASAN)	
	40	Kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Reguler)	
16		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	
	41	Kegiatan pendamping PNPM mandiri perkotaan (P2KP)	
17		Program Keciptakarya	
	42	Kegiatan pembangunan gedung kantor	
18		Program Perencanaan Tata Ruang	
	43	Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Bidang Tata Ruang
	44	Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan	
	45	Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	
19		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
	46	Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	
20		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	
	47	Kegiatan toponimi/penamaan rupa unsur administrasi pemerintahan	Bidang Pertanahan
21		Program Penataan Tata Guna Tanah	
	48	Kegiatan inventarisasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	
22		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	
	49	Kegiatan pembinaan badan usaha jasa konstruksi	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Tabel 2.10
Program dan Kegiatan UPT Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No	Program/Kegiatan		Penanggung Jawab
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		UPT Laboratorium
	1	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	
	2	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
	3	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	
	4	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	5	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	6	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
	7	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	8	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	9	Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
3	Program Pengembangan Teknologi Knstruksi		
	10	Kegiatan identifikasi dan informasi teknik konstruksi	
	11	Kegiatan optimalisasi laboratorium pengujian	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		UPT Peralatan
	12	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	13	Kegiatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	
	14	Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor	
	15	Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	
	16	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	
	17	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	18	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	
	19	Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	

	20	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	21	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	

F. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.11
Perjanjian Kinerja Eselon 2 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Peningkatan infrastruktur ke-PU-an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89,00%	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase jaringan irigasi berfungsi baik	84,00%	
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	25 Unit	Bidang Bina Marga
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19,00%	
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	36.06 %	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
		Persentase RT yang memiliki sanitasi yang layak	51.65 %	
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian tata ruang	100 %	Bidang Tata Ruang
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh	Persentase teridentifikasinya tanah	10 Lokasi	Bidang Pertanahan

	masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	negara		
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	3 Kasus	

Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Tabel 2.12
Perjanjian Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70	Sekretariat
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	7 Dok	
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Jumlah dokumen keuangan	17 Dokumen	
5	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (%)	5%	Bidang Bina Marga
6	Meningkatnya jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	16 Unit	

7	Meningkatnya akses air minum bagi masyarakat	Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapat akses air minum yang aman atau Tambahan jumlah sambungan rumah yang dapat dicapai kab/kota (SR)	1252 SR	Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
8	Meningkatnya akses sanitasi bagi masyarakat	Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (%) atau jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (SR)	1300 SR	
9	Meningkatkan dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan irigasi	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	68,8%	Bidang Sumber Daya Air
10	Meningkatkan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air	persentase ketersediaan air baku	50%	
11	Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan saluran sungai	persentase panjang sungai dalam kondisi baik	22,3%	
12	Meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air	Persentase panjang garis pantai dalam kondisi baik	5,2%	
	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase dokumen perencanaan	100%	Bidang Tata Ruang
		Persentase pertimbangan teknis tata ruang	100%	
		Persentase pengawasan tata ruang	100%	
13	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Negara oleh Masyarakat, swasta dan pemerintah	Nilai kumulatif penyelenggaraan penataan pertanahan kabupaten	10 IPPT dan 4 Rekome	Bidang Pertanahan

	daerah untuk pembangunan		ndasi redistribusi tanah	
14	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di kabupaten tanah laut	Jumlah lahan / area tanah yang difasilitasi penyelesaian sengketa tanah	3 konflik/sengketa tanah	
15	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium	Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	75%	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
16	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Persentase Indeks Kepuasan pengguna alat berat	70%	Sub Bagian TU UPT Peralatan

Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 2.13
Perjanjian Kinerja Eselon 4 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	7 Dokumen	Sub Bagian Perencanaan
2	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	1 Tahun	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Pemenuhan peningkatan daya aparatur	1 Tahun	
3	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	17 Dokumen	Sub bagian Keuangan
4	Terlaksananya Peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang akan ditingkatkan dan dibangun pada tahun berjalan	64,927 Km	Seksi Peningkatan, Pemeliharaan & Pengawasan

				Jalan & Jembatan
5	Terlaksananya Pembangunan Jalan sesuai dengan standar Bina Marga	Jumlah pembangunan jembatan dan panjang jalan yang akan dibangun pada tahun berjalan	16 Unit dan 21,215 Km	Seksi Pembangunan jalan dan Jembatan
6	Terlaksananya perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang akan di bangun	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan bidang bina marga	17 Dokumen	Seksi Perencanaan Bina Marga
7	Menyipakan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	18 Dokumen	Seksi Tata Bangunan
8	Menyiapkan Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	24 Bangunan	
9	Meningkatnya wilayah pelayanan air minum	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih	1252 SR	Seksi Air Bersih dan Sanitasi
10	Meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani sanitasi	Jumlah Komulatif Rumah Tangga Yang memiliki akses sanitasi	1300 Jiwa	
11	Meningkatnya drainase yang terbangun	Jumlah kawasan yang terlayani oleh saluran drainase perkotaan	7550 M	
	Meningkatnya Kinerja dan Produktivitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Total Penyedia Barang atau Jasa Yang aktif	421 Badan Usaha	Seksi Bina Jasa Konstruksi
	Meningkatnya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah Penyedia barang atau jasa yang terentry	100 Badan Usaha	
	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Midang Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga jkerja konstruksi yang tersertifikasi	150 Orang	
12	Melaksanakan perencanaan tata ruang yang sesuai peraturan per-UU-an	Jumlah persetujuan substansi dokumen perencanaan	63%	Seksi Perencanaan Tata Ruang
		Jumlah realisasi penyebaran informasi tentang tata ruang	33%	
		Jumlah Perda RTR dan peraturan Zonasi yang disahkan	33%	
13	Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Jumlah layanan pertimbangan teknis tata ruang yang sesuai dengan	100%	Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

		RTRW		
		Jumlah dokumen berita acara tinjau lapangan	100%	
		Jumlah pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	
14	Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk tertib administrasi pertanahan	10 Dokumen	Seksi Administrasi Pertanahan
15	Memfasilitasi konflik-konflik pertanahan	Jumlah fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	3 konflik/sengketa tanah	
16	Melaksanakan inventarisasi aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	Jumlah area / lahan yang dapat diinventarisasi/diidentifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	10 Dokumen Inventarisasi	Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
17	Melaksanakan penamaan rupa bumi/toponimi unsur pemerintah daerah	Jumlah dokumen terkait toponimi/penamaan rupa bumi	1 Dokumen	
18	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium	Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	75%	Sub Bagian TU UPT Laboratorium
19	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Persentase Indeks Kepuasan pengguna alat berat	70%	Sub Bagian TU UPT Peralatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut merupakan LAKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penyusunannya ini masih banyak dijumpai berbagai hambatan, antara lain pengumpulan data kinerja yang tersebar pada berbagai bidang dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut. Namun demikian, beberapa kegiatan kunci yang mempunyai nilai strategis tinggi telah dapat diukur kinerjanya, sehingga secara umum ketidakadaan informasi kinerja pada beberapa kegiatan tidak mempengaruhi capaian kinerja organisasi secara umum.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran, dengan membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Metode seperti ini sangat bermanfaat dalam upaya memberikan gambaran kepada pihak lain tentang pelaksanaan upaya organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan satuan kerja perangkat daerah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2019. Yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 195 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 6 Kinerja Utama dengan 12 Indikator Kinerja.

LAPORAN KINERJA 2019

1. Indikator Kinerja Utama

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/ Sumber Data
1	Meningkatkan Infrastruktur Ke PUsan	1	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik $\frac{\text{Panjang sungai dalam kondisi baik}}{\text{Panjang sungai Kabupaten}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Air
		2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik $\frac{\text{Jaringan Irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas Irigasi}} \times 100 \%$	
		3	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Bidang Bina Marga
		4	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air baku $\frac{\text{Total kapasitas Ikk lt/Det TALA}}{\text{Jumlah Penduduk TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	Bidang Sumber Daya Air
		2	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air $\frac{\text{Luas Kawasan Sungai dan Pesisir Pantai yang telah dilindungi}}{\text{Target Luas Kawasan Sungai dan Pesisir pantai yang akan dilindungi}} \times 100 \%$	
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman $\frac{\text{Total RT yang Terlayani}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak $\frac{\text{Total RT dengan sanitasi layak}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$	

4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	$\frac{\text{Hasil evaluasi (audit) perwujudan struktur ruang}}{2} \times 100\%$	Bidang tata ruang
---	--	---	---	--	-------------------

5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	1	Persentase teridentifikasinya tanah negara	$\frac{\text{Jumlah tanah negara yang teridentifikasi}}{\text{Jumlah luas tanah negara}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	2	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	$\frac{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terdata}} \times 100\%$	

2. Target Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Target Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkat infrastruktur ke PU an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha

	pengendalian daya rusak air		
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	36,06 % / 1252 SR
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 % / 1300 Jiwa
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	10 Lokasi
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	3 Kasus

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian %
1	Meningkat infrastruktur ke PU an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	100,5
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	100
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	100
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	127,28
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	100
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	99,8
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	93,52
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	37,86 %	38,02 %
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 %	51,65 %
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	100%	40

6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	100%	33,33
---	---	---	------	-------

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui :

- a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- b) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
- c) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- d) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
- e) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong.
- f) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.
- g) Program Perencanaan Tata Ruang.
- h) Program Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- i) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatkan infrastruktur ke PU an

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan anggaran Rp. 17.234.577.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.900.191.150,- atau 81%.
- 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 32.192.612.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.147.733.652,- atau 96,75%
- 3) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 75.935.026.204 dan terealisasi sebesar Rp. 72.775.503.619,- atau 96%.
- 4) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.525.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 907.991.400,- atau 52,54%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 5 (lima) indikator

sasaran yaitu :

- 1) Persentase panjang sungai dalam kondisi baik
- 2) Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik
- 3) Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
- 4) Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
- 5) Persentase Penyediaan Prasarana Air baku

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian per Indikator Sasaran 1

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkat infrastruktur ke PU an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	89,44%	100,5
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	84%	100
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	25 Unit	100
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	27,003 Km	127,28
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	19%	100

Indikator 1 : Persentase panjang sungai dalam kondisi baik

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan saluran sungai dan tercapai 100,5% dengan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai yaitu melakukan normalisasi Sungai Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung seluas 1.000 meter dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase panjang sungai dalam kondisi baik antara lain :

1. Banyaknya bangunan warga seperti dermaga kapal dan lalu lintas kapal yang menyulitkan alat bermanuver disungai.
2. Air pasang surut dimuara sungai membuat jam kerja alat berat terbatas.
3. Struktur tanah sungai berlumpur yang menyulitkan pembentukan tanggul hasil buangan galian sungai.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase panjang sungai dalam kondisi baik adalah :

1. Bekerja sama dengan warga untuk menentukan jam lalu lintas kapal dan operasi alat serta menerapkan kehati-hatian terhadap penggalian yang terlalu dekat fasilitas warga.
2. Membuat schedule penggalian secara maksimal menyesuaikan dengan pasang surut air.
3. Membuat metode kerja alat berat yang efektif dan maksimal untuk galian dan buangan lumpur.

Indikator 2 : Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengadaan sarana mendukung kegiatan pertanian dan tercapai 84% meliputi pembangunan konstruksi Rehab Embung Desa Asam Jaya Kec. Jorong, Pengerukan Bendungan RT 01 dan RW 01 Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati, Rehab Tanggul Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Rehab Gorong-Gorong Beton Desa Muara Asam-Asam Kec. Jorong, Rehab Tanggul Pertanian Penahan Air Asin Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur, Rehab Jembatan Penyeberangan Petani Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan, Rehab Pintu Air Pumpung Desa Kunyit Kec. Bajuin, Peningkatan Jembatan Penyeberangan Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati dan Peningkatan Jembatan Penyeberangan Pertanian Desa Kintap Kecil Kec. Kintap dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik antara lain :

1. Terjadinya ketidaksesuaian/kesepakatan yang berubah-ubah mengenai luasan tanah yang bebas antara warga dan pelaksana semenjak dari perencanaan dan pelaksanaan.

2. Akses melangsir material menuju lokasi sering terhambat karena ketidaksepakatan dengan warga mengenai izin lewat ataupun permintaan imbalan diluar kontrak.
3. Pelaksanaan yang masih dimusim hujan sangat menghambat proses pengecoran beton maupun melangsir material.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam pencapaian target indikator persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik adalah :

1. Memastikan perjanjian hibah tanah dari warga sesuai keperluan.
2. Memaksimalkan peran aparat desa dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal.

Indikator 3 : Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Jembatan, dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan Jembatan terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020 dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

- 2) Kegiatan yang mendukung Pembangunan Jembatan yaitu Rehab Jembatan Desa Bajuin Kec. Bajuin, Pembangunan Box Culvert Desa Jilatan Alur Kec. Jorong, Pembangunan Box Culvert Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur, Pembangunan Box Culvert Desa Asri Mulya Kec. Jorong, Pembangunan Box Culvert Desa Kurau Kec. Kurau, Pembangunan Box Culvert Desa Suka Ramah Rt 14 Kec. Panyipatan, Pembangunan Box Culvert Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Pembangunan Box Culvert Desa Telaga Langsung Kec. Takisung, Pembangunan Box Culvert Desa Martadah RT. 4 Kec. Tambang Ulang, Pembangunan Box Culvert Transos Sungai Riam Kec. Pelaihari, Pembangunan Jembatan Desa Swarangan, Pembangunan Jembatan Desa Sumber Makmur, Pembangunan Jembatan Desa Sungai Bakau, Pembangunan Box Culvert Desa Kurau Jl. Kencana Kec. Kurau, Pembangunan Box Culvert Jl. Arah Pantai Turki Swarangan Kec. Jorong, Pembangunan Siring Pengaman Jembatan Desa Sabuhur (Pt. Golden), Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Makmur Kec. Batu Ampar, Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Sungai Riam - Banua Tengah Kec. Pelaihari, Pelebaran Jembatan Ujung Batu Kec. Pelaihari, Rehabilitasi Box Crossing Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang, Pembangunan Jembatan Box Culvert Jl. Pertanian (Jl. JBG) Desa Swarangan Kec. Jorong, Pembangunan Jembatan Box Culvert Desa Bluru RT. 1 Kec. Batu Ampar, Pembangunan Jembatan Box Culvert Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari (Uk. 3 x 6 m) dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator pada Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) adalah :

- Keterbatasan agregat LPA dan LPB pada stok file quarry, yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan pekerjaan, dikarenakan quarry yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih belum maksimal produksi dan juga tidak hanya melayani daerah Kabupaten Tanah Laut saja tetapi juga ke daerah lain seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan KalTeng sebagian.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator pada Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) adalah :

- Menghimbau kepada penyedia untuk tidak tergantung pada satu quarry untuk pengambilan agregat untuk ketepatan waktu pelaksanaan.

Indikator 4 : Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jalan, Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK), Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Penugasan) dan tercapai 100%, dengan 6 kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan sebanyak 7 Dokumen yaitu, Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan Ke Pelabuhan, Konsultasi Perencanaan Pembangunan Jalan ke Rumah Sakit di Kel. Sarang Halang dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.
- 2) Kegiatan yang mendukung Pembangunan Jalan yaitu Perkerasan Jalan di Desa Tanjung Rt. 04 menuju Desa Tebing Siring Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Sambangan Menuju Makam Keramat Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Desa Bluru Kec. Batu Ampar, Perkerasan Jalan Desa Jilatan RT.6 Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan Desa Jilatan Alur Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Desa Handil Labuan Amas Rt. 04 dan Rt. 05 Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur, Perkerasan Jalan Desa Alur Sabuhur Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Desa Sungai Cuka Kec. Kintap,

Peningkatan Jalan Dusun 1 dan 2 Desa Kebun Raya Kec. Kintap, Perkerasan Jalan Desa Kintap Kecil Rt. 03, 06, 08 Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Masuk SMA, SMP, MTS N 1 Kurau Kec. Kurau, Perkerasan Jalan di Rt. 16 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan, Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 13 Desa Sungai Riam / Transos Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Rt. 3 Desa Kampung Baru Jalan Makam Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Rt. 1, 10, 4 Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Desa Sumber Makmur Kec. Takisung, TMMD Tahun 2019 Lokasi Martadah Baru Kec. Tambang Ulang, Peningkatan Jalan Desa sambangan jalan lentra kampung baru Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Alhikmah Kel. Angsau Pelaihari, Peningkatan Jalan gang rambut kel. Angsau Pelaihari, Peningkatan Jalan kamaratih tembus pemuda dan Jalan Nusa Indah Gg. Khalid Ds. Panggung kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Bakti 2 RT.3 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Kepembatuan RT.5 Desa Telaga, Peningkatan Jalan Desa Tampang RT.4 Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Tajau Mulia Kec. Batu Ampar, Peningkatan jalan Desa Pemalongan Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Menuju Rumah Sakit Sarang Halang Kec. Pelaihari, Pembangunan Jalan Kunyit - Angsau Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Kijang Mas - Jalan Tirta Jaya Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Pertanian (Jl. JBG) Desa Swarangan Kec. Jorong, Perkerasan Jalan Amparaya RT.8 RW.4 Balicak Subur Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan, Perkerasan Jalan Desa Arsi Mulya Kec. Jorong, Perkerasan Jalan Gunung Tembaga RT. 4 Desa Tampang Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Kutai Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Pembatuan RT. 5 - RT.10 Desa Telaga Kec. Pelaihari dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

- 3) Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang meliputi jasa konsultan perencanaan sebanyak 7 Dokumen yang terdiri dari Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec.

Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Jalan Rombongan Lima - Ranggung (Ruas No.5), Konsultansi Perencanaan Jalan Mekar Sari Trans Blok E - Pantai Loh Sari (Ruas No. 241) dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

- 4) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang meliputi Peningkatan Jalan RT.7 Desa Pemalongan Kec. Bajuin, Peningkatan jalan teluk Pulantan Desa Bati-Bati Kec. Bati Bati, Peningkatan Jalan Pelita Raya RT.07/03 Ds.Ujung Baru Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan RT.6 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan RT.2 Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur, Peningkatan Jalan Poros Desa Galam Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Desa Sumber Jaya RT 3, 6, 7, 9, 10 Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Desa Sebambar Baru Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Dusun Desa Mekarsari Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Desa Batu Mulia Kec. Panyipatan, Peningkatan Jalan Simpang Empat Atilam - Kunyit Desa Pabahanan Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Sungai Kembang Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Peningkatan Jalan RT.15 Desa Takisung Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Raya Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang, Peningkatan Jalan Desa Asam-Asam - Muara Asam-Asam Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Poros Desa Sukorejo – Sabuhur, Peningkatan Jalan Kerasik Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Desa Ujung Baru RT.5/6 Jl. Lembenteng Kec. Bati-Bati, Siring Jalan Galam - Pemalongan Kec. Bajuin, Pengaspalan Gang Melati Jalan Niaga Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Dua Mas Putra dan Jalan 2005 Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Ranggung - Pasar Ranggung RT. 9 Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Bakti Gang Tromol Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Menuju Pasar Hewan Sarang Halang Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Kuburan-Raden Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang, Pengaspalan Jalan Desa Asam-Asam RT.2 Kec. Jorong, Pengaspalan Jalan Desa Asam-

Asam RT. 8 Kec. Jorong, Pengaspalan Jalan Komplek Kijang Mas Kec. Pelaihari, Pengaspalan Jalan Sarang Halang RT. 8 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari, Pengaspalan Jalan A. Saleh / A. Kadir Desa Padang Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Poros Kayu Abang - Bingkulu 5 dan 6 Kec. Tambang Ulang, Pengaspalan Jalan Pertanian Ubudiyah RT.8 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan H. Atak Rasyidi RT. 8 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Keluarga RT. 6 dan Desa Ujung RT. 2 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Desa Tabanio Kec. Takisung, Pengaspalan Jalan Desa Pagatan Besar Kec. Takisung dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi.

- 5) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Reguler) yang meliputi Jasa konsultan pengawas dan konsultan survey jalan sebanyak 11 dokumen terdiri dari Konsultan pengawas jalan sebanyak 5 dokumen yaitu Konsultan Pengawas Jalan sungai rasau - pantai harapan (ruas no. 85), Konsultan Pengawas Jalan Padang Luas - Gunung Raja (ruas No. 24) , Konsultan Pengawas Jalan Gunung Makmur - Kuala Tambangan (Ruas No.15), Konsultan Pengawas Jalan Balirejo - Bajuin (Ruas No. 9), Konsultan Pengawas Jalan Sabuhur - Panyipatan (Ruas No. 29). Konsultan survey sebanyak 6 dokumen yaitu Jalan Wilayah 1 (Pelaihari), dan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan sungai rasau - pantai harapan (ruas no. 85), Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Padang Luas - Gunung Raja (Ruas No.24), Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Gunung Makmur - Kuala Tambangan (Ruas No.15), Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Balirejo - Bajuin (Ruas No. 9), Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Sabuhur - Panyipatan (Ruas No. 29) dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi.
- 6) Kegiatan yang mendukung rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Penugasan) yang meliputi Jasa Konsultasi Pengawasan 2 dokumen yaitu Konsultan Pengawas Jalan Karang Rejo Trans 300 (Ruas No.252), Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Jorong-Sei.Pampan (Ruas No.79) dengan pekerjaan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Karang Rejo Trans 300 (Ruas No.252), Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Jorong-Sei.Pampan (Ruas No.79) dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi..

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator pada Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) adalah :

- Keterbatasan agregat LPA dan LPB pada stok file quarry, yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan pekerjaan, dikarenakan quarry yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih belum maksimal produksi dan juga tidak hanya melayani daerah Kabupaten Tanah Laut saja tetapi juga ke daerah lain seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan KalimantanTengah sebagian.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator pada Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) adalah :

- Menghimbau kepada penyedia untuk tidak tergantung pada satu quarry untuk pengambilan agregat untuk ketepatan waktu pelaksanaan.

Indikator 5 : Persentase Penyediaan Prasarana Air baku

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan pembuatan embung sebagai penampung air untuk pertanian dan perkebunan dan tercapai 100%, meliputi Pembuatan Embung Dusun Wonosari Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan, Pembuatan Embung Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Pembuatan Embung Desa Kintap Kecil Kec. Kintap, Pembuatan Embung Desa Benua Raya dan Desa Padang Kec. Bati-Bati dan Pembuatan Embung Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur, dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase penyediaan prasarana air baku adalah :

- Ketersediaan lahan yang sering menghambat pekerjaan karena kesepakatan tanah yang tidak tercapai antara warga dan kebutuhan luasan konstruksi embung.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase penyediaan prasarana air baku adalah :

- Memastikan adanya hibah tanah dari pemilik lahan sesuai kebutuhan konstruksi embung sesuai perencanaan

Sasaran 2 : Meningkatkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong, dengan anggaran Rp. 6.330.109.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.675.124.300,- atau 42,26%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Luas sawah yang dapat dilayani (diiri dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik
- 2) Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5
Capaian per Indikator Sasaran 2**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diiri dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	99,8	99,8
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	93,52	93,52

Indikator 1: Luas sawah yang dapat dilayani (diiri dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan pintu air, bangunan

penunjang lainnya, serta perencanaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan konstruksi jembatan pertanian Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, jembatan pertanian Desa Tungkaran Kec. Pelaihari dan jembatan pertanian Desa Kurau Kec. Kurau, pembangunan konstruksi Pembuatan pintu air Desa Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur, Pembuatan pintu air Desa Bati-Bati dan Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati, Pembuatan pintu air/cangdam desa Tungkaran, Desa Atu-Atu dan Pembuatan pintu air beramban Kec. Pelaihari, Pembuatan pintu air Desa Sarikandi dan Desa Padang Luas Kec. Kurau. Perencanaan Pembuatan Embung, Talud, Siring, Pintu Air, Normalisasi Saluran, Survey Inventarisasi Sungai wilayah Kab. Tanah Laut. Dan Pembangunan Konstruksi Pembuatan Embung Dusun Wonosari desa Batu Mulya Kec. Panyipatan, Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Desa Kintap Kecil Kec. Kintap, Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur dan desa Padang Kec. Bati-Bati.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator luas sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik antara lain:

1. Terjadinya ketidaksesuaian/kesepakatan yang berubah-ubah mengenai luasan tanah yang bebas ataupun titik lokasi pekerjaan antara warga dan pelaksana semenjak dari perencanaan dan pelaksanaan.
2. Akses melangsir material menuju lokasi sering terhambat karena ketidaksepakatan dengan warga mengenai izin lewat ataupun permintaan imbalan diluar kontrak.
3. Pelaksanaan yang masih dimusim hujan sangat menghambat proses pengecoran beton maupun melangsir material.
4. Ketersediaan material kayu yang semakin jarang didapatkan.
5. Kualitas dan kuantitas pekerja lapangan dari penyedia yang tidak memadai.
6. Kualitas tim perencanaan jasa konsultasi yang tidak memadai.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase penyediaan prasarana air baku adalah :

1. Memastikan mendapatkan perjanjian hibah tanah dari warga sesuai keperluan pekerjaan.
2. Memaksimalkan peran serta aparat desa dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan dan manfaat yang didapatkan.
3. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal.
4. Membuat rencana konstruksi dengan material lokal yang lebih mudah didapat.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pelaksana/rekanan dan menjalankan mekanisme yang diperlukan untuk pemberian teguran.
6. Memaksimalkan mekanisme pemilihan penyedia dan kegiatan monev agar sesuai dengan kriteria perencanaan.

Indikator 2 : Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan talud irigasi, pembangunan siring sungai, pembuatan bangunan pemecah ombak. Dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan konstruksi Talud Irigasi Desa Asam Jaya Kec. Jorong, Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati, Desa Kampung Baru dan desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari. Konstruksi pembangunan siring sungai Kel. Angsau. Kec. Pelaihari, Desa Tambak Karya Kec. Kurau, Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur, Desa Kintapura Kec. Kintap, Siring Bangungan

Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Siring Embung Desa Sebamban Baru Kec. Kintap, Siring Sungai Intake PDAM IKK Jorong, Siring Penahan Abrasi Desa Swarangan Kec. Jorong dan Pembuatan Bangunan Pemecah Ombak Desa Mara Kintap Kec. Kintap.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air antara lain :

1. Kondisi air sungai yang tinggi menyebabkan pekerjaan siring dan talud menjadi terhambat .
2. Pasang surut air laut yang membuat pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dikerjakan dengan waktu tertentu.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah :

1. Memaksimalkan sumber daya pekerja dan metode kerja dewatering yang efektif agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Memaksimalkan jadwal pasang surut dengan jadwal pekerjaan bangunan pantai.

Sasaran 3 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah, dengan anggaran sebesar Rp. 26.618.414.590 dan terealisasi sebesar Rp25,411,088,163 atau 95,29%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman
- 2) Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Capaian per Indikator Sasaran 3

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	37,86 %	38,02 %	100,42
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 %	51,65 %	100

Indikator 1: Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan prasarana dan sarana air minum yang aman dan tercapai 100,42%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi pembangunan sumur bor yaitu di RT.12 dan RT.13 Kecamatan Panyipatan, Pembangunan IPA Kap. 30ltr/detik IKK Pelaihari dan sarana penunjang lainnya, Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Padang Luas Kec. Kurau, Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, Pemasangan Jaringan Perpipaan Jl. Sabrina dan Jl. Kebun Sayur Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi. Ada 3 kegiatan pembangunan sumur bor yang batal dilaksanakan yaitu pembangunan sumur bor di RT.7, RT.10 dan RT.11 Kecamatan Panyipatan disebabkan karena tidak mendapatkan sumber air di lokasi.
- 2) Kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENUGASAN) meliputi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman antara lain:

1. Luas wilayah pelayanan kabupaten tanah laut yang sangat luas, dimana terdapat 7 IKK wilayah pelayanan dengan masing-masing wilayah yang luas.
2. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat.
3. Kebutuhan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana air bersih yang besar, mengingat luas wilayah penanganan, serta kemampuan anggaran daerah yang terbatas dengan banyaknya penanganan di berbagai sektor.
4. Prasarana dan sarana air bersih yang tersedia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman adalah:

1. menentukan prioritas untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih pada satu wilayah tertentu terlebih dahulu, agar bisa terpenuhi secara bertahap.
2. Berusaha meningkatkan pembangunan pada sektor air bersih untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
3. Membuat rencana jangka menengah dalam penyediaan prasarana dan sarana air bersih, agar bisa menentukan kebutuhan anggaran dalam waktu 5 tahun.
4. Membuat rencana induk sistem penyediaan air bersih, agar dapat diketahui kebutuhan prasarana dan sarana pada tiap-tiap wilayah penanganan.

Indikator 2 : Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perpipaan untuk akses sanitasi atau air limbah masyarakat dan tercapai 100%, dengan

kegiatan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler) yang meliputi Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bati-Bati, Desa Benua Raya dan Desa Pandahan Kec. Bati-Bati, Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur dan Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari serta kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) bagi kesehatan.
2. Banyaknya rumah-rumah yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.
3. Posisi rumah-rumah masyarakat yang berjauhan, sehingga membutuhkan dana lebih dalam penanganan akses sanitasi.
4. Kemampuan anggaran daerah dalam melakukan penanganan, mengingat banyak sektor yang harus ditangani.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak adalah:

1. Melakukan kolaborasi sosialisasi bersama dengan Dinas Kesehatan tentang pentingnya perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) bagi kesehatan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan usulan kegiatan pembangunan sarana sanitasi melalui DAK Sanitasi Kementerian PUPR di lokasi sasaran penanganan.
3. Melakukan inisiasi penanganan melalui anggaran daerah untuk percepatan penanganan sanitasi.
4. Membuat rencana induk penanganan akses sanitasi yang layak, agar dapat diketahui kebutuhan pada tiap-tiap desa sasaran, dan dapat menentukan kebutuhan anggaran dalam penanganan.

Sasaran 4 : Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW.

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Program Perencanaan Tata Ruang, dengan anggaran sebesar Rp 1.738.107.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.200.353.697,00 atau 69,06%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.7
Capaian per Indikator Sasaran 4**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100%	100

Indikator : Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk mendukung kesesuaian ruang dengan RTRW tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan sosialisasi peraturan Perundang undangan tentang rencana tata ruang. Kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan aparat desa atau kelurahan mengenai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan dan pola ruang. Sosialisasi ini dilakukan setiap kecamatan di Kabupaten Tanah laut dan mengundang aparat / perangkat desa / kelurahan yang ada di masing masing Kecamatan.
- 2) Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang. Kegiatan ini untuk menyusun pola ruang yang lebih detail dan terperinci mengenai

pemanfaatan ruang disebut bagian wilayah perencanaan (BWP). Adapun dokumen yang dihasilkan pada kegiatan ini diantaranya Dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pelaihari yang meliputi dokumen laporan pendahuluan, dokumen laporan fakta analisa, dokumen laporan akhir, zoning regulation dan album peta, dokumen KLHS dan dokumen naskah penelitian. Dokumen untuk proses lagalisasi RDTR dan PZ BWP Bati-Bati yang meliputi dokumen teknis RDTR dan PZ BWP Bati-Bati, rekomendasi gubernur, persetujuan substansi peta dari BIG, persetujuan dari Kemntrian Agraria dan TR, raperda RDTR dan PZ BWP Bati-Bati dan dokumen validasi KLHS

- 3) Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang. Kegiatan ini dilakukan untuk proses pemanfaatan ruang yang terkendala masalah aturan yang berlaku dengan kegiatan eksisting yang sudah terbangun atau terlaksana dan atau masalah pemanfaatan ruang yang harus diselesaikan dengan masukan antar SKPD dalam forum Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD).

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase kesesuaian ruang dengan RTRW antara lain :

1. Berkas permohonan pengajuan Kesesuaian Tata Ruang yang masuk dari pihak pelaku usaha/kegiatan masih ada yang belum lengkap.
2. Belum maksimalnya informasi yang dapat diakses masyarakat tentang peruntukan ruang dan kesesuaian lahan berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase kesesuaian ruang dengan RTRW adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak perizinan serta pihak-pihak pelaku usaha/kegiatan.
2. Meningkatkan akses penyampaian informasi tentang peruntukan ruang dan kesesuaian lahan berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran 5 : Meningkatnya pemanfaatan tanah Negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan.

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan anggaran sebesar Rp. 68.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.410.000,- atau 37,29%..

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase teridentifikasinya tanah Negara.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8
Capaian per Indikator Sasaran 5**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	100%	40%	40

Indikator : Persentase teridentifikasinya tanah negara.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengidentifikasian tanah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah daerah untuk Pembangunan terkait dengan Pendataan Inventarisasi Asset Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum tercapai 40% dari 10 lokasi/titik yang ditargetkan hanya terealisasi 4 lokasi/titik. Kegiatan Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum adalah kegiatan yang meliputi Jumlah Area/Lahan yang dapat diinventarisasikan/diidentifikasi tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase teridentifikasinya tanah negara antara lain :

1. Terbatasnya fasilitas transportasi dalam melaksanakan kegiatan ke lapangan.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengukur dilapangan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam melakukan pengukuran.
3. Minimnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase teridentifikasinya tanah negara adalah :

1. Meminjam sarana operasional yang ada di bidang lain atau lebih sering menggunakan fasilitas pribadi.
2. Untuk memaksimalkan kegiatan pengukuran dilapangan, waktu pelaksanaan pengukuran menjadi lebih lama.
3. Dalam mencari data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah berkoordinasi dengan SKPD lainnya yaitu dengan BPKAD dan Kantor BPN Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran 6 : Meningkatkan penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut.

Tahun 2019, untuk mencapai ini telah dilaksanakan melalui :

- 2) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, dengan anggaran sebesar Rp. 88.296.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.958.000,- atau 30,97%..

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

- 1) Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah negara.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian per Indikator Sasaran 6

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	100%	33%	33,33

Indikator : Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan memfasilitasi konflik/sengketa pertanahan yang disampaikan atau dilaporkan kepada pemerintah daerah melalui Bidang Pertanahan Dinas PUPRP. Konflik/sengketa yang terjadi baik antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, maupun antar masyarakat dengan perusahaan/swasta ataupun antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Terkait konflik/sengketa lahan/tanah ini hanya bisa difasilitasi kalau ada laporan dari kelompok masyarakat atau dari swasta yang masuk ke Dinas PUPRP. Fasilitasi ini meliputi musyawarah antar kelompok yang berkonflik/bersengketa, melakukan pengecekan terhadap dokumen – dokumen terkait lahan/tanah yang disengketakan, melakukan pengukuran ke lapangan terkait lahan/tanah yang disengketakan. Tahun 2019 ada 1 laporan konflik/sengketa saja yang masuk ke Bidang Pertanahan Dinas PUPRP, dari 3 yang ditargetkan. Karena hanya satu konflik/sengketa saja yang disampaikan/dilaporkan maka yang dapat difasilitasi juga sebanyak 1 konflik/sengketa tersebut.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah antara lain :

1. Terbatasnya fasilitas transportasi ke lapangan terkait melakukan peninjauan terhadap lokasi yang berkonflik.
2. Keterbatasan data dukung terkait tanah atau lahan yang bersengketa seperti tidak adanya patok tanda batas tanah, luas tanah yang bersengketa, kesesuaian lahan sengketa dengan Tata Ruang untuk fungsi kegunaanya.
3. Lokasi dilapangan yang bersengketa sulit dilalui baik dengan jalan kaki maupun menggunakan alat transportasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah adalah :

1. Meminjam mobil/ Alat transportasi dari Bidang lain untuk menuju ke lokasi tanah sengketa
2. Mengambil data dukung kelengkapan dengang melakukan pengukuran melalui GPS Garmin Montana 680 atau menggunakan Drone pinjaman dari bidang lain atau informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Melakukan rapat mediasi dengan Tim Penyelesaian konflik/sengketa Kabupaten Tanah laut atau dengan Masyarakat/ Perusahaan yang bersengketa dan memfasilitasi kepada mereka yang berkonflik.

B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017, 2019 dan 2019.

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian IKU Tahun 2017, 2018 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017	
1	Meningkatkan infrastruktur ke-PU-an	1	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	89%	89%	89%	80,61%	70,61%
		2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	84%	84%	80,84%	82%	75,91%
		3	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	25 Unit	11 Unit	11 Unit	35 Unit	35 Unit
		4	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	27,003 Km	702,47 Km	650,83 Km	690,63 Km	863,29 Km
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	19%	90%	80%	80%	80%
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	14.373,24 Ha	15.130,9 Ha	13.617,81 Ha	13.262,89 Ha	13.262,89 Ha
		2	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	88,1%	90%	88%	87%	87%

3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	37,86 %	38,02 %	68%	68%	45,19%	45,19%
		2	Persentase rumah yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 %	51,65%	2620	2620	1950	1950
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100%	70%	70%	100%	100%
4	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	1	Persentase teridentifikasinya tanah negara	100%	40%	0	0	30	10
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	100%	33,33%	1	0	5	3

Analisa perbandingan capaian indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dapat diuraikan sebagai berikut :

Bidang Bina Marga.

Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur ke PU an.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

Indikator 3 : Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pada tahun 2017 ditarget cukup besar yaitu sebanyak 35 Unit jembatan dan terealisasi 100%, sedangkan tahun 2018 hanya ditargetkan sebanyak 11 unit jembatan dengan realisasi 15 unit atau sebesar 136,36 %. Untuk tahun 2019 ditarget 16 Unit jembatan dan terealisasi 25 unit atau 156,25%. Pembangunan jembatan di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun selalu dilakukan walaupun kenaikan tiap tahunnya tidak merata, diharapkan dengan bertambahnya jembatan bisa membantu masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya dan dapat mendukung pelaksanaan

pembangunan di Kabupaten Tanah Laut.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator pada jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah :

- Pendanaan yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan tidak terakomodirnya pembangunan jembatan yang telah direncanakan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator pada jembatan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah :

1. Rencana pembangunan jembatan agar supaya diusulkan melalui Musdes diteruskan ke Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dan Pokir Dewan.
2. Mengajukan penambahan anggaran agar pembangunan jembatan yang telah direncanakan terakomodir.

Indikator 4 : Jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap).

Pembangunan jalan di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun selalu dilakukan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, dari total panjang jalan di Kabupaten Tanah Laut yaitu 1826,63 Km sudah mencapai 53,05 % jalan di Kabupaten Tanah Laut dalam kondisi baik dan sedang (mantap). Ditahun 2017 dari target sepanjang 136,394 Km, dengan realisasi yaitu sepanjang 139,64 Km atau sebesar 102,38%. Pada tahun 2018 targetnya menjadi 69,238 Km dengan realisasinya sebesar 78,654 Km dari keseluruhan yang ditargetkan atau sebesar 113,60 %.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator pada jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah :

- Pendanaan yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan tidak terakomodirnya pembangunan jalan yang telah direncanakan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator pada jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) adalah :

1. Rencana pembangunan jalan agar supaya diusulkan melalui Musdes diteruskan ke Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dan Pokir Dewan.
2. Mengajukan penambahan anggaran agar pembangunan jalan yang telah direncanakan terakomodir.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Bina Marga

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
1	Meningkatkan infrastruktur ke-PU-an	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	25 Unit	11 Unit	11 Unit	35 Unit	35 Unit
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	27,003 Km	702,47 Km	702,47 Km	690,63 Km	863,29 Km

Garfik 3.1
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Bina Marga



Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi.

Sasaran 3 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman.

Capaian indikator persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman di Kabupaten Tanah Laut tahun 2017 dan 2018 ditargetkan cukup besar yaitu 2017 sebesar 45,15% dan tahun 2018 sebesar 68% yang mana realisasi di dua tahun tersebut mencapai 100%, sedangkan tahun 2019 hanya ditargetkan sebesar 37,86% atau sejumlah 1252 SR yang mana realisasi pada tahun 2019 terealisasi sepenuhnya atau 38,02%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman antara lain:

1. Luas wilayah pelayanan kabupaten tanah laut yang sangat luas, dimana terdapat 7 IKK wilayah pelayanan dengan masing-masing wilayah yang luas.
2. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat.
3. Kebutuhan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana air bersih yang besar, mengingat luas wilayah penanganan, serta kemampuan anggaran daerah yang terbatas dengan banyaknya penanganan di berbagai sektor.
4. Prasarana dan sarana air bersih yang tersedia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman adalah:

1. menentukan prioritas untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih pada satu wilayah tertentu terlebih dahulu, agar bisa terpenuhi secara bertahap.
2. Berusaha meningkatkan pembangunan pada sektor air bersih untuk

mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

3. Membuat rencana jangka menengah dalam penyediaan prasarana dan sarana air bersih, agar bisa menentukan kebutuhan anggaran dalam waktu 5 tahun.
4. Membuat rencana induk sistem penyediaan air bersih, agar dapat diketahui kebutuhan prasarana dan sarana pada tiap-tiap wilayah penanganan.

Indikator 2 : Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak.

Masalah sanitasi adalah termasuk juga masalah yang mendasar bagi masyarakat. Oleh karena itu setiap tahunnya juga ditargetkan cukup besar, agar masyarakat bisa terlayani apa yang menjadi kebutuhannya. Realisasi capaian kinerja yang ditargetkan setiap tahunnya terpenuhi sebesar 100 % bahkan untuk tahun 2019 realisasinya melebihi dari 100%. Dapat dikatakan tahun 2017 ditargetkan sebesar 1950 Jiwa dan Tahun 2018 ditarget 2620 Jiwa, untuk realisasinya capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan tahun 2019 dari yang ditarget 51,65% atau sebanyak 1205 Jiwa realisasinya sebanyak 1205 Jiwa atau capaian kinerjanya sebesar 100%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) bagi kesehatan.
2. Banyaknya rumah-rumah yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.
3. Posisi rumah-rumah masyarakat yang berjauhan, sehingga membutuhkan dana lebih dalam penanganan akses sanitasi.
4. Kemampuan anggaran daerah dalam melakukan penanganan, mengingat banyak sektor yang harus ditangani.

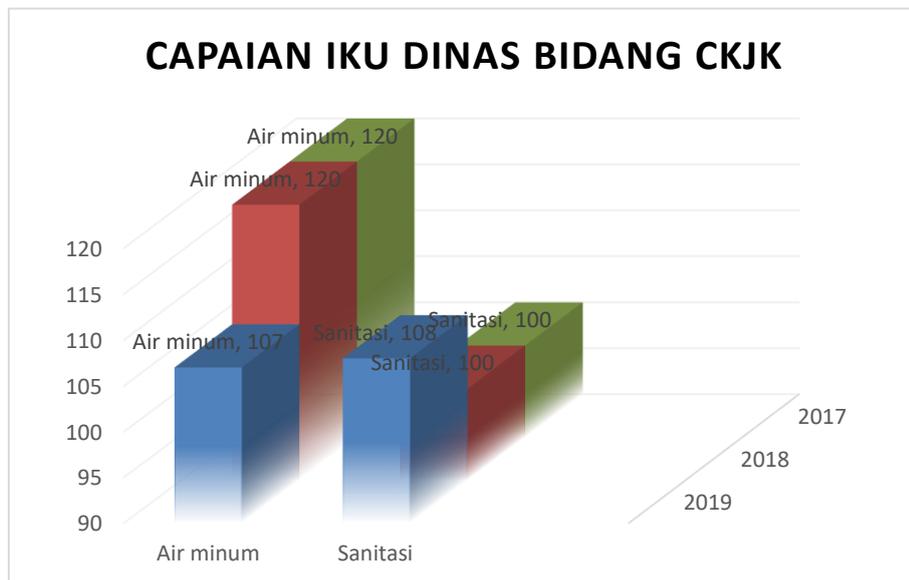
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak adalah:

1. Melakukan kolaborasi sosialisasi bersama dengan Dinas Kesehatan tentang pentingnya perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) bagi kesehatan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan usulan kegiatan pembangunan sarana sanitasi melalui DAK Sanitasi Kementerian PUPR di lokasi sasaran penanganan.
3. Melakukan inisiasi penanganan melalui anggaran daerah untuk percepatan penanganan sanitasi.
4. Membuat rencana induk penanganan akses sanitasi yang layak, agar dapat diketahui kebutuhan pada tiap-tiap desa sasaran, dan dapat menentukan kebutuhan anggaran dalam penanganan.

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	37,86% / 1252 SR	38,02% / 1352 SR	68% / 500 SR	120% / 600 SR	45,19% / 249 SR	120% / 299 SR
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65% / 1205 SR	51,65% / 1205 Jiwa	2620 Jiwa	2620 Jiwa	1950 Jiwa	1950 Jiwa

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi



Bidang Sumber Daya Air.

Sasaran 1 : Meningkatkan infrastruktur ke PU an.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase panjang sungai dalam kondisi baik.

Persentase panjang sungai dalam kondisi baik setiap tahun ditargetkan cukup besar dan terealisasi semuanya, pada tahun 2017 terdapat koreksi terhadap data yang digunakan, dimana terjadi perubahan data sungai di Kabupaten Tanah Laut, sehingga angka realisasi menjadi lebih kecil yaitu 70,61% dari yang ditargetkan sebesar 80,61%. Sedangkan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 89% dan terealisasi juga 89%, serta pada tahun 2019 ini dari target 89% juga terealisasi semuanya yaitu sebesar 89%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase panjang sungai dalam kondisi baik antara lain :

1. Untuk pekerjaan normalisasi sangat terkait dengan hibah tanah yang terdampak

normalisasi.

2. Kondisi pasang surut dimuara sungai membuat waktu kerja alat berat terbatas.
3. Material sungai berlumpur yang menyulitkan pembentukan tanggul hasil buangan galian sungai secara rapi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase panjang sungai dalam kondisi baik adalah :

1. Kerjasama dengan masyarakat dan aparat desa terkait ketersediaan lahan untuk timbunan dan galian.
2. Membuat schedule penggalian secara maksimal menyesuaikan dengan pasang surut.
3. Membuat metode kerja alat berat yang efektif dan maksimal untuk galian dan buangan tanah.

Indikator 2 : Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik.

Persentase capaian jaringan irigasi yang berfungsi baik tahun 2017 dan tahun 2018 secara angka mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 82% realisasi 75,91% dan tahun 2018 ditargetkan 84% realisasi 80,84%, hal ini juga disebabkan oleh perubahan data luasan irigasi fungsional Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan tahun 2019 terealisasi 100% dari yang ditargetkan, dimana target pada tahun 2019 sebesar 89% teralisasi juga sebesar 89%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik antara lain:

1. Ketersediaan lahan dan akses lokasi yang menghambat proses pekerjaan.
2. Pelaksanaan yang masih dimusim hujan sangat menghambat pekerjaan.
3. Banyaknya kerusakan jaringan irigasi karena kurangnya pemeliharaan pada jaringan irigasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik adalah :

1. Memaksimalkan peran serta aparat desa dan masyarakat agar juga terlibat dalam pembangunan.
2. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal.
3. Meningkatkan peran serta kelompok tani sehingga pemeliharaan bangunan irigasi dapat dimaksimalkan antar kelompok.

Indikator 3 : Persentase penyediaan prasarana air baku.

Untuk indikator kinerja persentase penyediaan prasarana air baku setiap tahun terealisasi 100% dari yang ditargetkan setiap tahunnya, baik tahun 2017, 2018 maupun 2019. Penyediaan prasarana air baku salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, karena menyangkut salah satu kebutuhan utama masyarakat, baik hubungannya dengan pertanian, perkebunan atau juga sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Pada tahun 2017 ditargetkan 80% mampu terealisasi seluruhnya yaitu sebesar 80%, begitu juga di tahun 2019 dimana ditargetkan sebesar 19% mampu juga teralisasi seluruhnya atau 19%. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 90% hanya mampu terealisasi 80%, hal ini disebabkan masyarakat belum dapat memastikan ketersediaan lahan untuk lokasi pekerjaan pembangunan embung, sehingga pekerjaan tidak dapat direalisasikan.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase penyediaan prasarana air baku adalah :

- Ketersediaan lahan yang sering terhambat karena kesepakatan tanah yang tidak tercapai antara warga dan kebutuhan luasan konstruksi embung.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase penyediaan prasarana air baku adalah :

- Memastikan adanya hibah tanah dari sesuai kebutuhan konstruksi embung sesuai perencanaan

Sasaran 2 : Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 2 (dua) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik.

Sebagian masyarakat Kabupaten Tanah Laut memiliki profesi atau pekerjaan sebagai petani atau mempunyai sawah, sehingga perlu pemerintah daerah memberikan perhatian juga terkait sawah – sawah yang dimiliki masyarakat apakah bisa diairi dengan irigasi – irigasi yang ada. Untuk indikator ini pemerintah daerah berusaha agar sawah – sawah yang dimiliki oleh masyarakat bisa teraliri air dengan baik, oleh sebab itu target luas sawah yang dapat dilayani (diari dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik setiap tahunnya diharapkan bisa terealisasi seluruhnya dari yang ditargetkan. Tahun 2017 dari target 13.262,89 Ha yang ditargetkan teralisasi 100%, tahun 2018 dari yang ditargetkan 15.130,9 Ha hanya teralisasi sebesar 13.617,81 Ha atau sebesar 90% saja dan pada tahun 2019 dari yang ditargetkan sebesar 14.401,84 Ha dengan realisasi sebesar 14.373,24 Ha atau 99,8%%. Tahun 2018 dan tahun 2019 sedikit mengalami penurunan hal ini disebabkan setelah dilakukan pendataan, jumlah konstruksi jaringan irigasi terbangun yang mengalami kerusakan mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan untuk memaksimalkan layanan.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator luas sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik antara lain:

1. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi secara mandiri.
2. Kurangnya sumber daya manusia dan penganggaran pemerintah

untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

3. Berubahnya tata fungsi lahan mengakibatkan debit air yang semakin menurun di jaringan irigasi pada musim kemarau.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator luas sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun pendekatan persuasip ke aparat terkait dan kelompok tani.
2. Peningkatan penganggaran dan kompetensi sumber daya manusia bidang sumber daya air.
3. Menata daerah hulu baik dari kordinasi vertikal maupun sektoral.

Indikator 2 : Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air.

Terkait indikator ini, juga sangat membantu sekali kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal pada areal pesisir sungai maupun pantai. Karena sangat rawan bagi pemukiman masyarakat maupun fasilitas umum di sekitarnya mengalami bencana yaitu mengalami resiko abrasi. Maka perlu dibangun konstruksi siring dan lain-lainnya untuk melindungi dari resiko abrasi tersebut. Oleh sebab itu persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air, setiap tahunnya memang ditargetkan cukup besar. Sedangkan untuk realisasinya sendiri, pada tahun 2017 dari yang ditargetkan sebesar 87% terealisasi sebesar 87% juga, tahun 2018 mengalami penurunan dari yang ditargetkan sebesar 90% hanya terealisasi sebesar 88%, sedangkan untuk tahun 2019 dari yang ditargetkan sebesar 94,2% yang terealisasinya sebesar 88,1%. Penurunan capaian kinerja di dua tahun terakhir ini disebabkan karena luasan daerah yang perlu perlindungan akibat daya rusak air mengalami peningkatan, sehingga faktor pembagiannya menjadi lebih besar.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air antara lain :

1. Cuaca dan iklim ekstrim tidak menentu mengakibatkan proses abrasi dan longsor mengalami peningkatan.
2. Pemukiman yang merambah sempadan sungai dan pantai.
3. Rusaknya bagian hulu DAS mengakibatkan percepatan aliran air yang meninggikan tingkat daya rusak.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air adalah :

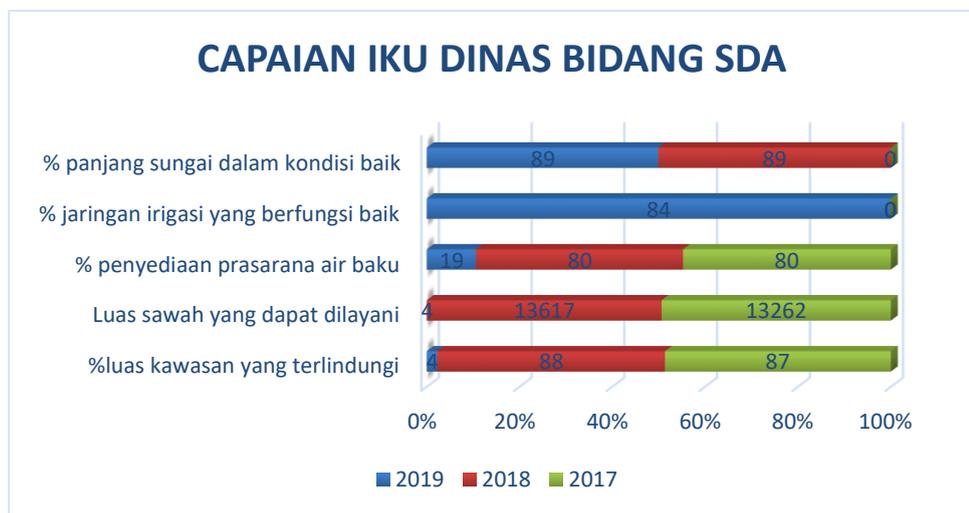
1. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.
2. Perlunya aturan penerapan batas sempadan sungai dan pantai yang sesuai karakteristik daerah.
3. Perlunya kerjasama lintas sektoral menangani kerusakan DAS.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Sumber Daya Air

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
1	Meningkat infrastruktur ke-PU-an	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	89%	89%	89%	80,61%	70,61%
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	84%	84%	80,84%	82%	75,91%
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	19%	90%	80%	80%	80%

2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	14.373,24 Ha	15.130,9 Ha	13.617,81 Ha	13.262,89 Ha	13.262,89 Ha
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	88,1%	90%	88%	87%	87%

Grafik 3.3
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Sumber Daya Air



Bidang Tata Ruang.

Sasaran 3 : Meningkatnya kesesuaian ruang dengan RTRW.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase kesesuaian tata ruang dengan RTRW

Setiap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut harus memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Laut baik untuk pengembangan industri, perhubungan, pariwisata, pertanian dan perikanan, sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2016 – 2036. Maka dari itu setiap tahunnya baik target maupun realisasinya diharapkan capaian kinerja sebesar 100%. Dimana bahwa setiap rencana pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan Perda RTRW yang ditetapkan. Pada tahun 2017 ditargetkan 100% atau 54 dokumen pertimbangan teknis yang disusun, terealisasi 100%. Tahun 2018 ditargetkan 70% atau 58 dokumen pertimbangan teknis yang terealisasi juga 70% atau 58 dokumen pertimbangan teknis tersusun seluruhnya. Untuk tahun 2019 ditargetkan 100% atau 87 dokumen pertimbangan teknis, terealisasi juga seluruh dokumen. Maka untuk capaian ditahun 2017, 2018 dan 2019 semuanya 100%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan RTRW antara lain antara lain :

1. Berkas permohonan pengajuan Kesesuaian Tata Ruang yang masuk dari pihak pelaku usaha/kegiatan masih ada yang belum lengkap.
2. Belum maksimalnya informasi yang dapat diakses masyarakat tentang peruntukan ruang dan kesesuaian lahan berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase kesesuaian tata ruang dengan RTRW adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pihak perizinan serta pihak-pihak pelaku usaha/kegiatan.
2. Meningkatkan akses penyampaian informasi tentang peruntukan ruang dan kesesuaian lahan berdasarkan RTRW Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Tata Ruang

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
3	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100%	70%	70%	100%	100%

Grafik 3.4
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Tata Ruang

CAPAIAN IKU DINAS BIDANG TATA RUANG



Bidang Pertanahan.

Sasaran 4 : Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase teridentifikasinya tanah negara

Untuk indikator persentase teridentifikasinya tanah negara tahun 2017 dan 2019 ditargetkan 100% atau 30 lokasi pada tahun 2017 dan 10 lokasi pada tahun 2019. Dari yang ditargetkan tersebut hanya dapat terealisasi pada tahun 2017 sebanyak 10 lokasi atau 33,33% dan pada tahun 2019 terealisasi 1 lokasi atau 40% dari yang ditargetkan pada masing-masing tahun tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan yang terindikasi di atas tanah negara. Sedangkan pada tahun 2018 tidak ditargetkan maka secara otomatis juga tidak ada realisasinya.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase teridentifikasinya tanah negara antara lain :

1. Terbatasnya fasilitas transportasi dalam melaksanakan kegiatan ke lapangan.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengukur dilapangan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam melakukan pengukuran.
3. Minimnya data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase teridentifikasinya tanah negara adalah :

1. Meminjam sarana operasional yang ada di bidang lain atau lebih sering menggunakan fasilitas pribadi.
2. Untuk memaksimalkan kegiatan pengukuran dilapangan, waktu pelaksanaan pengukuran menjadi lebih lama.
3. Dalam mencari data terkait lokasi asset dan fasilitas umum pemerintah berkoordinasi dengan SKPD lainnya yaitu dengan BPKAD dan Kantor BPN Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran 5 : Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran yaitu :

Indikator 1 : Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah negara.

Untuk indikator persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah negara, dari yang ditargetkan setiap tahunnya, tidak semuanya dapat direalisasikan. Bahkan untuk tahun 2018 dari yang ditargetkan cuma 1 konflik tidak bisa terealisasi. Sedangkan pada tahun 2017 dari yang ditargetkan 5 konflik teralisasi hanya 3 konflik saja yang dapat difasilitasi atau sebesar 60%. Sedangkan pada tahun 2019 dari yang ditargetkan 3 konflik hanya mampu terealisasi 1 konflik yang difasilitasi atau sebesar 33,33%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah negara antara lain :

1. Terbatasnya fasilitas transportasi ke lapangan terkait melakukan peninjauan terhadap lokasi yang berkonflik.
2. Keterbatasan data dukung terkait tanah atau lahan yang bersengketa seperti tidak adanya patok tanda batas tanah, luas tanah yang bersengketa, kesesuaian lahan sengketa dengan Tata Ruang untuk fungsi kegunaannya.
3. Lokasi dilapangan yang bersengketa sulit dilalui baik dengan jalan kaki maupun menggunakan alat transportasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah negara adalah :

1. Meminjam mobil/ Alat transportasi dari Bidang lain untuk menuju ke lokasi tanah sengketa
2. Mengambil data dukung kelapangan dengan melakukan pengukuran melalui GPS Garmin Montana 680 atau menggunakan Drone pinjaman dari bidang lain atau informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Melakukan rapat mediasi dengan Tim Penyelesaian konflik/sengketa Kabupaten Tanah laut atau dengan Masyarakat/ Perusahaan yang bersengketa dan memfasilitasi kepada mereka yang berkonflik.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Pertanahan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017
1	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	100% / 10 Lokasi	40% atau 4 lokasi.	-	-	30	10
2	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	3 konflik	33,33% atau 1 konflik saja	1	0	5	3

Grafik 3.5
Perbandingan Capaian IKU Dinas pada Bidang Pertanian



C. Capaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 sasaran strategis yaitu :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanian
- Sasaran 3 : Meningkatnya Infrastruktur ke PU an, yang memilki 3 (tiga) indikator yaitu :
 1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik
 2. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
 3. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) indikator yaitu Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat			
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publik	Nilai SAKIP DPUPR	70	-	-
3	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	38 %/ 21.215 Km	27,003 Km	127,3%
		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	84%	84%	100
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	65%/ 1252 SR	1352 SR	108
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten	100%	100%	100

D. Perbandingan Realisasi Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Tabel 3.17
Perbandingan Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017,2018 dan 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		2019		
			2017	2018	Target	Realisasi	Capaian %
1	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	37,5	75	70	75	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Pelayanan Publi	Nilai SAKIP DPUPR	65,20	66,80	70	-	-
3	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	863,29 Km	650,83 Km	38 % / 21.215 Km	27,003 Km	127,3

		Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	75,91%	80,84%	84%	84%	100
		Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	45,19%	68%	65% / 1252 SR	1352 SR	108
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten	100%	70%	100%	100%	100%

Uraian Capaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.

Pada sasaran startegis Meningkatkan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dicapai melalui 5 (lima) indikator :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pada indikator ini dapat dijelaskan bahwa kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan cukup memuaskan, khususnya pada pelayanan di UPT Peralatan dan UPT Laboratorium, walaupun dengan keterbatasan personil, sarana dan prasarana mampu melayani konsumen baik dari perusahaan atau dari masyarakat. Ini terlihat dari capaian IKM yang diperoleh setiap tahunnya. Kecuali pada tahun 2017 untuk UPT Laboratorium sudah melakukan penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat, sedangkan UPT Peralatan belum melakukan penilaian terhadap indeks kepuasan masyarakat oleh sebab itu capaian untuk tahun 2017

2. Nilai SAKIP DPUPRP

Pada indikator ini capaian dari Nilai SAKIP DPUPRP setiap tahunnya mengalami peningkatan, ini bisa dilihat dari hasil penilaian yang disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut. Walaupun masih ada beberapa kekurangan, tetapi selalu berusaha untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dan laporan-laporan lainnya lebih baik lagi. Untuk tahun 2019 realisasi capaian belum bisa dihitung karena belum ada penilaian/reviu dari Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.

3. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik

Pada indikator ini tahun 2019 ditargetkan sebesar 38 % atau sepanjang 21.215 Km jalan kabupaten dari total seluruh panjang jalan kabupaten yaitu

1826,33 km terealisasi pada tahun 2019 melebihi dari yang ditargetkan yaitu sepanjang 27.003 Km atau dengan capaian 127,3%. Realisasi pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 sepanjang 863,29 Km dan realisasi pada tahun 2018 sepanjang 650,83 Km

4. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Pada indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik ditahun 2019 ditargetkan sebesar 84% dan teralisasi juga sebesar 84% atau dengan capaian 100%

5. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. Untuk indikator proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak tahun 2019 ditargetkan sebesar 65% atau sebanyak 1252 SR yang kemudian terealisasi lebih dari yang ditargetkan yaitu sebesar 1353 SR atau dengan capaian 108%.

6. Persentase pemanfaatan ruang dengan RTRW kabupaten

Pada indikator ini dapat dijelaskan bahwa dari yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 100%, mampu direalisasikan seluruhnya yaitu sebesar 100% juga atau dengan capaian 100% yaitu Pada tahun 2017 ditargetkan 100% atau 54 dokumen pertimbangan teknis yang disusun, terealisasi 100%. Tahun 2018 ditargetkan 70% atau 58 dokumen pertimbangan teknis yang terealisasi juga 70% atau 58 dokumen pertimbangan teknis tersusun seluruhnya. Untuk tahun 2019 ditargetkan 100% atau 87 dokumen pertimbangan teknis dan 2 dokumen RDTR yaitu untuk Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Bati-Bati, terealisasi juga seluruh dokumen. Maka untuk capaian ditahun 2017, 2018 dan 2019 semuanya 100%.

E. Capaian Indikator Kinerja Eselon 3 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Sekretariat

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.17
IKU Sekretariat

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	NILAI SAKIP	Sekretariat
2.	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi}}{\text{Total sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100 \%$	Sekretariat
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu}}{\text{Total dokumen perencanaan}} \times 100 \%$	Sekretariat
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah dokumen keuangan yang tersusun tepat waktu}}{\text{Total dokumen keuangan}} \times 100 \%$	Sekretariat

2. Target Indikator Kinerja

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

Target 3.19
Target IKU Sekretariat Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	70
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Sekretaris DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Target dan Capaian IKU Sekretariat Tahun 2109

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	70	94%
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%	100%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	100%
4	Pelayanan Administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PUPRP

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 9.999.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.904.200,- atau 69,04%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

- 1) Nilai SAKIP DPUPRP

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	70	66,80	94%

Indikator : Nilai SAKIP Dinas PUPRP

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan SAKIP yaitu, Penyusunan, Laporan Kinerja, Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Rencana Strategis, Pohon Kinerja. Dari dokumen – dokumen tersebut dilakukan penilaian oleh SKPD terkait untuk memberikan penilaian terhadap laporan SAKIP yang disampaikan.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator Nilai SAKIP DPUPRP antara lain :

1. Masih rendahnya komitmen dan peran serta semua pihak dalam membangun Akuntabilitas Kinerja.
2. Kualitas pengukuran kinerja belum sepenuhnya berorientasi kepada pencapaian kinerja program, akan tetapi lebih banyak berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
3. Tidak tersipkannya data secara benar, sehingga saat data tersebut diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja kesulitan dalam menemukan data yang dimaksud.
4. Masih kurangnya kualitas laporan kinerja yang disusun, dimana isi dari laporan kinerja lebih banyak memuat penjelasan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, tapi belum memuat analisis pencapaian kinerja program dan analisis penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator Nilai SAKIP DPUPRP adalah :

1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada semua aparatur yang terlibat dalam akuntabilitas kinerja serta dukungan dari pimpinan SKPD.
2. Memperbaiki kualitas dari pengukuran kinerja, dimana pengukuran kinerja lebih banyak berorientasi pada pencapaian kinerja program dan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
3. Mengarsipkan data-data terkait penyusunan laporan kinerja, baik yang di arsipkan di Sub Bagian Perencanaan maupun data-data yang diarsipkan ada pada bidang dan UPT masing-masing, sehingga pada saat data-data tersebut akan lebih mudah ditemukan.
4. Memberbaiki kualitas laporan kinerja yang disusun, laporan kinerja harus banyak memuat analisis pencapaian kinerja dibandingkan penjelasan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana administrasi perkantoran

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp. 6.076.906.560,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.921.761.525,- atau 80,99%.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran sebesar Rp. 641.887.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 604.038.000,- atau 99,10%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPUPRP

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
2	Meningkatnya Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPUPRP	100%	100%	100%

2) Indikator : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPUPRP

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan – kegiatan kantor atau kedinasan dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi.
- 2) Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor berupa meja kerja, kursi kerja, Hard disk, komputer, laptop dan lain-lainnya.
- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor.
- 5) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan.
- 6) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi lainnya.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPUPRP antara lain :

1. Dinas PUPRP belum memiliki tempat rapat yang presentativ.
2. Masih belum cukup tersedianya kendaraan dinas operasional yang sesuai dengan kondisi lapangan sehingga dapat mendukung kegiatan bidang di lapangan.
3. Masih kekurangan tenaga/personil terutama untuk personil laki-laki dalam tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat sesuai tugas dan fungsi
4. Masih terkendala tenaga yang aplikatif dengan aplikasi sistem kepegawaian.
- 5.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPUPRP adalah :

1. Memaksimal ruangan yang ada untuk kegiatan rapat-rapat dinas walaupun ruangan tersebut tempatnya sangat terbatas.
2. Memaksimalkan kendaraan dinas operasional yang ada untuk kegiatan pengawasan atau pekerjaan dilapangan, walaupun kendaraan yang ada tidak tepat dengan kondisi lapangan ada.
3. Memaksimal tenaga Pegawai Tidak Tetap yang ada.
4. Meningkatkan kemampuan ASN dan pemanfaatan tenaga bantuan dari pegawai tidak tetap.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan sarana kantor terkait dengan pemeliharaan sarana kantor.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 9.999.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.904.200,- atau 69,04%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
3	Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%

Indikator : Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan – laporan yang disusun perencanaan yaitu Penyusunan Laporan Kinerja, Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Rencana Strategis, Pohon Kinerja, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran, Laporan SPM dan laporan lainnya terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu yang diperlukan dalam melakukan analisa kegiatan perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki sehingga mengalami kesulitan dalam percepatan penyelesaian penyusunan.
3. Tata kelola pengarsipan data maupun dokumen sebelumnya masih tidak berjalan dengan baik.
4. Keterlambatan data yang disampaikan oleh bidang sehingga menghambat proses penyusunan suatu dokumen.

5. Data yang disampaikan seringkali tidak lengkap yang berakibat juga proses penyusunan dokumen jadi terhambat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator Persentase dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu adalah :

1. Memaksimal ASN yang ada dan dibantu dengan tenaga pegawai tidak tetap yang dimiliki.
2. Mengusulkan di tahun berikutnya untuk menambah ASN yang mempunyai disiplin ilmu yang tepat sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan, sehingga mampu menganalisa kegiatan-kegiatan di perencanaan.
3. Melakukan tata kelola pengarsipan data dan dokumen perencanaan secara bertahap dan berkala.
4. Melakukan koordinasi yang lebih intens dan persuasif kepada seluruh ASN lingkup Dinas PUPRP agar setiap kegiatan terkait penyusunan dokumen-dokumen yang ada bisa terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sasaran 4 : Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp. 30.203.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.690.000,- atau 94,99%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :

- 2) Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi keuangan	Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%

Indikator : Dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan yang disusun yaitu Laporan Fisik dan Keuangan, Laporan Triwulan Pengadaan Barang dan Jasa, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun laporan lainnya terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu antara lain :

1. Pengumpulan data sering mendekati tenggat waktu bahkan melebihi batas waktu yang ditentukan.
2. Kurang lengkapnya data yang disampaikan yang berakibat terlambatnya penyusunan laporan/dokumen.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu adalah :

Lebih sering mengingatkan kepada bidang agar dalam pengumpulan data tepat waktu dan data yang disampaikan supaya dilengkapi, sehingga proses penyusunan laporan bisa berjalan dengan lancar dan bisa terselesaikan juga tepat waktu.

Bidang Bina Marga

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.25
IKU Bidang Bina Marga

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	$\frac{\text{Panjang Jalan ditingkatkan}}{\text{Total Panjang Jalan}} \times 100 \%$	BM
2.	meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	$\frac{\text{Jembatan ditingkatkan}}{\text{Total jumlah jembatan}} \times 100 \%$	BM

2. Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Target IKU Bidang Bina Marga Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	3,1%
2.	Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	4,9%

3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Bina Marga DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.27
Target dan Capaian IKU Bidang Bina Marga Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	3,1%	3,1%
2	Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	4,9%	4,9%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- b) Program Pembangunan Jalan dan Pembangunan Jembatan

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1. Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- 2) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp 32.192.612.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.147.733.652,- atau 96,75 %.
- 3) Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp. 75.935.026.204,- dan terealisasi sebesar Rp. 72.775.505.619,- atau 95,84 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	3,1%	3,1%	100 %

Indikator 1 : Persentase kenaikan panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan, Pembangunan Jalan, Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK), Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Penugasan) dan tercapai 100%, dengan 6 kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan sebanyak 7 Dokumen yaitu, Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan Ke Pelabuhan, Konsultansi Perencanaan Pembangunan Jalan ke Rumah Sakit di Kel. Sarang Halang
- 2) Kegiatan yang mendukung Pembangunan Jalan yaitu Perkerasan Jalan di Desa Tanjung Rt. 04 menuju Desa Tebing Siring Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Sambangan Menuju Makam Keramat Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Desa Bluru Kec. Batu Ampar, Perkerasan Jalan Desa Jilatan RT.6 Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan Desa Jilatan Alur Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Desa Handil Labuan Amas Rt. 04 dan Rt. 05 Desa Handil Labuan Amas Kec. Bumi Makmur, Perkerasan Jalan Desa Alur Sabuhur Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Desa Sungai Cuka Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Dusun 1 dan 2 Desa Kebun

Raya Kec. Kintap, Perkerasan Jalan Desa Kintap Kecil Rt. 03, 06, 08 Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Masuk SMA, SMP, MTS N 1 Kurau Kec. Kurau, Perkerasan Jalan di Rt. 16 Desa Suka Ramah Kec. Panyipatan, Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 13 Desa Sungai Riam / Transos Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Rt. 3 Desa Kampung Baru Jalan Makam Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Rt. 1, 10, 4 Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Desa Sumber Makmur Kec. Takisung, TMMD Tahun 2019 Lokasi Martadah Baru Kec. Tambang Ulang, Peningkatan Jalan Desa sambangan jalan lentra kampung baru Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Alhikmah Kel. Angsau Pelaihari, Peningkatan Jalan gang rambutan kel. Angsau Pelaihari, Peningkatan Jalan kamaratih tembus pemuda dan Jalan Nusa Indah Gg. Khalid Ds. Panggung kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Bakti 2 RT.3 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Kepembatuan RT.5 Desa Telaga, Peningkatan Jalan Desa Tampang RT.4 Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Tajau Mulia Kec. Batu Ampar , Peningkatan jalan Desa Pemalongan Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Menuju Rumah Sakit Sarang Halang Kec. Pelaihari, Pembangunan Jalan Kunyit - Angsau Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Kijang Mas - Jalan Tirta Jaya Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Pertanian (Jl. JBG) Desa Swarangan Kec. Jorong, Perkerasan Jalan Amparaya RT.8 RW.4 Balicak Subur Desa Kandangan Lama Kec. Panyipatan, Perkerasan Jalan Desa Arsi Mulya Kec. Jorong, Perkerasan Jalan Gunung Tembaga RT. 4 Desa Tampang Kec. Pelaihari, Perkerasan Jalan Kutai Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Pembatuan RT. 5 - RT.10 Desa Telaga Kec. Pelaihari.

- 3) Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang meliputi jasa konsultan perencanaan sebanyak 7 Dokumen yang terdiri dari Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultansi Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020,

Konsultansi Perencanaan Jalan Rombongan Lima - Ranggung (Ruas No.5),
Konsultansi Perencanaan Jalan Mekar Sari Trans Blok E - Pantai Loh Sari
(Ruas No. 241).

- 4) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan yang meliputi Peningkatan Jalan RT.7 Desa Pemalongan Kec. Bajuin, Peningkatan jalan teluk Pulantan Desa Bati-Bati Kec. Bati Bati, Peningkatan Jalan Pelita Raya RT.07/03 Ds.Ujung Baru Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan RT.6 Desa Ambawang Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan RT.2 Desa Gunung Mas Kec. Batu Ampar, Peningkatan Jalan Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur, Peningkatan Jalan Poros Desa Galam Kec. Bajuin, Peningkatan Jalan Desa Sumber Jaya RT 3, 6, 7, 9, 10 Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Desa Sebamban Baru Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Dusun Desa Mekarsari Kec. Kintap, Peningkatan Jalan Desa Batu Mulia Kec. Panyipatan, Peningkatan Jalan Simpang Empat Atilam - Kunyit Desa Pabahanan Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Atu-Atu Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Desa Sungai Kembang Desa Gunung Makmur Kec. Takisung, Peningkatan Jalan RT.15 Desa Takisung Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Raya Desa Martadah Baru Kec. Tambang Ulang, Peningkatan Jalan Desa Asam-Asam - Muara Asam-Asam Kec. Jorong, Peningkatan Jalan Poros Desa Sukorejo – Sabuhur, Peningkatan Jalan Kerasik Desa Bentok Darat Kec. Bati-Bati, Peningkatan Jalan Desa Ujung Baru RT.5/6 Jl. Lembenteng Kec. Bati-Bati, Siring Jalan Galam - Pemalongan Kec. Bajuin, Pengaspalan Gang Melati Jalan Niaga Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Dua Mas Putra dan Jalan 2005 Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Ranggung - Pasar Ranggung RT. 9 Kec. Takisung, Peningkatan Jalan Bakti Gang Tromol Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Menuju Pasar Hewan Sarang Halang Kec. Pelaihari, Peningkatan Jalan Kuburan-Raden Desa Tambang Ulang Kec. Tambang Ulang, Pengaspalan Jalan Desa Asam-Asam RT.2 Kec. Jorong, Pengaspalan Jalan Desa Asam-Asam RT. 8 Kec. Jorong, Pengaspalan Jalan Komplek Kijang Mas Kec. Pelaihari, Pengaspalan Jalan Sarang Halang RT. 8 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari, Pengaspalan Jalan A. Saleh / A. Kadir Desa Padang Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Poros Kayu Abang - Bingkulu 5 dan 6 Kec. Tambang Ulang, Pengaspalan Jalan Pertanian Ubudiyah RT.8 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan H. Atak Rasyidi RT. 8 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan

Jalan Keluarga RT. 6 dan Desa Ujung RT. 2 Kec. Bati-Bati, Pengaspalan Jalan Desa Tabanio Kec. Takisung, Pengaspalan Jalan Desa Pagatan Besar Kec. Takisung.

- 5) Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Reguler) yang meliputi Jasa konsultan pengawas dan konsultan survey jalan sebanyak 11 dokumen terdiri dari Konsultan pengawas jalan sebanyak 5 dokumen yaitu Konsultan Pengawas Jalan sungai rasau - pantai harapan (ruas no. 85), Konsultan Pengawas Jalan Padang Luas - Gunung Raja (ruas No. 24) , Konsultan Pengawas Jalan Gunung Makmur - Kuala Tambangan (Ruas No.15), Konsultan Pengawas Jalan Balirejo - Bajuin (Ruas No. 9), Konsultan Pengawas Jalan Sabuhur - Panyipatan (Ruas No. 29). Konsultan survey sebanyak 6 dokumen yaitu Jalan Wilayah 1 (Pelaihari), dan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan sungai rasau - pantai harapan (ruas no. 85), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Padang Luas - Gunung Raja (Ruas No.24), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Gunung Makmur - Kuala Tambangan (Ruas No.15), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Balirejo - Bajuin (Ruas No. 9), Peningkatan Stuktur dan Kapasitas Jalan Sabuhur - Panyipatan (Ruas No. 29) dan kegiatan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi.
- 6) Kegiatan yang mendukung rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Penugasan) yang meliputi Jasa Konsultasi Pengawasan 2 dokumen yaitu Konsultan Pengawas Jalan Karang Rejo Trans 300 (Ruas No.252), Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Jorong-Sei.Pampan (Ruas No.79) dengan pekerjaan Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Karang Rejo Trans 300 (Ruas No.252), Peningkatan Struktur dan Kapasitas Jalan Jorong-Sei.Pampan (Ruas No.79).

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase kenaikan panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang adalah :

- Keterbatasan agregat LPA dan LPB pada stok file quarry, yang berpengaruh pada waktu pelaksanaan pekerjaan, dikarenakan quarry yang ada di Kabupaten Tanah Laut masih belum maksimal produksi dan juga tidak hanya melayani daerah Kabupaten Tanah Laut saja tetapi juga ke daerah lain seperti Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura dan Kalimantan Tengah sebagian.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase kenaikan panjang jalan kabupaten kondisi baik dan sedang adalah :

- Menghimbau kepada penyedia untuk tidak tergantung pada satu quarry untuk pengambilan agregat untuk ketepatan waktu pelaksanaan.

Sasaran 2. Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dengan anggaran sebesar Rp 32.192.612.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 31.147.733.652,- atau 96,75 %. Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :
 - Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.29
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	4,9%	4,9%	100%

Indikator : Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jembatan dan Kegiatan Pembangunan Jembatan, dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- Kegiatan Perencanaan Jembatan terealisasi sebanyak 5 dokumen yang terdiri dari Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Pelaihari, Bajuin dan Batu Ampar Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan

Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Takisung, dan Panyipatan Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Tambang Ulang, dan Bati-Bati Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Kurau, dan Bumi Makmur Tahun 2020, Konsultasi Perencanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Kec. Jorong, dan Kintap Tahun 2020

- 2 Kegiatan yang mendukung Pembangunan Jembatan yaitu Rehab Jembatan Desa Bajuin Kec. Bajuin, Pembangunan Box Culvert Desa Jilatan Alur Kec. Jorong, Pembangunan Box Culvert Desa Handil Maluka Kec. Bumi Makmur, Pembangunan Box Culvert Desa Asri Mulya Kec. Jorong, Pembangunan Box Culvert Desa Kurau Kec. Kurau, Pembangunan Box Culvert Desa Suka Ramah Rt 14 Kec. Panyipatan, Pembangunan Box Culvert Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari, Pembangunan Box Culvert Desa Telaga Langsung Kec. Takisung, Pembangunan Box Culvert Desa Martadah RT. 4 Kec. Tambang Ulang, Pembangunan Box Culvert Transos Sungai Riam Kec. Pelaihari, Pembangunan Jembatan Desa Swarangan, Pembangunan Jembatan Desa Sumber Makmur, Pembangunan Jembatan Desa Sungai Bakau, Pembangunan Box Culvert Desa Kurau Jl. Kencana Kec. Kurau, Pembangunan Box Culvert Jl. Arah Pantai Turki Swarangan Kec. Jorong, Pembangunan Siring Pengaman Jembatan Desa Sabuhur (Pt. Golden), Pembangunan Box Culvert Desa Sumber Makmur Kec. Batu Ampar, Pembangunan Box Culvert Ruas Jalan Sungai Riam - Banua Tengah Kec. Pelaihari, Pelebaran Jembatan Ujung Batu Kec. Pelaihari, Rehabilitasi Box Crossing Desa Sungai Jelai Kec. Tambang Ulang, Pembangunan Jembatan Box Culvert Jl. Pertanian (Jl. JBG) Desa Swarangan Kec. Jorong, Pembangunan Jembatan Box Culvert Desa Bluru RT. 1 Kec. Batu Ampar, Pembangunan Jembatan Box Culvert Desa Bumi Jaya Kec. Pelaihari (Uk. 3 x 6 m).

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase jumlah jembatan kabupaten kondisi baik dan sedang adalah :

- Pendanaan yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan tidak terakomodirnya pembangunan jembatan yang telah direncanakan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase jumlah jembatan kabupaten kondisi baik dan sedang adalah :

1. Rencana pembangunan jembatan agar supaya diusulkan melalui Musdes diteruskan ke Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten dan Pokir Dewan.
2. Mengajukan penambahan anggaran agar pembangunan jembatan yang telah direncanakan terakomodir.

Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.30
IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan		Penanggung Jawab/ Sumber Data
		ESELON 3			
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	$\frac{\text{Jumlah RT yang mendapatkan akses air bersih}}{\text{Total RT Kab. Tanah Laut}}$	X 100%	CKJK
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	$\frac{\text{Jumlah RT yang mendapatkan akses sanitasi}}{\text{Total RT Kab. Tanah Laut}}$	X 100%	CKJK
2	Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah panjang drainase dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang ruas jalan Kab. Tala}}$	X 100%	CKJK
3	Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa Konstruksi yang memiliki sertifikat	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikikasi}}{\text{Total tenaga konstruksi di Kab. Tanah Laut}}$ <p>(persen tenaga konstruksi 2018 = 1,98% jumlah pekerja 2018 = 156.792 orang Sumber BPS Kab Tanah Laut : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kab Tala 2018)</p>	X 100%	CKJK

4	Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas lainnya	Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung dan fasilitas lain yang terpenuhi}}{\text{Total kebutuhan gedung dan fasilitas lainnya}}$	X 100%	CKJK
---	--	--	---	-----------	------

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.31
Target IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	ESELON 3	
Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	1,80%
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	0,30%
Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik	2,88%
Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa Konstruksi yang memiliki sertifikat	8,70%
Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas lainnya	Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.32
Target dan Capaian IKU Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	1,80%	100,9%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	0,30%	100%
2	Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik	2,88%	100,8,7%
3	Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	Persentase tenaga jasa Konstruksi yang memiliki	8,70%	80%

		sertifikat		
4	Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas lainnya	Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi	100%	100%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- b) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- c) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
- d) Program Pengaturan Jasa Konstruksi
- e) Program Keciptakarya

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran 1 : Meningkatkan rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan anggaran sebesar Rp. 26.618.414.590 dan terealisasi sebesar Rp 25,411,088,163 atau 95,29%,

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 2 (dua) Indikator sasaran, yaitu :

- 2) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih.
- 3) Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian	
	ESELON 3				
Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	1	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	1,80%	1,98%	100,9%

	2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	0,30%	0,30%	100%
--	---	---	-------	-------	------

Indikator 1 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan prasarana dan sarana air minum dan tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi pembangunan sumur bor yaitu di RT.12 dan RT.13 Kecamatan Panyipatan, Pembangunan IPA Kap. 30ltr/detik IKK Pelaihari dan sarana penunjang lainnya, Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Padang Luas Kec. Kurau, Pemasangan Jaringan Perpipaan Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, Pemasangan Jaringan Perpipaan Jl. Sabrina dan Jl. Kebun Sayur Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi. Ada 3 kegiatan pembangunan sumur bor yang batal dilaksanakan yaitu pembangunan sumur bor di RT.7, RT.10 dan RT.11 Kecamatan Panyipatan disebabkan karena tidak mendapatkan sumber air di lokasi.
2. Kegiatan yang mendukung penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENUGASAN) meliputi Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Regional Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, dan kegiatan lain terkait dengan tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator dalam persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih antara lain:

1. Luas wilayah pelayanan kabupaten tanah laut yang sangat luas, dimana terdapat 7 IKK wilayah pelayanan dengan masing-masing wilayah yang luas.
2. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat.
3. Kebutuhan anggaran untuk penyediaan prasarana dan sarana air bersih yang besar, mengingat luas wilayah penanganan, serta kemampuan anggaran daerah yang terbatas dengan banyaknya penanganan di berbagai sektor.

4. Prasarana dan sarana air bersih yang tersedia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka hambatan pencapaian target indikator dalam persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih adalah:

1. Menentukan prioritas untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih pada satu wilayah tertentu terlebih dahulu, agar bisa terpenuhi secara bertahap.
2. Berusaha meningkatkan pembangunan pada sektor air bersih untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
3. Membuat rencana jangka menengah dalam penyediaan prasarana dan sarana air bersih, agar bisa menentukan kebutuhan anggaran dalam waktu 5 tahun.
4. Membuat rencana induk sistem penyediaan air bersih, agar dapat diketahui kebutuhan prasarana dan sarana pada tiap-tiap wilayah penanganannya.

Indikator 2 : Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi yang layak.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan perpipaan untuk akses sanitasi atau air limbah masyarakat dan tercapai 100%, dengan kegiatan prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler) yang meliputi Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Bati-Bati, Desa Benua Raya dan Desa Pandahan Kec. Bati-Bati, Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Sungai Rasau dan Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur dan Pembangunan Tangki Septic Skala Komunal (5-10 KK) Desa Ujung Batu Kec. Pelaihari serta kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang layak antara lain:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) bagi kesehatan.

2. Banyaknya rumah-rumah yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.
3. Posisi rumah-rumah masyarakat yang berjauhan, sehingga membutuhkan dana lebih dalam penanganan akses sanitasi.
4. Kemampuan anggaran daerah dalam melakukan penanganan, mengingat banyak sektor yang harus ditangani.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi yang layak adalah:

1. Melakukan kolaborasi sosialisasi bersama dengan Dinas Kesehatan tentang pentingnya perubahan perilaku stop buang air besar sembarangan (BABS) bagi kesehatan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan usulan kegiatan pembangunan sarana sanitasi melalui DAK Sanitasi Kementerian PUPR di lokasi sasaran penanganan.
3. Melakukan inisiasi penanganan melalui anggaran daerah untuk percepatan penanganan sanitasi.
4. Membuat rencana induk penanganan akses sanitasi yang layak, agar dapat diketahui kebutuhan pada tiap-tiap desa sasaran, dan dapat menentukan kebutuhan anggaran dalam penanganan.

Sasaran 2. Meningkatnya wilayah yang terdampak genangan air.

Tahun 2019 ,untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :
Program Saluran Drainase/Gorong-Gorong dengan anggaran sebesar Rp. 8 042 611 776 dan terealisasi sebesar Rp 7,211,388,462 atau 89,66%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu : Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	1 Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik	2,88%	3,13%	108,7

Indikator 1 : Persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan drainase dan tercapai 108,7%, dengan kegiatan, yaitu :

Kegiatan yang mendukung Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong meliputi pembuatan drainase Dusun 1, 2 Desa Bumi Asih Kec. Panyipatan, Pembuatan Drainase Sidomulyo, Sundasa dan Wonosari desa Batu Mulya, Pembuatan Drainase RT 2 dan RT 3 Desa Ketapang Kec. Bajuin, Pembuatan Drainase Dusun 1, 2, 3, Jalan Poros Dusun I s/d IV Kec. Kintap, Pembuatan Drainase Jalan Poros Desa Pantai Linuh, RT 10/12 Desa Damit Hulu, Desa Damit, Desa Gunung Melati , RT 14 Desa Tajau Pecah, Desa Damar Lima, Desa Tajau Mulya, RT 1 s/d 9 Desa Blurub Desa Ambawang, Desa Jilatan Alur dan Desa Durian Bungkok Kec. Batu Ampar, Pembuatan Drainase RT 3,5,10 Desa Sumber Mulia dan Jl. Darma Samping Masjid Syuhada Kec. Pelaihari, serta jalan lingkungan Pasar Pelaihari Pembuatan Drainase Jalan Ilir RT 5/02 Desa Asam-Asam Kec. Jorong

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik antara lain:

1. Diperlukan tingkat konsentrasi koordinasi dengan nomenklatur yang lebih untuk urusan wajib sub bidang Jasa Konstruksi dalam rangka pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
2. Diperlukan Sumber Daya Manusia yang lebih dalam pengelolaan Jasa Konstruksi.

3. Diperlukan Pagu Anggaran yang lebih besar untuk urusan wajib sub bidang Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka persentase wilayah dengan drainase dalam kondisi baik adalah :

1. Memaksimalkan peran pejabat eselon 4 (pengawas) dalam melaksanakan tugas urusan wajib sub bidang Jasa Konstruksi dalam rangka pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
2. Memaksimalkan dan menambah Sumber Daya Manusia yang berperan dalam pengelolaan Jasa Konstruksi. Memaksimalkan dengan menambah beban yang dikerjakan dan menambah pengetahuan SDM melalui pelatihan, bimtek, dan Sosialisasi dalam rangka membuka wawasan Pengelola Jasa Konstruksi.
3. Memaksimalkan Pagu Anggaran yang disediakan untuk urusan wajib sub bidang Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan sinkronisasi program pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin serta Bidang Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran 3. Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi.

Tahun 2019 ,untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

Program Pengaturan Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 349.999.900 dan terealisasi sebesar Rp 161.206.486 atau 46,06%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu : Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.35
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	1 Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat.	8,70%	6,96%	80

Indikator 1 : Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan kinerja personil badan usaha jasa konstruksi (tukang) dan tercapai 80 %, dengan kegiatan, yaitu :

Kegiatan yang mendukung peningkatan pengetahuan dan kinerja personil badan usaha jasa konstruksi (tukang) yaitu dengan melakukan pembelajaran kepada para tukang-tukang bangunan wilayah Kabupaten Tanah Laut meliputi Pelatihan Tenaga Tingkat Terampil 120 peserta, Pelatihan Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) diikuti 31 peserta, yang mana setelah mengikuti pembelajaran tersebut para peserta diberi sertifikat serta Sosialisasi Peraturan Jasa Konstruksi yang diikuti 150 peserta.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat antara lain:

1. Diperlukan tingkat konsentrasi koordinasi dengan nomenklatur yang lebih untuk urusan wajib sub bidang Jasa Konstruksi dalam rangka pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
2. Diperlukan Sumber Daya Manusia yang lebih dalam pengelolaan Jasa Konstruksi.
3. Diperlukan Pagu Anggaran yang lebih besar untuk urusan wajib sub bidang Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka indikator Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat adalah :

1. Memaksimalkan peran pejabat eselon 4 (pengawas) dalam melaksanakan tugas urusan wajib sub bidang Jasa Konstruksi dalam rangka pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan jasa konstruksi kepada penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
2. Memaksimalkan dan menambah Sumber Daya Manusia yang berperan dalam pengelolaan Jasa Konstruksi. Memaksimalkan dengan menambah beban yang dikerjakan dan menambah pengetahuan SDM melalui pelatihan, bimtek, dan Sosialisasi dalam rangka membuka wawasan Pengelola Jasa Konstruksi.
3. Memaksimalkan Pagu Anggaran yang disediakan untuk urusan wajib sub bidang Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten dan sinkronisasi program pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan pada Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin serta Bidang Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dapat dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut.

Sasaran 4 : Meningkatkan pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas umum.

Tahun 2019 ,untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

Program Keciptakarya dengan anggaran sebesar Rp. 14.812.217.990 dan terealisasi sebesar Rp 14.025.724.000 atau 95%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu : Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.35
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 4**

Sasaran Strategis	IndikatorSasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan	1 Persentase bangunan gedung dan	100%	100%	100

gedung dan fasilitas umum		fasilitas lainnya yang dipenuhi			
---------------------------	--	---------------------------------	--	--	--

Indikator 1 : Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan gedung kantor baik sarana dan parasarana perkantoran, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana olag raga dan tercapai 100 % pada tahun berjalan, dengan kegiatan, yaitu :

Kegiatan yang mendukung pembangunan gedung kantor yaitu Pembangunan Gedung Kantor KODIM Kab. Tanah Laut, Penambahan sarana dan prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Tanah Laut, Pembangunan Pagar Depan dan Pintu Gerbang MAN IC Kab. Tanah Laut, Penambahan Ruang Kelas Baru dan Kantor SMP Islam Nurul Hijrah Jorong, Pembangunan Pesantren Tahfizh Darul Qur'an Intoqomah Kec. Pelaihari, Pembangunan Gedung Serba Guna, Pembangunan Ruang Kantor Gedung Sekretariat DPRD Kab. Tanah Laut, Pembangunan Sarana Panjat Tebing Pelaihari, Pembuatan Pagar SMPN 19 Kec. Pelaihari, Pembangunan Pagar SDN Tajau Pecah 2, Pembangunan Pagar SDN Sarikandi Kec. Kurau, Pembangunan Pagar SDN Raden Kec. Kurau, Pembangunan Paving Blok halaman dan parkir sekolah SDN Pasir Putih Kec. Kintap, Pembangunan Paving Blok halaman dan parkir SDN Mekarsari Kec. Kintap, Pembangunan Paving blok halaman dan parkir sekolah SDN Kintap Kecil 2, Pembangunan Paving Blok halaman dan parker SDN Batalang Kec. Jorong, Pembangunan Paving Blok halaman dan parker SMPN 3 Takisung, Pembangunan Paving Blok halaman dan parkir SDN Sungai Pinang Kec. Tambang Ulang, Pembuatan Pondasi halaman sekolah SDN Muara Kintap 2,, pengurukan halaman sekolah SDN Kunyit 2 Kec. Bajuin, pembangunan pagar dan sarana pendukung Kantor Kec. Batu Ampar, pembangunan pagar dan sarana pendukung Kantor Kec. Pelaihari, Rehabilitasi Ruang Kerja Bidang Sumber Daya Air, Rehab Kantor Kecamatan Bati-Bati Kab. Tanah Laut, dan Rehabilitasi Rumah Negara Golongan 1 Reg. 006.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi antara lain :

1. Diperlukan anggaran dalam pembangunan Konstruksi Gedung yang membutuhkan dana besar dalam pemenuhannya.
2. Beberapa regulasi /peraturan yang belum terpenuhi untuk pelaksanaan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi adalah :

1. Memaksimalkan anggaran dalam pembangunan Konstruksi Gedung yang tersedia dengan penyesuaian dan kesesuaian biaya tersedia.
2. Penyusunan Peraturan Bangunan Gedung yang akan diturunkan lagi dalam peraturan pelaksanaan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan.

Bidang Tata Ruang

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.37
IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan		Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	$\frac{\text{Jumlah dokumen penyelenggaraan penataan ruang yang tersusun}}{\text{Total dokumen penyelenggaraan tata ruang yang direncanakan}}$	x 100%	Bidang Tata Ruang

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja

Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Target IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.39
Target dan Capaian IKU Bidang Tata Ruang Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100%	98%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui Program Perencanaan Tata Ruang.

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Perencanaan Tata Ruang, dengan anggaran sebesar Rp 1.738.107.400,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.200.353.697,00 atau 69,06%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase penyelenggaraan penataan ruang.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	%
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100%	98%	100

Indikator : Persentase penyelenggaraan penataan ruang

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang untuk mendukung kesesuaian ruang dengan RTRW tercapai 100%, dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan sosialisasi peraturan Perundang undangan tentang rencana tata ruang. Kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan aparat desa atau kelurahan mengenai peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yaitu peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan dan pola ruang. Sosialisasi ini dilakukan setiap kecamatan di Kabupaten Tanah laut dan mengundang aparat / perangkat desa / kelurahan yang ada di masing masing Kecamatan.
- 2) Kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang. Kegiatan ini untuk menyusun pola ruang yang lebih detail dan terperinci mengenai pemanfaatan ruang disebuah bagian wilayah perencanaan (BWP). Adapun dokumen yang dihasilkan pada kegiatan ini diantaranya Dokumen RDTR dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) Pelaihari yang meliputi dokumen laporan pendahuluan, dokumen laporan fakta analisa, dokumen laporan akhir, zoning regulation dan album peta, dokumen KLHS dan dokumen naskah penelitian. Dokumen untuk proses lagalisasi RDTR dan PZ BWP Bati-Bati yang meliputi dokumen teknis RDTR dan PZ BWP Bati-Bati, rekomendasi gubernur, persetujuan substansi peta dari BIG, persetujuan dari Kemntrian Agraria dan TR, raperda RDTR dan PZ BWP Bati-Bati dan dokumen validasi KLHS

- 3) Kegiatan rapat koordinasi tentang rencana tata ruang. Kegiatan ini dilakukan untuk proses pemanfaatan ruang yang terkendala masalah aturan yang berlaku dengan kegiatan eksisting yang sudah terbangun atau terlaksana dan atau masalah pemanfaatan ruang yang harus diselesaikan dengan masukan antar SKPD dalam forum Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD).

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target persentase penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

1. Sarana prasarana untuk operasional di lapangan yang masih sangat kurang dan terbatas, sehingga pekerjaan yang dilakukan di lapangan menjadi tidak maksimal.
2. Sumber daya manusia yang masih terbatas baik dalam kualitas maupun kuantitas, terutama terkait dengan pekerjaan yang secara teknis, memerlukan SDM yang mempunyai latar belakang ilmu yang sesuai sehingga mampu melakukan analisa pekerjaan dengan tepat dan akurat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target persentase penyelenggaraan penataan ruang adalah :

1. Harus melakukan penambahan sarana dan prasarana penunjang operasional di lapangan baik yang bersifat teknis maupun non teknis, yaitu dengan dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2020, yang diharapkan mampu mendukung pekerjaan di lapangan.
2. Mengusulkan kembali penambahan sumber daya manusia yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada Bidang Tata Ruang, sehingga analisa pekerjaan yang dilakukan lebih berkualitas.

Bidang Pertanahan

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.41
IKU Bidang Pertanahan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan		Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	$\frac{\text{Jumlah IPPT dan Redistribusi (TOL) yang diterbitkan}}{\text{Total permohonan IPPT dan Redistribusi (TOL) yang masuk}}$	x 100	Bidang Pertanahan
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	$\frac{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah yang difasilitasi}}{\text{Total konflik/sengketa tanah yang disampaikan}}$	x 100	Bidang Pertanahan
3	Meningkatnya inventarisasi asset pemerintah daerah dan fasilitas umum	Persentase data aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah asset Pemda yang diberi titik koordinat}}{\text{Total asset Pemda yang terdata}}$	x 100	Bidang Pertanahan
4	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah asset Pemda yang mempunyai toponimi/rupe bumi}}{\text{Total asset Pemda yang terdata}}$	x 100	Bidang Pertanahan

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.42
Target IKU Bidang Pertanahan Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	1	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	1	Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Peratanah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.43
Target dan Capaian IKU Bidang Pertanahan Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	1	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	100%	33,33%
3	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	1	Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	100%	100%

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
- b) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
- c) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, dengan anggaran sebesar Rp. 68.140.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.410.000,- atau 37,29%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

1) Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan Untuk Penataan Penguasaan Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.44
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	1	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%	220%	220

Indikator 1 : Persentase dokumen administrasi pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pertanahan untuk penataan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah meliputi pelayanan administrasi pertanahan, permohonan yang disampaikan oleh BPN Kab. Tanah Laut terkait dengan redistribusi Tanah Obyek Landrefrom (TOL), pembuatan surat izin perubahan penggunaan tanah (IPPT)

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase dokumen administrasi pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah antara lain :

1. Kurang tepatnya permohonan data IPPT yang disampaikan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Dalam melakukan peninjauan ke lapangan alat transportasi yang digunakan sangat terbatas.
3. Minimnya ASN yang dimiliki sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa maksimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase dokumen administrasi pertanahan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Bidang Tata Ruang terkait data dari BPN yang berhubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Memaksimalkan sarana transportasi yang ada dan meminjam sarana transportasi dari bidang lain.
3. Memaksimalkan ASN yang ada dibantu dengan tenaga pegawai tidak tetap yang ada untuk membantu setiap pelaksanaan pelaksanaan kegiatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan, dengan anggaran sebesar Rp. 48.296.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.958.000,- atau 30,97%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.45
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di Kabupaten Tanah Laut	1	Persentase penyelesaian masalah pertanahan	100%	0	0%

Indikator 1 : Persentase penyelesaian masalah pertanahan

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan yang meliputi memfasilitasi mereka yang berkonflik, baik antar kelompok masyarakat, msyarakat dengan swasta maupun masyarakat dengan pemerintah daerah. Terkait

dengan konflik ini hanya satu yang dapat difasilitasi oleh Bidang Pertanahan, fasilitasi ini belum sampai pada tahap keputusan ahir, sehingga belum dapat dikatakan selesai. Karena untuk memfasilitasi penyelesaian konflik harus dilakukan beberapa tahapan. Selain musyawarah antara yang berkonflik, juga dilakukan pengukuran dilapangan terkait tanah/lahan yang disengketakan dan juga pemeriksaan terkait dokumen tanah/lahan yang disengketakan tersebut.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase penyelesaian masalah pertanahan antara lain :

1. Keterbatasan data dukung terkait tanah atau lahan yang bersengketa seperti tidak adanya patok tanda batas tanah, luas tanah yang bersengketa, kesesuaian lahan sengketa dengan Tata Ruang untuk fungsi kegunaannya.
2. Tidak adanya titik temu atau kesepakatan antara mereka yang berkonflik.
3. Minimnya ASN yang dimiliki sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa maksimal.
4. Lokasi dilapangan yang bersengketa sulit dilalui dengan jalan kaki maupun menggunakan alat transportasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase penyelesaian masalah pertanahan adalah :

1. Mengambil data dukung kelapangan dengan melakukan pengukuran melalui GPS Garmin Montana 680 atau menggunakan Drone pinjaman dari bidang lain atau informasi dari kedua belah pihak yang bersengketa
2. Melakukan rapat mediasi dengan Tim Penyelesaian konflik/sengketa Kabupaten Tanah laut atau dengan Masyarakat / Perusahaan yang bersengketa dan memfasilitasi Kegiatan Penyelesaian Konflik/Sengketa Tanah.
3. Memaksimalkan penggunaan sarana transportasi yang tersedia. Seringkali meminjam sarana transportasi kepunyaan bidang lain.
4. Memaksimalkan ASN yang ada dibantu dengan tenaga pegawai tidak tetap yang ada untuk membantu setiap pelaksanaan pelaksanaan kegiatan.

Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi pemda dan fasilitas umum.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Program Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan anggaran sebesar Rp. 46.625.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.360.000,- atau 52,25%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.46
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 3**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	3	Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	100%	100%	100%

Indikator 1 : Persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan PenamaanRupabumi/Toponimi Tanah Pemerintah dan FasilitasUmum meliputi pemberian nama pada asset – asset pemerintah daerah maupun failitas umum baik itu suatu wilayah, daerah, tempat atau bangunan, baik itu aset pemerintah maupun fasilitas umum. Melakukan pengambilan titik koordinat penamaan rupabumi/toponimi, tanah pemerintah maupun fasilitas umum. Yang mana penamaan rupabumi/toponimi tersebut dibuat dalam suatu dokumen.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum antara lain :

1. Terbatasnya fasilitas transportasi terutama untuk mendukung kegiatan pengambilan titik koordinat Toponimi di lapangan.
2. Terbatasnya fasilitas elektronik (leptop/pc) dimana spek yang ada sangat rendah sehingga mempengaruhi dalam proses penginputan data dari lapangan.
3. Minimnya ASN yang dimiliki sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak bisa maksimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum adalah :

1. Memaksimalkan fasilitas transportasi yang ada atau dengan meminjam alat transportasi dari bidang lain untuk menuju ke lokasi pengambilan titik koordinat.
2. Meminjam fasilitas elektronik leptop/pc rekan kerja guna mengoverly peta dari data dilapangan.
3. Memaksimalkan ASN yang ada dibantu dengan tenaga pegawai tidak tetap yang ada untuk membantu setiap pelaksanaan pelaksanaan kegiatan.

Bidang Sumber Daya Air

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.47
IKU Bidang Sumber Daya Air

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan		Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	$\frac{\text{Jumlah luas baku sawah yang terlayani irigasi}}{\text{Total luas seluruh sawah di Kab. Tala}}$	x 100	Bidang SDA
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	Persentase ketersediaan air baku	$\frac{\text{Jumlah air baku yang tersedia}}{\text{Total seluruh sungai di Kab. Tala}}$	x 100	Bidang SDA

		Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah panjang sungai dalam kondisi baik}}{\text{Total panjang sungai di Kab. Tala}}$	x 100	Bidang SDA
		Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	$\frac{\text{Jumlah irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Total irigasi di Kab. Tala}}$	x 100	Bidang SDA
		Persentase areal terlindungi daya rusak air	$\frac{\text{Jumlah areal yang terlindungi}}{\text{Total areal di Kab. Tala}}$	x 100	Bidang SDA

1) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.48
Target IKU Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	99,8%
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	1	Persentase ketersediaan air baku	19%
		2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%
		3	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	84%
		4	Persentase areal terlindungi daya rusak air	94,2%

4) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU Bidang Peratanah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.49
Target dan Capaian IKU Bidang Sumber Daya Air Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung	1	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	99,8%	100

	pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air				
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	1	Persentase ketersediaan air baku	19%	100
		2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	100,5
		3	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	84%	100

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
- b) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- c) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatkan infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong, dengan anggaran Rp. 6.330.109.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.675.124.300,- atau 42,26%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 2) Persentase Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.50
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk	1	Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi	99,8 %	99,8%	100

	mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air					
--	---	--	--	--	--	--

Indikator 1 : Persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan pintu air, bangunan penunjang lainnya, serta perencanaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan konstruksi jembatan pertanian Desa Kurau Utara Kec. Bumi Makmur, jembatan pertanian Desa Tungkaran Kec. Pelaihari dan jembatan pertanian Desa Kurau Kec. Kurau, pembangunan konstruksi Pembuatan pintu air Desa Birayang Bawah Kec. Bumi Makmur, Pembuatan pintu air Desa Bati-Bati dan Desa Nusa Indah Kec. Bati-Bati, Pembuatan pintu air/cangdam desa Tungkaran, Desa Atu-Atu dan Pembuatan pintu air beramban Kec. Pelaihari, Pembuatan pintu air Desa Sarikandi dan Desa Padang Luas Kec. Kurau. Perencanaan Pembuatan Embung, Talud, Siring, Pintu Air, Normalisasi Saluran, Survey Inventarisasi Sungai wilayah Kab. Tanah Laut. Dan Pembangunan Konstruksi Pembuatan Embung Dusun Wonosari desa Batu Mulya Kec. Panyipatan, Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Desa Kintap Kecil Kec. Kintap, Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur dan desa Padang Kec. Bati-Bati.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi antara lain :

1. Masalah Lahan yang belum sepenuhnya bebas dan disepakati bersama pada saat pelaksanaan.
2. Akses mobilisasi peralatan dan material menuju lokasi yang terhambat lahan.
3. Pelaksanaan pada musim hujan yang menghambat pekerjaan.
4. Ketersediaan material kayu yang semakin jarang didapatkan.
5. Kualitas dan kuantitas pekerja lapangan dari penyedia serta jasa penyedia

perencana yang tidak memadai.

6. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat untuk memelihara jaringan irigasi secara mandiri.
7. Kurangnya sumber daya manusia dan penganggaran pemerintah untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
8. Berubahnya tata fungsi lahan mengakibatkan debit air yang semakin menurun di jaringan irigasi pada musim kemarau.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase luas baku sawah yang terlayani irigasi adalah :

1. Memastikan mendapatkan perjanjian hibah tanah dari warga sesuai keperluan pekerjaan.
2. Memaksimalkan peran serta masyarakat dan aparat desa dalam bermusyawarah.
3. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal.
4. Membuat rencana konstruksi dengan material lokal yang lebih mudah didapat.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada pelaksana/rekanan dan menjalankan mekanisme yang diperlukan untuk pemberian teguran serta memaksimalkan mekanisme pemilihan penyedia dan kegiatan monev agar sesuai dengan kriteria perencanaan.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat baik melalui penyuluhan ataupun pendekatan persuasip ke aparat terkait dan kelompok tani.
7. Peningkatan penganggaran dan kompetensi sumber daya manusia bidang sumber daya air.

8. Menata daerah hulu baik dari kordinasi vertikal maupun sektoral.

Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas saluran sungai

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan anggaran Rp. 17.234.577.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.900.191.150,- atau 81%.
- b) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 1.525.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 907.991.400,- atau 52,54%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 4 (empat) Indikator sasaran, yaitu :

- 2) Persentase Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.51
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2**

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	1	Persentase ketersediaan air baku	19%	19%	100
		2	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%	89,44%	100,5
		3	Persentase irigasi kabupaten berfungsi baik	84%	84%	100
		4	Persentase areal terlindungi daya rusak air	94,2%	93,52	93.52

Indikator 1 : Persentase ketersediaan air baku

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan pembuatan embung sebagai penampung air untuk pertanian dan perkebunan dan tercapai 100%, meliputi Pembuatan Embung Dusun Wonosari Desa Batu Mulya Kec. Panyipatan, Pembuatan Embung Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Pembuatan Embung Desa Kintap Kecil Kec. Kintap, Pembuatan Embung Desa Benua Raya dan

Desa Padang Kec. Bati-Bati dan Pembuatan Embung Desa Labuan Amas Kec. Bumi Makmur, dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase ketersediaan air baku antara lain:

- Ketersediaan lahan yang sering terhambat karena kesepakatan tanah yang tidak tercapai antara warga dan kebutuhan luasan konstruksi embung.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase ketersediaan air baku adalah :

- Memastikan adanya hibah tanah dari sesuai kebutuhan konstruksi embung sesuai perencanaan

Indikator 2 : Persentase panjang sungai dalam kondisi baik

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan saluran sungai dan tercapai 100,5% dengan kegiatan pelaksanaan normalisasi saluran sungai yaitu melakukan normalisasi Sungai Desa Kuala Tambangan Kec. Takisung seluas 1.000 meter dan kegiatan lain terkait tugas dan fungsi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase panjang sungai dalam kondisi baik antara lain:

1. Banyak nya bangunan warga seperti dermaga kapal dan lalu lintas kapal yang menyulitkan alat bermanuver disungai.
2. Untuk pekerjaan normalisasi sangat terkait dengan hibah tanah yang berdampak normalisasi.
3. Kondisi pasang surut dimuara sungai membuat waktu kerja alat berat terbatas.
4. Material sungai berlumpur yang menyulitkan pembentukan tanggul hasil buangan galian sungai secara rapi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka

pencapaian target indikator persentase panjang sungai dalam kondisi baik adalah :

1. Bekerja sama dengan warga untuk menentukan jam lalu lintas kapal dan operasi alat serta menerapkan kehati-hatian terhadap penggalian yang terlalu dekat fasilitas warga.
2. Kerjasama dengan masyarakat dan aparat desa terkait ketersediaan lahan untuk timbunan dan galian.
3. Membuat schedule penggalian secara maksimal menyesuaikan dengan pasang surut.
4. Membuat metode kerja alat berat yang efektif dan maksimal untuk galian dan buangan tanah.

Indikator 3 : Persentase rigasi kabupaten berfungsi baik

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pemeliharaan jaringan irigasi dan pengadaan sarana mendukung kegiatan pertanian dan tercapai 84% meliputi pembangunan konstruksi Rehab Embung Desa Asam Jaya Kec. Jorong, Pengerukan Bendungan RT 01 dan RW 01 Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati, Rehab Tanggul Desa Benua Raya Kec. Bati-Bati, Rehab Gorong-Gorong Beton Desa Muara Asam-Asam Kec. Jorong, Rehab Tanggul Pertanian Penahan Air Asin Desa Pantai Harapan Kec. Bumi Makmur, Rehab Jembatan Penyeberangan Petani Desa Batu Tungku Kec. Panyipatan, Rehab Pintu Air Pumpung Desa Kunyit Kec. Bajuin, Peningkatan Jembatan Penyeberangan Desa Kait-Kait Kec. Bati-Bati dan Peningkatan Jembatan Penyeberangan Pertanian Desa Kintap Kecil Kec. Kintap dan kegiatan lain terkait tugas dan

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase rigasi kabupaten berfungsi baik antara lain:

1. Terjadinya ketidaksesuaian/kesepakatan yang berubah-ubah mengenai luasan tanah yang bebas antara warga dan pelaksana semenjak dari perencanaan dan pelaksanaan.
2. Akses melangsir material menuju lokasi sering terhambat karena ketidak

sepakatan dengan warga mengenai izin lewat ataupun permintaan imbalan diluar kontrak.

3. Pelaksanaan yang masih dimusim hujan sangat menghambat proses pengecoran beton maupun melangsir material.
4. Banyaknya kerusakan jaringan irigasi karena kurangnya pemeliharaan pada jaringan irigasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase rigasi kabupaten berfungsi baik adalah :

1. Memastikan perjanjian hibah tanah dari warga sesuai keperluan.
2. Memaksimalkan peran aparat desa dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan.
3. Membuat metode kerja yang efektif dan maksimal serta menerapkan pengawasan ketat kepada pelaksana pekerjaan agar bekerja secara efektif dan maksimal.
4. Meningkatkan peran serta kelompok tani sehingga pemeliharaan bangunan irigasi dapat dimaksimalkan antar kelompok.

Indikator 4 : Persentase areal terlindungi daya rusak air

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan yang berhubungan pembangunan talud irigasi, pembangunan siring sungai, pembuatan bangunan pemecah ombak. Dimana kegiatan tersebut meliputi pembangunan konstruksi Talud Irigasi Desa Asam Jaya Kec. Jorong, Desa Bentok Kampung Kec. Bati-Bati, Desa Kampung Baru dan desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari. Konstruksi pembangunan siring sungai Kel. Angsau. Kec. Pelaihari, Desa Tambak Karya Kec. Kurau, Desa Handil Gayam Kec. Bumi Makmur, Desa Kintapura Kec. Kintap, Siring Bangunan Desa Sumber Mulia Kec. Pelaihari, Siring Embung Desa Sebamban Baru Kec. Kintap, Siring Sungai Intake PDAM IKK Jorong, Siring Penahan Abrasi Desa Swarangan Kec. Jorong dan Pembuatan Bangunan Pemecah Ombak Desa Mara Kintap Kec. Kintap.

Beberapa hal yang menjadi hambatan pencapaian target indikator persentase areal terlindungi daya rusak air antara lain:

1. Kondisi air sungai yang tinggi menyebabkan pekerjaan siring dan talud menjadi terhambat .
2. Pasang surut air laut yang membuat pelaksanaan pekerjaan tidak bisa dikerjakan dengan waktu tertentu.
3. Cuaca dan iklim ekstrim tidak menentu mengakibatkan proses abrasi dan longsor mengalami peningkatan.
4. Pemukiman yang merambah sempadan sungai dan pantai.
5. Rusaknya bagian hulu DAS mengakibatkan percepatan aliran air yang meninggikan tingkat daya rusak.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase areal terlindungi daya rusak air adalah :

1. Memaksimalkan sumber daya pekerja dan metode kerja dewatering yang efektif agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Memaksimalkan jadwal pasang surut dengan jadwal pekerjaan bangunan pantai.
3. Memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi bencana.
4. Perlunya aturan penerapan batas sempadan sungai dan pantai yang sesuai karakteristik daerah.
5. Perlunya kerjasama lintas sektoral menangani kerusakan DAS.

UPT Peralatan

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.52
IKU UPT Peralatan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya retribusi sewa Alat Berat	Persentase peningkatan retribusi daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi pendapatan sewa alat}}{\text{Total target pendapatan}} \times 100 \%$	UPT Peralatan
2.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Alat Berat	Persentase alat berat yang dipenuhi	$\frac{\text{Jumlah alat berat yang terpenuhi}}{\text{Total alat berat yang diperlukan}} \times 100 \%$	UPT Peralatan

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama UPT Peralatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.53
Target IKU UPT Peralatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya retribusi sewa Alat Berat	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%
2.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Alat Berat	Persentase alat berat yang dipenuhi	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU UPT Peralatan DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.54
Target dan Capaian IKU UPT Peralatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya retribusi sewa Alat Berat	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%	158%

2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Alat Berat	Persentase alat berat yang dipenuhi	100%	75%
---	--	-------------------------------------	------	-----

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah didukung melalui:

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT. Peralatan

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1: Meningkatkan retribusi sewa alat berat

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Peralatan, dengan anggaran sebesar Rp 402.374.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 229.778.294,- atau 57,11 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase peningkatan retribusi daerah

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.55
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya retribusi sewa Alat Berat	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%	158%	158

Indikator 1 : Persentase peningkatan retribusi daerah

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan pemeliharaan alat – alat berat yang ada di UPT Peralatan dan tercapai 173%, dengan kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional, di UPT peralatan ada beberapa alat berat yang dapat disewa baik oleh masyarakat maupun swasta diantara 1 buah motor grader 230, 1 buah motor grader 330, 1 buah tineroller, 1 buah vibrating roller 10 ton, 2

buah tandem roller 4,5 ton, 1 buah pendistribian roller, 1 buah rammer dan 1 buah plate compactor. Besarnya biaya sewa diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat Tandem Roller, Rammer dan Plate Compactor. Alat – alat berat tersebut selalu dilakukan pemeliharaan secara rutin dan sebelum disewa atau dipakai selalu dilakukan pengecekan terlebih dahulu sehingga dapat digunakan oleh masyarakat atau swasta. Walaupun dengan keterbatasan alat-alat berat yang ada di UPT Peralatan mampu menaikkan pendapatan sewa dari yang ditargetkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 111.750.000,- dan mampu terealisasi sebesar Rp. 193.350.000 atau ditargetkan Rp.111.750.000,- atau 173%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase peningkatan retribusi daerah antara lain :

1. Peralatan yang sangat tidak memadai, karena usia alat berat yang sudah tua dan sangat lama.
2. Seringkali alat berat yang ada mengalami kerusakan sehingga tidak mampu melayani kebutuhan penyewa alat berat.
3. Suku cadang alat berat yang ada usianya sudah sangat tua, sehingga pekerjaan yang dilakukan alat berat tidak maksimal.
4. Terbatasnya alat berat yang dimiliki sehingga tidak dapat memenuhi keinginan penyewa alat berat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase peningkatan retribusi daerah adalah :

1. Memaksimalkan penggunaan alat berat sehingga dapat memenuhi keinginan penyewa alat berat.
2. Melakukan pemeliharaan peralatan secara rutin agar alat berat dapat berfungsi dengan baik dan pelayanan dapat berjalan seoptimal mungkin.
3. Menganggarkan penambahan alat berat dan suku cadang baru di tahun

anggaran berikutnya.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat berat

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Peralatan, dengan anggaran sebesar Rp 402.374.650,- dan terrealisasi sebesar Rp. 229.778.294,- atau 57,11 %.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase alat berat yang dipenuhi

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.56
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana alat berat	Persentase alat berat yang dipenuhi	100%	75%	75

Indikator 1 : Persentase alat berat yang dipenuhi

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan Kegiatan pemeliharaan alat – alat berat yang ada di UPT Peralatan dan tercapai 75%, dengan kegiatan, yaitu pada kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional. Di UPT peralatan sebenarnya masih diperlukan untuk menambah alat-alat berat yang baru karena sebagian beberapa alat berat yang kondisinya tidak bisa digunakan lagi atau tidak terpakai disebabkan rusak berat. Namun karena keterbatasan anggaran belum mampu untuk membeli alat-alat berat yang baru, sehingga belum mampu memenuhi UPT Peralatan dengan alat berat yang lebih canggih untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui pendapatan sewa alat berat. Dari yang ditargetkan 100% pada tahun 2019 hanya mampu terpenuhi 75% atau dengan capaian 75% saja.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase

alat berat yang dipenuhi antara lain :

1. Karena peralatan sudah tidak bisa di perbaiki lagi dan suku cadang alat tersebut sudah jarang tersedia lagi dipasaran dikarenakan alat berat tersebut umurnya sudah tua.
2. Peralatan di UPT peralatan kebanyakan sudah keluaran lama, jadi sangat sulit kalau hanya mengandalkan servise dan pemeliharaan, perlunya perbaikan atau pergantian suku cadang.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka pencapaian target indikator persentase alat berat yang dipenuhi adalah :

1. Mengoptimalkan biaya servise untuk peralatan yang ada.
2. Memelihara dan merawat alat berat yang ada, sesuai kemampuan alat berat yang ada di UPT Peralatan.

UPT Laboratorium

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.57
IKU UPT LABORATORIUM

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab/ Sumber Data
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Persentase peningkatan retribusi daerah	$\frac{\text{Jumlah realisasi pendapatan sewa alat uji material konstruksi}}{\text{Total target pendapatan}} \times 100 \%$	UPT Laboratorium
2.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	$\frac{\text{Jumlah alat uji material konstruksi yang terpenuhi}}{\text{Total alat uji material konstruksi yang diperlukan}} \times 100 \%$	UPT Peralatan

2) Target Indikator Kinerja Utama

Sebagaimana yang telah dibuat perjanjian kinerja, maka target Indikator Kinerja Utama UPT Laboratorium adalah sebagai berikut :

Tabel 3.58
Target IKU UPT Laboratorium Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%
2.	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	100%

3) Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, maka capaian IKU UPT Laboratorium DPUPRP Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah sebagai berikut 9

Tabel 3.59
Target dan Capaian IKU UPT Laboratorium Tahun 2019

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	100%	61%
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	100%	0%

Uraian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran 1 : Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Pengembangan Teknologi Konstruksi, dengan anggaran sebesar Rp 99.941.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.930.250,- atau 57,97%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- a) Persentase peningkatan retribusi daerah

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.60
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 1

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Capaian	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	Persentase peningkatan retribusi daerah	100%	61%	61

Indikator 1 : Persentase peningkatan retribusi daerah

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengoptimalisasian laboratorium pengujian dan tercapai 61%, dengan kegiatan optimalisasi laboratorium pengujian. Untuk peningkatan pendapatan retribusi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UPT Laboratorium. terutama pada sumber daya manusia yang tersedia saat ini tidak ada yang mempunyai keahlian khusus (bersertifikat) yang mampu menggunakan semua peralatan yang tersedia, sehingga tidak bisa melaksanakan seluruh pengujian yang seharusnya bisa dilakukan dan memunculkan kekuatiran hasil pengujian juga kurang akurat, hal ini juga berdampak kedepannya tidak bisa memenuhi syarat akreditasi dari KAN (Komite Akreditasi Nasional), permasalahan lainnya tarif retribusi yang masih murah dan peralatan yang tersedia masih manual. Tarif retribusi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Penguji Material Milik Dinas Pekerjaan Umum. Maka pada tahun 2020 dilakukan perubahan atas peraturan tersebut, yang diharapkan mampu menaikkan pendapatan atas sewa alat uji material konstruksi. Atas kondisi sebagaimana diatas maka peningkatan pendapatan pada sewa alat uji material konstruksi tahun 2019 tidak bisa memenuhi target, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 88.000.000,- hanya mampu terealisasi sebesar Rp. 54.274.000,- atau 61%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan peningkatan retribusi daerah pada UPT Laboratorium antara lain :

1. Sumber daya manusia (Personil laboratorium) yang tersedia sangat terbatas

dan belum ada yang menguasai teknik material konstruksi secara penuh.

2. Biaya retribusi yang masih murah, karena masih mengacu pada Peraturan Bupati yang di keluarkan Tahun 2016 walaupun di rubah kembali Tahun 2019, tapi biaya retribusi masih murah dibandingkan dengan harga retribusi yang dikeluarkan laboratorium lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Peralatan yang digunakan masih model lama, walaupun ada sebagian yang sudah baru.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka peningkatan retribusi daerah adalah :

1. Mengusulkan penambahan personil laboratorium yang sesuai dengan keilmuannya dan juga mengusulkan anggaran biaya untuk Bimtek / Pelatihan sekaligus sertifikasinya.
2. Mengusulkan untuk merubah kembali Peraturan Bupati tentang biaya retribusi laboratorium pada Tahun 2020
3. Mengusulkan anggaran untuk penambahan alat laboratorium, untuk membantu pekerjaan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Sasaran 2 : Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui :

- a) Program Pengembangan Teknologi Konstruksi, dengan anggaran sebesar Rp 99.941.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 55.930.250,- atau 57,97%.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 (satu) Indikator sasaran, yaitu :

- 1) Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi

Uraian selengkapnya per indikator tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.61
Target, Realisasi dan Capaian per Indikator Sasaran 2

SasaranStrategis	IndikatorSasaran	Target	Capaian	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	5%	0	0

Indikator 1 : Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan kegiatan optimalisasi laboratorium pengujian, Pada kegiatan ini UPT Laboratorium sudah menganggarkan untuk pembelian alat-alat laboratorium untuk melakukan pengujian material konstruksi. Alat – alat tersebut untuk melengkapi alat – alat laboratorium yang sudah ada. Sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui alat sewa uji material konstruksi. Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan harga alat-alat laboratorium tersebut, harganya sangat tinggi sehingga dana yang sudah dianggarkan tidak mencukupi. Oleh sebab itu tahun 2019 tidak ada dilakukan pembelian terhadap alat-alat laboratorium yang baru.. Atas permasalahan tersebut diatas UPT Laboratorium tidak mampu memenuhi sarana alat uji material konstruksi dari yang ditargetkan sebesar 100 % tidak dapat terealisasi.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian target indikator persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi adalah :

- Terjadi fluaktasi harga barang dari yang sudah dianggarkan, dimana dalam anggaran yang tersedia hanya bisa membeli barang langsung di tempat (Kota Bandung), sementara biaya pengiriman langsung ke Kabupaten Tanah Laut tidak tersedia, dan barang tersebut juga tidak tersedia secara lokal (Kalimantan Selatan)

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala dalam rangka persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi adalah :

- Mengusulkan kembali anggaran untuk pembelian alat uji material pada Tahun Anggaran 2020 yang diharapkan mampu mendukung kinerja pada UPT

Laboratorium dan mampu menaikkan pendapatan daerah.

F. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2019

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2019 dapat menyerap dana APBD dan Dana dari pusat (DAK) sebesar Rp 174.659.652.098 atau sebesar 92,78% dari pagu dana Rp 192,604,956,206 dengan capaian kinerja fisik sebesar 95,29%. Pada tahun 2019 terlihat bahwa telah terjadi efisiensi penggunaan anggaran dimana hamper semua kinerja utama telah tercapai dari target yang telah ditentukan dengan hanya menggunakan anggaran sebesar 92,78% dari anggaran yang tersedia.

2. Anggaran dan Realisasi menurut sasaran dan program

Tabel 3.62

Rincian Anggaran berdasarkan Program dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Presentase
			Rp	Rp	%
1	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6,076,906,560	4,921,761,525	80,99
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	641,887,600	604,038,000	94,10
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000	22,500,000	50
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	27,549,000	5,889,600	21,39
		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2,520,000	2,520,000	100
2	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9,999,750	6,904,200	69,04
3	Pelayanan Administrasi keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30,203,500	28,690,000	94,99
4	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	32,192,612,086	31,147,733,652	96,75
5	Meningkatnya jembatan kondisi mantap Kabupaten	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	75,935,026,204	72,775,505,619	95,84

6	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	8,042,611,776	7,211,388,462	89,66
7	Meningkatnya jembatan kondisi mantap Kabupaten	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	26,668,413,590	25,411,088,163	95,29
		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	99,999,750	24,216,700	24,22
		Program Keciptakarya	14,812,217,990	14,025,724,000	94,69
		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	349,999,900	161,206,486	46,06
8	Meningkatkan dan mengoptimalkan infrastruktur jaringan irigasi	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong	6,330,109,650	5,851,900,200	92,46
9	Meningkatkan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	17,234,577,500	13,900,191,150	80,65
10	Meningkatkan dan melakukan pemeliharaan saluran sungai	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kersvasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	1,525,000,000	907,991,400	59,54
11	Meningkatkan upaya pengendalian daya rusak air				
12	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Program Perencanaan Tata Ruang	1,738,117,400	1,200,353,697	69,06
13	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Negara oleh Masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	68,140,000	25,410,000	37,29
		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	46,625,000	24,360,000	52,25
14	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di kabupaten tanah laut	Program Penataan Tata Guna Tanah	53,710,000	13,575,000	25,27
		Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	48,296,000	14,958,000	30,97
15	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Laboratorium (UPT Laboratorium)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,054,600	80,779,700	85,89
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29,062,500	5,250,000	18,06
		Program Pengembangan Teknologi Konstruksi	99,941,200	55,938,250	55,97
17	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT Peralatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	402,374,650	229,778,294	57,11

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan 2019

Tabel 3.63

Analisis perbandingan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 dan 2019

No	2018		No	2019	
	Nama Program	Nama Kegiatan		Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa administrasi keuangan			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Penyediaan Alat Tulis Kantor
		Penyediaan Alat Tulis Kantor			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Penyediaan Makanan dan Minuman
		Penyediaan Makanan dan Minuman			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan pembangunan jalan	6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD
		Pembangunan jalan	7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
		Perencanaan pembangunan jembatan	8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan pembangunan jalan
		Pembangunan jembatan			Pembangunan jalan
7	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Perencanaan pembangunan jembatan
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan			Pembangunan jembatan
		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)	9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan
8	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
		Perencanaan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK)
9	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Penugasan)
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	10	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK)			Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK)			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK Reguler)
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK PENUGASAN)
12	Program Keciaptakaryaan	Pembangunan Gedung Kantor			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Reguler)
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pendamping PNPM Mandiri Perkotaan (P2KP)
13	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	13	Program Keciaptakaryaan	Pembangunan Gedung Kantor
14	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
15	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	14	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi

	Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya				
		Pembangunan Pintu Air	15	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
		Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
		Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun			Pembangunan Pintu Air
		Pemberdayaan Petani Pemakai Air			Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
16	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			Pemberdayaan Petani Pemakai Air
17	Program Perencanaan Tata Ruang	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang			Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
18	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	17	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	18	Program Perencanaan Tata Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang Rencana Tata Ruang
20	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Toponomi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintah			Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
	TOTAL		19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
	21	50	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Toponomi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintah
	TOTAL ANGGARAN		21	Program Penataan Tata Guna Tanah	Inventarisasi Tanah Pemerintah Daerah dan Fasilitas Umum
	194.690.926.613		22	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
			23	Program Pengembangan Teknologi Konstruksi	Identifikasi dan informasi teknik konstruksi
					Optimalisasi laboratorium pengujian
	TOTAL				
	23	55			
	TOTAL ANGGARAN				
	192.604.956.206				

Tabel 3.64
Perbandingan Program dan Kegiatan APBD Tahun 2018 dan 2019

No	2018		No	2019	
	Nama Program	Nama Kegiatan		Nama Program	Nama Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantondoran	14 Kegiatan	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantondoran	14 Kegiatan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Kegiatan	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2 Kegiatan
3	Program peningkatan disiplin aparatur	2 Kegiatan	3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Kegiatan
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan	4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	1 Kegiatan
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan	5	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1 Kegiatan
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4 Kegiatan	6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Kegiatan
7	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	3 Kegiatan	7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1 Kegiatan
8	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	2 Kegiatan	8	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	4 Kegiatan
9	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Kegiatan	9	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	4 Kegiatan
10	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4 Kegiatan	10	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1 Kegiatan
11	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Kegiatan	11	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	5 Kegiatan
12	Program Keciptakarya	2 Kegiatan	12	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1 Kegiatan
13	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1 Kegiatan	13	Program Keciptakarya	2 Kegiatan
14	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong	1 Kegiatan	14	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	1 Kegiatan
15	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6 Kegiatan	15	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Brojong	1 Kegiatan
16	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	1 Kegiatan	16	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	6 Kegiatan
17	Program Perencanaan Tata Ruang	1 Kegiatan	17	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	1 Kegiatan
18	Program pengendalian pemanfaatan ruang	1 Kegiatan	18	Program Perencanaan Tata Ruang	3 Kegiatan
19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Kegiatan	19	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	1 Kegiatan
20	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	1 Kegiatan	20	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1 Kegiatan
21	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	1 Kegiatan	21	Program Penataan Tata Guna Tanah	1 Kegiatan
			22	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	1 Kegiatan
			23	Program pengembangan teknologi konstruksi	2 Kegiatan
	TOTAL			TOTAL	
	21	50		23	55

Tabel 3.65
Perbandingan APBD Tahun 2018 dan 2019

No	2018		2019	
	1.	Belanja langsung	194.690.926.613,00	Belanja langsung
2.	Belanja tidak langsung	8.542.955.000,00	Belanja tidak langsung	12.166.362.171,00
	Total	203.138.301.643,00	Total	204.761.318.377,00

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa adanya penurunan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, namun mampu melaksanakan sebanyak 23 program dan 55 kegiatan pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan pada belanja tidak langsung dibandingkan pada tahun 2018, dimana pada tahun 2018 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.8.542.955.000 menjadi Rp. 12.166.362.171 pada tahun 2019. Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan TPP pada tahun 2019 dan kenaikan gaji sebesar 5%. Selain itu Honorarium pejabat pengadaan, pejabat PPHP dan Tim PPHP sampai dengan September 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama dan capaian sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut cukup memuaskan. Walaupun masih ada beberapa indikator yang capaiannya belum memenuhi target yang direncanakan.

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tanah Laut masih akan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur menjadi isu strategis yang utama bersama penguatan domestik *connectivity*, penguatan ketahanan pangan, penyediaan air minum serta terpadunya pengembangan kawasan dengan pembangunan infrastruktur dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Dari tahun ke tahun capaian ini terus ditingkatkan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Laut, serta membantu mewujudkan visi dan misi kepala daerah, Sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Tanah Laut.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan menyelesaikan kegiatan tersebut dengan tepat waktu.
2. Melakukan koordinasi kepada semua pihak khususnya terkait pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur bisa tepat sasaran.

3. Melakukan pelelangan barang dan jasa sejak dini agar waktu pekerjaan bisa lebih cepat dan meminimalkan resiko keterlambatan pekerjaan yang mempengaruhi kinerja serta manfaat pekerjaan bisa dirasakan lebih awal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP . 19621002 198903 1 006

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab/ Sumber Data	
1	Meningkatkan Infrastruktur Ke PU an	1	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang sungai dalam kondisi baik}}{\text{Panjang sungai Kabupaten}} \times 100 \%$	Bidang Sumber Daya Air
		2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	$\frac{\text{Jaringan Irigasi yang berfungsi baik}}{\text{Luas Irigasi}} \times 100 \%$	
		3	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Jumlah jembatan dalam Kondisi baik	Bidang Bina Marga
		4	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	Panjang Jalan dalam kondisi baik	
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	$\frac{\text{Total kapasitas Ikk It/Det TALA}}{\text{Jumlah Penduduk TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	Luas Sawah Yang Dapat dialiri jaringan irigasi	Bidang Sumber Daya Air
		2	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	$\frac{\text{Luas Kawasan Sungai dan Pesisir Pantai yang telah dilindungi}}{\text{Target Luas Kawasan Sungai dan Pesisir pantai yang akan dilindungi}} \times 100 \%$	
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	$\frac{\text{Total RT yang Terlayani}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$	Bidang Cipata Karya dan Jasa Kontruksi
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	$\frac{\text{Total RT dengan sanitasi layak}}{\text{Jumlah Total RT Kab. TALA}} \times 100 \%$	
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	$\frac{\text{Hasil evaluasi (audit) perwujudan struktur ruang}}{2} \times 100\%$	Bidang tata ruang
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	1	Persentase teridentifikasinya tanah negara	$\frac{\text{Jumlah tanah negara yang teridentifikasi}}{\text{Jumlah luas tanah negara}} \times 100\%$	Bidang Pertanahan

6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	2	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	$\frac{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah konflik/sengketa tanah pemerintah yang terdata}} \times 100 \%$	
---	---	---	---	---	--

**Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
1	Meningkat infrastruktur ke	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	89,44%	100,5
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	84%	100
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	25 Unit	100
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21.215 Km	27.003 Km	127,28
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	19%	100
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	14.373,24 Ha	99,8
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	88,1%	93,52
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	36,06 % / 1252 SR	1352 SR	107,99
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 % / 1300 Jiwa	1305 Jiwa	100,38
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100%	100
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	10 Lokasi	40% atau 4 lokasi.	40
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	3 Kasus	33% atau 1 konflik saja	33,33

**Capaian IKU Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019**

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
1	Meningkat infrastruktur ke	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89 %	89,44%	100,5
		Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84 %	84%	100
		Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit	25 Unit	100
		Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km	27,003 Km	127,28
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19 %	19%	100
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha	14.373,24 Ha	99,8
		Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %	88,1%	93,52
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	36,06 % / 1252 SR	1352 SR	107,99
		Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 % / 1300 Jiwa	1305 Jiwa	100,38
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100 %	100%	100
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Persentase teridentifikasinya tanah negara	10 Lokasi	40% atau 4 lokasi.	40
6	Meningkatnya penyelesaian konflik/sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah Laut	Persentase terfasilitasinya tanah pemerintah	3 Kasus	33% atau 1 konflik saja	33,33



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Telp (0512) 22384 Pelaihari

Nomor : 700/195 /LHE/Insp/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem
AKIP) Tahun 2018.

Pelaihari, 15 Juli 2019

Kepada Yth :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kab. Tanah Laut
di-

Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Keputusan MENPAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 094/250/ Insp/ 2019 tanggal 10 Juni 2019:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) tahun 2018, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 66,80 dengan kategori Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut:

a. *Perencanaan Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 23,75 dari yang diharapkan sebesar 30 atau dengan angka tertimbang sebesar 79,16% berkategori BB Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal;

b. *Pengukuran Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 15,63 dari yang diharapkan sebesar 25 atau dengan angka tertimbang sebesar 62,50% berkategori kategori Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan;

c. *Pelaporan Kinerja.*

Diperoleh nilai sebesar 9,62 dari yang diharapkan sebesar 15 atau dengan angka tertimbang sebesar 64,11% berkategori Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan;

d. *Evaluasi Internal*

Diperoleh nilai sebesar 6,55% dari yang diharapkan sebesar 10 atau dengan angka tertimbang sebesar 65,47% berkategori Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan;

e. *Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi.*

Diperoleh nilai sebesar 11,27 dari yang diharapkan sebesar 20 atau dengan angka tertimbang sebesar 56,33% berkategori CC Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.

5. Terhadap hal-hal yang telah dikemukakan di atas, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut beserta seluruh jajarannya, agar dilakukan perbaikan sebagai berikut :

a. *Perencanaan Kinerja :*

- Dalam penyusunan Renstra agar indikator kinerja tujuan dilengkapi dengan target kinerja yang dirumuskan dengan baik.
- Agar Rencana Kerja Tahunan yang dibuat dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran.

b. *Pengukuran Kinerja :*

- Agar dibuat Rencana Aksi setiap triwulan dalam rangka pemantauan capaian target kinerja .
- Pengukuran kinerja agar dilaksanakan secara berjenjang dari eselon yang dibawahnya minimal setiap triwulan bila perlu hasil dari pencapaian target dapat dimanfaatkan dalam pemberian *Reward dan Puspishment*.

c. *Pelaporan Kinerja*

- Agar Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja sehingga diketahui tingkat kenaikan atau menurunnya capaian target kinerja.
- Agar Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya baik keuangan atau sumber daya yang lain.
- Untuk menjamin keandalan data kinerja, perlu ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan dan analisis data kinerja.
- Perlunya analisa yang lebih mendalam di setiap indikator dan capaian target Kinerja.
- Hasil dari pencapaian target kinerja agar digunakan sebagai penilaian prestasi kerja bagi pejabat yang telah menandatangani Perjanjian Kinerja.

d. *Evaluasi Internal*

- Perlunya dibuat rencana aksi dalam rangka evaluasi internal secara berkala yang dilakukan tidak hanya satu kali dalam setahun, misalnya dilakukan per semester atau per triwulan agar bisa memberikan informasi capaian target dan memberi gambaran adanya kendala dalam pencapaian target kinerja.

e. *Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi :*

- Perlunya ditingkatkan pencapaian target kinerja sehingga nilai hasil evaluasi dapat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dengan beberapa saran untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Inspektur,
H. Sutrisno, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19601128 198202 1 003

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari sebagai laporan.
2. Menteri PAN dan RB di Jakarta.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	79.16%	23.75	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10.00	82.47%	8.25	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2.00	88.89%	1.78	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		E	-	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5.00	84.38%	4.22	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00	OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		C	0.50	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0.75	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0.75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0.75	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3.00	75.00%	2.25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0.75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0.75	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0.75	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	77.50%	15.50	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4.00	100.00%	4.00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10.00	85.00%	8.50	
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0.75	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0.75	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0.75	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0.75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0.75	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		B	0.75	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6.00	50.00%	3.00	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK

16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		C	0.50	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		C	0.50	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75	OK
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00		62.50%	15.63
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00		93.75%	4.69
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0.75	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12.50		62.50%	7.81
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1.00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0.75	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0.50	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	-	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7.50		41.67%	3.13
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0.50	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.50	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		E	-	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		C	0.50	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00		64.11%	9.62
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00		93.75%	2.81
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0.75	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50		54.71%	4.10
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0.75	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperianikan		B	0.75	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		C	0.50	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0.50	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		C	0.33	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0.50	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50		60.00%	2.70

12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0.50	OK
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0.50	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0.50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00		65.47%	6.55
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00		89.00%	1.78
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00	
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		B	0.67	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00		65.33%	3.27
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan <u>program</u>		B	0.75	OK
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi <u>peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan</u>		B	0.75	OK
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		C	0.50	OK
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif <u>perbaikan yang dapat dilaksanakan</u>		C	0.50	OK
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0.67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00		50.00%	1.50
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0.50	OK
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00		56.33%	11.27
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50		53.33%	4.00
1	Target dapat dicapai		B	2.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		C	1.00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50		145.31%	7.27
4	Target dapat dicapai			0.53	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1.69	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			2.08	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2.97	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00		66.80%	66.80

VISI
"TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR KE PU-AN YANG BERKARAKTER GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN YANG

MISI
1. Mewujudkan Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Unggul
2. Mewujudkan Infrastruktur Sumber daya air yang berdaya guna
3. Mewujudkan Infrastruktur Kecipta Karya yang manusiawi
4. Mewujudkan tata ruang kabupaten dan kecamatan yang terintegrasi
5. Mewujudkan tertib administrasi pertanahan

POHON KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

KINERJA UTAMA ESELON II
Meningkatkan infrastruktur ke PU-an
Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi
Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW
Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan
Meningkatnya penyelesaian konflik atau sengketa tanah pemerintah di Kabupaten Tanah laut
INDIKATOR KINERJA UTAMA (CORE BISNIS)
Persentase panjang sungai dalam kondisi baik
Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik
Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)
Persentase Penyediaan Prasarana Air baku
Luas Sawah yang dapat dilayani (diiri dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik
Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air
Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman
Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak
Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW
Persentase teridentifikasi tanah negara
Persentase terfasilitasinya konflik / sengketa tanah pemerintah

KINERJA UTAMA ESELON III (SEKRETARIS)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan
INDIKATOR KINERJA
Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD
Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu
Persentase dokumen keuangan yang disusun tepat waktu

KASUBBAG PERENCANAAN
Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
INDIKATOR KINERJA
Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan
KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur
INDIKATOR KINERJA
Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran
Jumlah Pemenuhan peningkatan daya aparatur
KASUBBAG KEUANGAN
Menyusun administrasi keuangan SKPD
INDIKATOR KINERJA

KINERJA UTAMA ESELON III (KABID SUMBER DAYA AIR)
Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air
Meningkatnya kualitas saluran sungai
INDIKATOR KINERJA
Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Irigasi
Persentase Ketersediaan Air Baku
Persentase Panjang Sungai dalam Kondisi Baik
Persentase Irigasi kabupaten berfungsi baik
Persentase areal terlindungi dari daya rusak air

KASI PERENCANAAN SUMBER DAYA AIR
Melakukan studi kelayakan terkait Bidang Sumber Daya Air
Melakukan Kajian dan analisa komprehensif Bidang SDA
Melakukan studi identifikasi desain dan survey investigasi infrastruktur SDA
Melakukan proses perencanaan dan perancangan SDA
INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen studi kelayakan bidang SDA
Jumlah dokumen kajian dan analisa komprehensif bidang SDA
Jumlah dokumen studi identifikasi desain dan survey investigasi infrastruktur SDA dan analisa lainnya
Jumlah dokumen detail engineering desain bidang SDA
KASI IRGASISUNGALRAWA DAN PANTAI
Melakukan fasilitasi pembangunan infrastruktur SDA
Melakukan normalisasi saluran dan sungai

KINERJA UTAMA ESELON III (KABID BINA MARGA)
Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap kabupaten
Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap kabupaten
INDIKATOR KINERJA
Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang
Persentase jumlah jembatan kabupaten kondisi baik dan sedang

KASI PENGING.PEMEL. & PENGAWASAN JALAN & JEMBATAN
Melaksanakan, peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan kabupaten
INDIKATOR KINERJA
Jumlahpanjang jalan yang direhabilitasi
KASI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN
Melakukan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standar Bina Marga
INDIKATOR KINERJA
Jumlah jembatan yang terbangun
Jumlah panjang jalan yang terbangun
KAS PERENCANAAN BINA MARGA
Melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan Bidang Bina Marga

KINERJA UTAMA ESELON III (KABID CKJK)
Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi
Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air
Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi
Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas lainnya
INDIKATOR KINERJA
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih
Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi
Persentase terbangunnya drainase/gorong-gorong
Persentase tenaga jasa konstruksi yang memiliki sertifikat
Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi

KASI TATA BANGUNAN
Melakukan pembangunan gedung/bangunan/fasilitas lainnya
Melakukan pemeliharaan rutinberkala gedung/bangunan/fasilitas lainnya
Melakukan penyusunan Standar Satuan Harga Konstruksi Bangunan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah gedung/bangunan/fasilitas lainnya yang dibangun
Jumlah gedung/bangunan/fasilitas lainnya yang terpelihara
Jumlah dokumen Standar Satuan Harga Konstruksi Kabupaten
KASI AIR BERSIH DAN SANITASI
Melakukan penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Melakukan penyediaan prasarana dan sarana air bersih

KINERJA UTAMA ESELON III (KABID TATA RUANG)
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
INDIKATOR KINERJA
Persentase penyelenggaraan penataan ruang

KASIPEMANFAATAN TATA RUANG
Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan RTRW
INDIKATOR KINERJA
Jumlah layanan pertimbangan teknis tata ruang yang sesuai dengan RTRW
Jumlah dokumen berita acara tinjau lapangan
Jumlah pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang
KASI PERENCANAAN TATA RUANG
Melaksanakan penyusunan perencanaan RDTR
Melaksanakan sosialisasi RTRW
Melaksanakan pedoman dn petunjuk teknis penyelenggaraan tata ruang
INDIKATOR KINERJA
Jumlah dokumen perencanaan RDTR
Jumlah kelompok masyarakat, SKPD yang mengikuti sosialisasi peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW)
Jumlah peraturan zonasi dan pedoman yang tersusun

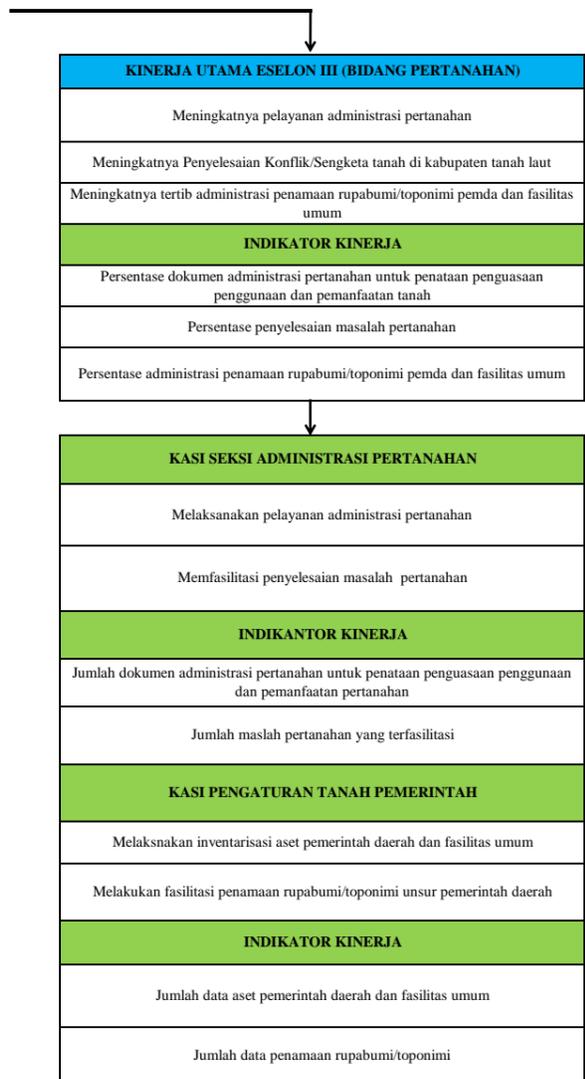
Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan

INDIKATOR KINERJA
Jumlah tampungan air yang terbangun
Panjang jaringan irigasi yang terbangun
Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang terbangun
Panjang sungai yang Dinormalisasi
Panjang tampungan air yang terbangun
KASI OPERASI DAN PEMEIHARAAN PENGAIRAN
Melaksanakan pemeliharaan irigasi dan rawa SDA
Melaksanakan pemeliharaan bangunan sungai dan panta
Melaksanakan pertemuan, pembinaan dan pelatihan kelembagaan pengoperasian irigasi, p kelompok tani atau masyarakatetani pemakai air,
INDIKATOR KINERJA
Jumlah bangunan irigasi yang dipelihara
Panjang irigasi yang dipelihara
Jumlah tampungan air yag dipelihara
Jumlah sarana pendukung irigasi yang dipelihara
Panjang garis pantai yang dipelihara
Jumlah pertemuan kelembagaan SDA
Jumlah pengamat, juru, kelompok tani/masyarakat dan P3A yang dibina

Melakukan fasilitas program Pansimas
Melakukan fasilitas program KOTAKU
INDIKATOR KINERJA
Jumlah panjang drainase yang terbangun
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan sambungan rumah
Jumlah fasilitasi pendampingan KOTAKU
KASI BINA JASA KONSTRUKSI
Melakukan pembinaan badan usaha jasa konstruksi
INDIKATOR KINERJA
Jumlah tenaga konstruksi yang mendapatkan sertifikat
Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi/bimtek terkait Per UU Jasa Konstruksi

KINERJA UTAMA ESELON IV (KEPALA UPT LABORATORIUM)
Meningkatkan retribusi sewa lat uji material konstruksi
Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi
INDIKATOR KINERJA
Persentase peningkatan retribusi daerah
Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi
KASUBBAG TU UPT LABORATORIUM
Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi
Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium
Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Laboratorium
INDIKANTOR KINERJA
Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi baik
Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium
Jumlah SDM UPT Labororium yang bersertifikat

KINERJA UTAMA ESELON IV (KEPALA UPT PERALATAN)
Meningkatnya retribusi sewa alat berat
Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana alat berat
INDIKATOR KINERJA
Persentase peningkatan retribusi daerah
Persentase alat berat yang dipenuhi
KASUBBAG TU UPT PERALATAN
Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat
Melakukan pelayanan administrasi UPT Peralatan
Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Peralatan
INDIKATOR KINERJA
Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi dengan baik
Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Peralatan
Jumlah SDM UPT Peralatan yang bersertifikat



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2017	Realisasi 2017	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2015	Realisasi 2015	Target 2014	Realisasi 2014
1	Meningkatkan Infrastruktur Ke-PU-An	Persentase Panjang Sungai Dalam Kondisi Baik	89%	89%	80,61%	70,61%						
		Persentase Jaringan Irigasi Yang Berfungsi Baik	84%	80,84%	82%	75,91%						
		Jembatan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang (Mantap)	11 Unit	11 Unit	35 Unit	35 Unit						
		Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang (Mantap)	702,47 Km	650,83 Km	690,63 Km	863,29 Km						
		Persentase Penyediaan Prasarana Air Baku	90%	80%	80%	80%						
2	Meningkatkan Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air Serta Pengendalian Daya Rusak Air	Luas Sawah Yang Dapat Dilayani (Diairi Dan Dibuang) Oleh Jaringan Irigasi Kondisi Baik	15.130,9 Ha	13.617,81 Ha	13.262,89 Ha	13.262,89 Ha						
		Persentase Luas Kawasan Yang Terlindungi Akibat Daya Rusak Air	90%	88%	87%	87%						
3	Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Infrastruktur Dasar Permukiman Yang Mencakup Air Minum Dan Sanitasi	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapat Air Minum Yang Aman	68% / 500 SR	68% / 600 SR	45,19% / 249 SR	45,19% / 299 SR						
		Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Yang Layak	2620 Jiwa	2620 Jiwa	1950 Jiwa	1950 Jiwa						

4	Meningkatnya Persentase Kesesuaian Ruang Dengan RTRW	Persentase Kesesuaian Ruang Dengan RTRW	70%	70%	100%	100%						
4	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Negara Oleh Masyarakat, Swasta Dan Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan	Persentase Teridentifikasinya Tanah Negara	0	0	30	10						
6	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa Tanah Pemerintah Di Kabupaten Tanah Laut	Persentase Terfasilitasinya Konflik/Sengketa Tanah Pemerintah	1	0	5	3						
7	Menigkatkan Kuantitas Dan Kualitas Infrastruktur	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik					45,32	32,32				
		Luas Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik					20.876	694,32				
		Persentase Panjang Sungai Dalam Kondisi Baik					83,83	15,95				
		Jumlah Luas Kawasan Taman Kota					1.088.384	320,12				
		Jumlah Jembatan Yang Terbangun					62	62				
		Jumlah Panjang Saluran Drainase Yang Terbangun					24.064	11.639				
8	Meningkatnya Kebersihan Kota	Persentase Penanganan Sampah					26,77	26,77				

9	Meningkatkan Fisik Maupun Kualitas Infrastruktur Jalan & Jembatan Di Perkotaan Maupun Di Pedesaan	Panjang Jalan Kabupaten Yang Telah Dibangun							270.596 Km	257.776 Km	169.10 Km	169.1 Km
		%Panjang Jalan Yang Terbangun Dibanding Kebutuhan							10%	10%	10.00%	10%
		Jumlah Jembatan Yang Terbangun							69 Unit	69 Unit	51.00 unit	51 unit
		% Jembatan Yang Terbangun Dibanding Kebutuhan							11%	11%	11.00 %	11%
		Panjang Jalan Aspal Dengan Kualitas Baik (Jalan Kabupaten)							1286.59 Km	1286.59 Km	1.181,6 Km	1.181,6 Km
		% Panjang Jalan Aspal Dengan Kualitas Baik							76.19%	76.19%	70.00%	70%
		Jumlah Jembatan Dengan Kondisi Baik							530 Unit	530 Unit	530.00 unit	% unit
		% Jembatan Dengan Kondisi Baik							10%	10%	0.55 %	0.553 %

		% Desa Yang Telah Dapat Diakses Dengan Kendaraan Umum							95%	95%	97,8 %	97,8%
		Jumlah Desa Yang Telah Memiliki Jalan Aspal							134 Desa	134 Desa	134.00 desa	134.00 desa
11	Pintu Air Dan Bangunan Pengairan Lainnya	Bendung Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							4.00 Bh	4.00 Bh	5.00 bh	5.00 bh
		Talud Yang Sudah Direhab/ Ditingkatkan							4204.25 M	4204.25 M	9,540.00 M	9,540.00 M
		Pintu Air Yang Sudah Direhab/ Ditingkatkan							62.00 Bh	62.00 Bh	23.00 Bh	23.00 bh
		Siring Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							2761.84 M	2761.84 M	600.00 M	600.00 M
		Jembatan Yang Sudah Direhab/ Ditingkatkan							138.00 Bh	138.00 Bh	26.00 bh	26.00 bh
		Talang Yang Sudah Direhab/ Ditingkatkan							1.00 Bh	1.00 Bh	1.00 bh	1.00 bh
		Penahan Abrasi Yang Sudah Direhab/ Ditingkatkan							65.00 M	65.00 M	850.00 bh	850.00 bh

		Embung Yang Sudah Direhab/ Ditingkatkan							31.00 Bh	31.00 Bh	15.00 bh	15.00 bh
		Breakwater Yang Sudah Direhab/ Ditingkatkan							45.00 M	45.00 M	20.00 m	20.00 m
12	Saluran Sungai Yang Mengalami Pendangkalan	Panjang Tanggul Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							64,805.00 M	64,805.00 M	13,000.00 m	13,000.00 m
		Panjang Sungai Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							606,402.00 M	606,402.00 M	20,250.00 m	20,250.00 m
		Panjang Saluran Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							166,156.00 M	166,156.00 M	149,300.00 m	149,300.00 m
		Pemeliharaan / Penebasan Saluran Rawa							144.00 Km	144.00 Km	113.00 Km	113.00 Km
		Jaringan Irigasi Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							30,300.00 M	30,300.00 M		
		Jaringan Irigasi Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							10.00 Bh	10,00 Bh		
		Intake Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							1.00 Bh	1.00 Bh		

		Panjang Waduk Yang Sudah Terehabilitasi/ Ditingkatkan							40,400.00 M	40,400.00 M		
		Pemeliharaan / penebasan saluran irigasi									33.00 Km	33.00 Km
		Pemeliharaan / galian lumpur saluran irigasi									260.00 M3	260.00 M3
		Luas lahan pertanian yang terlayani jaringan irigasi									36,189.88 ha	36,189.88 ha
13	Adanya Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Tersusunnya Dokumen Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut							2 Dok	2 Dok	9 dok	9 dok
14	Pembangunan Saluran Drainase Diperkotaan	Jumlah Drainase Yang Dibangun							32 Paket	32 Paket	22 paket	22 paket
15	Adanya Pedoman Satuan Harga	Dokumen Satuan Harga Kontruksi							4 Dokumen	4 Dokumen	1 dok	1 dok
16	Memperlancar Transportasi Masyarakat	Jumlah Jalan Lingkungan Yang Direhab							24 Paket	24 Paket	16 paket	16 paket
17	Terbangunnya RTH Kijang Mas Permai Pelaihari	Peningkatan Sarana ^ Prasarana Taman Rekreasi (Paving Blok)							1 Dok	1 Dok	1 paket	1 paket
18	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat	Terbangunnya MCK +							6 Unit	6 Unit	2 bh	2 bh

19	Daerah Rawan Air Bersih	Terpasangnya Pipa Air Bersih							14 Jaringan	14 Jaringan	2 jaringan	2 jaringan
20	Masyarakat Penerima BLM PNPM PISEW	Pendampingan PNPM Pisew							1 Kecamatan	1 Kecamatan	5 kec.	5 kec.
21	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	20 desa sasaran P2KP									20 desa	20 desa
22	Desa – Desa Tertinggal	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan							9 Kelurahan	9 Kelurahan	9 desa	9 desa
23	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Kebijakan Kebijakan Pengelolaan Sampah										
		Belanja Bahan Baku Untuk Pengelolaaan Sampah Di TPA										
		Pembelian Pipa Gas Metan							50 Batang			
		Pembelian Brikes Saluran Lindi							45 Buah	1 Paket		

		Pekerjaan Rehabilitasi Gedung TPST (90 M2) Dan Perkerasan Jalan Masuk TPST (62,125 M3)							90 M2	90 M2		
		Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah Terpilah Organik							40 Set	40 Set		
		Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah Terpilah Non Organik							40 Set	40 Set		
24	Meningkatnya Kebersihan Kota Pelaihari	Tersedianya Peralatan Kebersihan, Spanduk/Baliho, Pakaian Kerja Lapangan, Pengadaan Tanah Untuk TPST, Truck Sampah, Mobil Tinja, Garasi, Bangunan Penyulingan Sampah Plastik, Landasan Kontainer Dan Jembatan Timbang										
		Belanja Pakaian Keerja Lapangan							244 Org/Stel	1 Kegiatan		
		Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Truck Sampah							1 Unit	1 Unit		
		Pengadaan Kontainer Sampah							3 Unit	3 Unit		
		Pengadaan Gedung Garasi Truck Angkutan Sampah							64 M2	64 M2		

		Pengadaan Konstruksi Bangunan Tempat Penyulingan Sampah Plastik							1 Unit	1 Unit		
		Pembangunan Landasan Kontainer							13 Unit	13 Unit		
		Konsultansi Perencanaan Pengadaan Bangunan Gedung Garasi Truck Angkutan Sampah							1 OK	1 Paket		
		Konsultansi Perencanaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Tempat Penyulingan Sampah Plastik							1 OK	1 Paket		
		Konsultansi Perencanaan Bangunan Landasan Kontainer							1 OK	1 Paket		
		Konsultansi Perencanaan Pengadaan Jembatan Timbang TPA Bakunci Dan Sarana Pendukung Lainnya							1 OK	1 Paket		
		Konsultansi Pengawasan Pengadaan Bangunan Gedung Garasi Truck Angkutan Sampah							1 OK	1 Paket		

		Konsultansi Pengawasan Pengadaan Konstruksi Bangunan Tempat Penyulingan Sampah Plastik							1 OK	1 Paket		
		Konsultansi Pengawasan Pembangunan Landasan Kontainer							1 OK	1 Paket		
		Belanja Modal Pembuatan Sumur Bor Di TPA Bakunci Pelaihari							1 Unit	1 Unit		
25	Kebersihan Lebih Meningkat	Terlaksananya Lomba Kebersihan, Tercapainya Pemenuhan Operasional Kebersihan Kota										
		Pengecetan Median Dan Trotoar Dalam Kota Pelaihari							6.043 M2	6.043 M2		
		Pembelian Suku Cadang Kendaraan Darat Bermotor Dan Mesin Potong Rumput							1 Tahun	1 Kegiatan		
26	Sarana Publik Yang Teduh	Taman, Hijauan Kota Menjadi Lebih Baik										
		Pemeliharaan Tugu Dan Taman Adipura Gunung Kayangan							1 Kegiatan	1 Paket		
		Pemeliharaan Gerbang Dan Taman Kawasan Perkantoran							1 Kegiatan	1 Paket		
		Rehabilitasi Bundaran Simpang 3 Bentok Kec. Bati-Bati							1 Kegiatan	1 Paket		

		Pembangunan Orchid Park Pelaihari							1 Buah	1 Buah		
		Renovasi Taman Majakeling (Blok II)							1 Buah	1 Buah		
		Pembangunan Landmark Taman Kuburan Muslimin							1 Unit	1 Buah		
		Pembangunan Pendopo Al Manar							1 Unit	1 Buah		
		Renovasi Taman Tugu Tanah Laut Membangun							1 Buah	1 Buah		
		Renovasi Gerbang Batas Kabupaten Lokasi Desa Pandahan							1 Buah	1 Buah		
		Renovasi Kolam Renang Pelaihari							1 Buah	1 Buah		
		DED Perencanaan Gerbang Taman Makam Pahlawan							1 Dokumen	1 Dokumen		
		DED Perencanaan Taman Pasar Lama							1 Dokumen	1 Dokumen		
		DED Perencanaan Rest Area Gunung Kayangan							1 Dokumen	1 Dokumen		
		DED Perencanaan Pembangunan Drainase Kota Pelaihari							1 Dokumen	1 Dokumen		
		DED Redesign Tugu-Tugu Dalam Kota Pelaihari							1 Dokumen	1 Dokumen		
		Konsultansi Pengawasan Pembangunan Orchid Park Pelahari							1 Dokumen	1 Dokumen		

		Konsultasi Pengawasan Renovasi Gerbang Batas Kabupaten Lokasi Desa Pandahan							1 Dokumen	1 Dokumen		
		Konsultasi Pengawasan Renovasi Kolam Renang Pelaihari							1 Dokumen	1 Dokumen		
		Pemeliharaan Taman Kuburan Muslimin							1 Unit	1 Unit		
		Pemeliharaan Taman Majakeling							1 Unit	1 Unit		
		Pengadaan Toilet Portable							6 Unit	6 Unit		
		Pembuatan Kolam Air Mancur Tugu Tala Memangun							1 Unit	1 Unit		
		Renovasi Taman Tugu Sapi Gunung Kayangan							1 Unit	1 Unit		
		Pengadaan Lampu Dekoratif Taman (Lampion Karakter)							26 Unit	26 Unit		
		Rehab Tugu Pasar Lama							1 Unit	1 Unit		
		Rehab Tugu Simpang 3 Angsau							1 Unit	1 Unit		
		Rehab Tugu PKK Pelaihari							1 Unit	1 Unit		
		DED Perencanaan Alun-Alun GOR Pasar Lama Pelaihari							1 Dokumen	1 Dokumen		
27	Sarana Publik Yang Terang	Kota Menjadi Lebih Indah										
		Perbaikan Box Panel PJU							100 Buah	100 Buah		
		Perbaikan Penerangan Kuburan Muslimin Dan Makam Pahlawan							4 Titik	4 Titik		

		Pengadaan Lampu Dekoratif							4 Buah	4 Buah		
		Konstruksi Lampu Jalan Lingkar Gunung Kayangan							20 Titik	20 Titik		
		Konstruksi Lampu Jalan A.Yani – Sarang Halang (Jl. KH. Mansyur)							10 Titik	10 Titik		
		Konstruksi (Tiang Lampu Sorot) Taman Majakeling							4 Titik	4 Titik		
		Konstruksi (Tiang Lampu Sorot) Taman Al Manar							4 Titik	4 Titik		
		Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tersebar Kel. Pelaihari							1 Paket	1 Paket		
		Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tersebar Kel Sarang Halang							1 Paket	1 Paket		
		Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tersebar Kel. Karang Taruna							1 Paket	1 Paket		
		Pengadaan Lampu PJU Jl. A. Syairani (Simp.3 Sarang Halang)							8 Titik	8 Titik		
		Materisasi Jaringan PJU Liar							4 Titik	4 Titik		
		Konstruksi Lampu Sorot							4 Unit	4 Unit		
		Pengadaan Lampu LED600Watt IP66							30 Buah	30 Buah		
		Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tersebar							48 Unit	48 Unit		
		Materisasi Jaringan PJU (Kintap Zona 1)							8 Titik	8 Titik		

		Materisasi Jaringan PJU (Kintap Zona 2)							6 Titik	6 Titik		
		Materisasi Jaringan PJU (Kintap Zona 3)							8 Titik	8 Titik		
		Materisasi Jaringan PJU (Kintap Zona 4)							8 Titik	8 Titik		
		Materisasi Jaringan PJU (Asam-Asam Zona 1)							9 Titik	9 Titik		
		Materisasi Jaringan PJU (Asam-Asam Zona 2)							6 Titik	6 Titik		
28	Meningkatnya Pelayanan Kebersihan	Suasana Kota Yang Bersih Dan Teduh.										
		Pemeliharaan Median Dan Trotoar Dlm Kota Pelaihari										
		Pengecetan Trotoar									2302.37 M2	2302.37 M2
		Pengecetan Median									2077.85 M2	2077.85 M2
29	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Terangkutnya Sampah Perkotaan										
		Pembelian Pakaian Kerja Lapangan										
		Pakaian Kerja Lapangan									244 Org/Stel	244 Org/Stel
		Pakaian Kaos Kerja									122 Org/Stel	122 Org/Stel
		Training Sport Bagi PNS									35 Org/Stel	35 Org/Stel
		Kaos Bagi PNS									35 Org/Stel	35 Org/Stel
		Pakaian Kerja Lapangan (Hem) Bagi PNS									35 Org/Stel	35 Org/Stel
		Rompi Scottlight									20 Org/Stel	20 Org/Stel

		Konstruksi Penerangan Jl. A. Yani										
		Tiang PJU + Ornamen									30 Titik	30 Titik
		Konstruksi Perbaikan Lampu Jalan H. Boejasin										
		Tiang PJU + Ornamen									33 Titik	33 Titik
		Penerangan Lampu PJU Makam Pahlawan - Gerbang Gn. Kayangan									95 Titik	95 Titik
		Konstruksi Penerangan Taman Kijang Mas									14 Titik	14 Titik
		Pengadaan Peerangan PJU Tersebar Dalam Kota Pelaihari									33 Titik	33 Titik
		Pemasangan (Pergeseran/ Pemandahan) JTM Dan JTR Dan Pembongkaran Lampu Hias Jalan Kemakmuran									7 Titik	7 Titik
		Perbaikan Lampu Jalan H. Boejasin									1 Drock	1 Drock
		Perbaikan Lampu Jalan H. Boejasin									33 Titik	33 Titik
		Konstruksi Lampu Penerangan Lingkungan Al-Manar									15 Titik	15 Titik
		Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tersebar Dalam Kota Pelaihari									30 Titik	30 Titik
		Pengadaan Lampu - Lampu Hias Jalan Umum									3 Unit	3 Unit
		Pembelian Lampu PJU LED									20 Titik	20 Titik
		Materisasi Dan Interkoneksi Jaringan PJU Zona 1									188 Titik	188 Titik

		Materisasi Dan Interkoneksi Jaringan PJU Zona 2									100 Titik	100 Titik
		Materisasi Dan Interkoneksi Jaringan PJU Zona 3									101 Titik	101 Titik
		Materisasi Dan Interkoneksi Jaringan PJU Zona 4									137 Titik	137 Titik
		Materisasi Jaringan PJU Non Meter									38 Titik	38 Titik
		Materisasi Perumahan Dan Jaringan Tersebar ID PEL Tarif P33									38 Titik	38 Titik
		Konstruksi Penerangan Jalan Kemakmuran									4 Titik	4 Titik
		Konstruksi Penerangan Madrasah									3 Titik	3 Titik
											1 Drock	1 Drock
	Penataan RTH	Tersedianya Fasilitas Ruang Terbuka Hijau Dalam Kota Pelaihari										
		Renovasi Taman Majakeling									1 Unit	1 Unit
		Renovasi Taman Al-Manar									1 Unit	1 Unit
		Renovasi Taman Kuburan Muslimin									1 Unit	1 Unit
		Pembuatan Taman Geraban Angsau Dan Gerbang Sarang Halang									1 Unit	1 Unit
		DED Perencanaan Gerbang Batas Kab. Tala Dan Kab. Banjar									1 Dokumen	1 Dokumen
		DED Perencanaan Gerbang Batas Kota Di Sungai Jelai									1 Dokumen	1 Dokumen

		DED Perencanaan Tugu Bunderan Pasar Lama									1 Dokumen	1 Dokumen
		DED Perencanaan Taman Hutan Kota (Taman Anggrek)									1 Dokumen	1 Dokumen
		DED Perencanaan Taman Kijang Kencana Dan Taman Pagar Balairung									1 Dokumen	1 Dokumen
		DED Perencanaan Kolam Renang Pelaihari									1 Dokumen	1 Dokumen
		DED Perencanaan Taman Diklat Hutan Kota Pelaihari									1 Dokumen	1 Dokumen
		DED Perencanaan Taman Tugu Tanah Laut Membangun									1 Dokumen	1 Dokumen
		DED Perencanaan Rehab Taman Mina Tirta									1 Dokumen	1 Dokumen

LAPORAN RENCANA AKSI TAHUN 2019

No.	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN				KETERANGAN			
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET Program (Fisik)		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN (Rp)	TARGET (KEU)				
KEPALA DINAS (ESELON 2)												
1	persentase panjang sungai dalam kondisi baik	TRI 1	0	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan bangunan penampung air yang terbangun	1,128,000	TRI 1	0.19			
		TRI 2	0				1,353,000	TRI 2	0.22			
		TRI 3	36.67				257,661,700	TRI 3	42.42			
		TRI 4	100.00				596,277,000	TRI 4	98.17			
	persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	luas Bangunan Jaringan irigasi	270,000	TRI 1	0.03			
		TRI 2	0				2,060,400	TRI 2	0.21			
		TRI 3	86.39				52,136,100	TRI 3	5.21			
		TRI 4	100.00				2,795,000,500	TRI 4	95.55			
		TRI 1	0		Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	Luas jaringan nirigasi yang teroptimilisasi	1,115,000	TRI 1	0.14			
		TRI 2	0				1,592,800	TRI 2	0.20			
		TRI 3	0				45,970,900	TRI 3	5.67			
		TRI 4	100.00				1,386,454,500	TRI 4	98.26			
		TRI 1	0				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Luas Jaringan irigasi yang terpelihara	5,460,000		TRI 1	0.01
		TRI 2	25.40						11,239,783,114		TRI 2	28.22
		TRI 3	76.98						21,130,546,188		TRI 3	53.05
		TRI 4	100.00						37,941,226,200		TRI 4	95.25
	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) (%)	TRI 1	0%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang direncanakan	9,319,100	TRI 1	-			
		TRI 2	0%				-	TRI 2	-			
		TRI 3	0%				-	TRI 3	-			
		TRI 4	100.00				1,752,700,000	TRI 4	99.94			
		TRI 1	0%		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Terbangun	-	TRI 1	0.05			
		TRI 2	20.65				1,905,294,600	TRI 2	9.69			
		TRI 3	81.15				9,741,888,482	TRI 3	49.56			
		TRI 4	100.00				19,343,952,800	TRI 4	95.98			
		TRI 1	-	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Jumlah Jembatan yang terbangun di perdesaan	30,558,800	TRI 1	0.31			
		TRI 2	6.87				1,684,705,500	TRI 2	17.04			
		TRI 3	100.00				7,341,901,400	TRI 3	74.24			
		TRI 4	100.00				9,405,607,100	TRI 4	95.11			

Meningkatnya infrastruktur ke PU-an	infrastruktur Perdesaan	TRI 1	-	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Jumlah perencanaan jembatan di perdesaan	-	TRI 1	-	
		TRI 2	-			-	TRI 2	-	
		TRI 3	-			-	TRI 3	-	
		TRI 4	100.00			253,190,000	TRI 4	99.78	
	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap) (%)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	TRI 1	0%	Perencanaan Pembangunan Jalan	perencanaan panjang jalan yang terbangun	-	TRI 1	-
			TRI 2	-			-	TRI 2	-
			TRI 3	0%			-	TRI 3	-
			TRI 4	100.00			253,123,000	TRI 4	99.75
		Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	TRI 1	0%	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang terbangun	1,172,000	TRI 1	0.01
			TRI 2	5.60			2,028,600,500	TRI 2	12.35
			TRI 3	97.62			13,273,446,300	TRI 3	80.78
			TRI 4	100.00			19,532,056,750	TRI 4	97.04
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	TRI 1	-	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	Panjang jalan yang terbangun di pedesaan	30,558,800	TRI 1	0.31
			TRI 2	6.87			1,684,705,500	TRI 2	17.04
			TRI 3	100.00			7,341,901,400	TRI 3	74.24
			TRI 4	100.00			9,405,607,100	TRI 4	95.11
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	TRI 1	-	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan	perencanaan panjang jalan yang terbangun di pedesaan	-	TRI 1	-
			TRI 2	-			-	TRI 2	-
			TRI 3	-			-	TRI 3	-
			TRI 4	100.00			253,190,000	TRI 4	99.78
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		TRI 1	-	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	perencanaan panjang jalan yang terehabilitasi	-	TRI 1	-	
		TRI 2	-			-	TRI 2	-	
		TRI 3	-			-	TRI 3	-	
		TRI 4	100.00			1,052,998,000	TRI 4	99.93	
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	TRI 1	-	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	panjang jalan yang terehabilitasi	1,149,250	TRI 1	0.01		
	TRI 2	29.62			1,913,467,250	TRI 2	16.57		
	TRI 3	100.00			8,862,948,498	TRI 3	76.75		
	TRI 4	100.00			12,266,347,850	TRI 4	94.57		
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	TRI 1	0%	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)	panjang jalan yang terehabilitasi	-	TRI 1	-		
	TRI 2	8.58			4,083,599,300	TRI 2	18.92		
	TRI 3	61.76			10,709,487,103	TRI 3	49.63		

			TRI 4	100.00				20,406,589,000	TRI 4	94.57			
		Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan Pintu Air		1,115,000	TRI 1	0.14			
			TRI 2	0					1,592,800	TRI 2	0.20		
			TRI 3	41.39					45,970,900	TRI 3	5.67		
			TRI 4	100.00					1,386,454,500	TRI 4	98.26		
			TRI 1	0	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		1,128,000	TRI 1	0.19			
			TRI 2	0					1,353,000	TRI 2	0.22		
			TRI 3	36.67					257,661,700	TRI 3	42.42		
			TRI 4	100.00					596,277,000	TRI 4	98.17		
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Perencanaan luas Jaringan irigasi yang dibangun		270,000	TRI 1	0.03		
			TRI 2	0						2,060,400	TRI 2	0.21	
			TRI 3	86.39						52,136,100	TRI 3	5.21	
			TRI 4	100.00						2,795,000,500	TRI 4	95.55	
		TRI 1	0			Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun	luas jaringan irigasi yang teroptimalisasi		-	TRI 1			
		TRI 2	0						-	TRI 2			
		TRI 3	0						-	TRI 3			
		TRI 4	100.00						1,052,776,800	TRI 4	98.29		
	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Luas jaringan irigasi yang terehabilitasi		5,460,000	TRI 1	0.01				
	TRI 2	25.40						11,239,783,114	TRI 2	28.22			
	TRI 3	76.98						21,130,546,188	TRI 3	53.05			
	TRI 4	100.00						37,941,226,200	TRI 4	95.25			
	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air (%)	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Luas persawahan yang dialiri air baik		-	TRI 1	0.00%			
		TRI 2	0						-	TRI 2	-		
		TRI 3	0						-	TRI 3	-		
		TRI 4	0						13,649,900	TRI 4	20.65		
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	TRI 1	0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Renda		0	TRI 1	-			
			TRI 2	5.00					0	TRI 2	-		
			TRI 3	96.30					280,245,000	TRI 3	96.30		
			TRI 4						4,228,827,755	TRI 4	98.33		
			TRI 1	0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)		14,694,924	TRI 1	1.10			
			TRI 2	5.00					39,569,924	TRI 2	2.97		
			TRI 3	100.00					1,059,608,924	TRI 3	79.54		
			TRI 4						1,116,916,572	TRI 4	83.84		

4	Meningkatkan Infrastruktur Publik	Persentase cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (%)	TRI 1	0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK PENERUGASAN)	Pengelolaan air limbah yang baik	0	TRI 1	-	
			TRI 2	15.00				888,861,600	TRI 2	19.55	
			TRI 3	100.00				3,316,168,500	TRI 3	72.93	
			TRI 4					4,476,258,000	TRI 4	98.44	
5	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	presentase kesesuaian ruang dengan RTRW	TRI 1		Program Perencanaan Tata Ruang	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang		31,593,100	TRI 1	10.04	
			TRI 2					118,155,400	TRI 2	37.54	
			TRI 3					203,827,900	TRI 3	64.76	
			TRI 4					290,681,000	TRI 4	85.81	
6	Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembinaan jasa konstruksi	Persentase Peningkatan pengetahuan dan kinerja personil badan usaha jasa konstruksi	TRI 1	0	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		31,618,700	TRI 1	10.56	
			TRI 2					96,334,850	TRI 2	32.19	
			TRI 3					154,076,150	TRI 3	51.48	
			TRI 4					220,170,700	TRI 4	81.67	
7	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT peralatan dan UPT laboratorium	Persentase Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	TRI 1	0	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi		17,644,000	TRI 1	3.31	
			TRI 2					65,100,000	TRI 2	12.20	
			TRI 3					103,302,026	TRI 3	19.36	
			TRI 4					314,895,262	TRI 4	67.82	
8	Meningkatnya peran dan kompetensi UPT peralatan dan UPT laboratorium	Persentase Indeks Kepuasan pengguna jasa Uji	TRI 1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		-	TRI 1	-	
			TRI 2					20,610,000	TRI 2	10.90	
			TRI 3					30,420,000	TRI 3	16.10	
			TRI 4					56,890,000	TRI 4	30.10	
8	Meningkatnya Luas lahan Bersertifikat dan ijin lokasi	Luas lahan bersertifikat	TRI 1		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2,902,000	TRI 1	0.24	
			TRI 2					2,902,000	TRI 2	0.24	
			TRI 3					4,662,000	TRI 3	0.39	
			TRI 4					12,369,800	TRI 4	53.51	
	Meningkatnya Luas lahan Bersertifikat dan ijin lokasi	Penyelesaian kasus tanah negara		TRI 1		Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			TRI 1	
				TRI 2						TRI 2	
				TRI 3						TRI 3	
				TRI 4					493,200	TRI 4	3.02
	Meningkatnya Luas lahan Bersertifikat dan ijin lokasi	Penyelesaian ijin lokasi		TRI 1		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Toponomi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintahan			TRI 1	
				TRI 2						TRI 2	
				TRI 3						TRI 3	
				TRI 4					8,206,000	TRI 4	89.59

SEKRETARIS (ESELON 3)

SEKRETARIS (ESELON 3)													
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	TRI 1	0	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD		2,293,500	TRI 1	7.89			
			TRI 2	0				10,453,500	TRI 2	35.96			
			TRI 3	0				13,192,800	TRI 3	45.38			
			TRI 4	0				18,858,300	TRI 4	64.86			
2	Pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	TRI 1	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor		0	TRI 1	0			
			TRI 2	100.00				77,574,000	TRI 2	96.85			
			TRI 3						TRI 3				
			TRI 4						TRI 4				
			TRI 1					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60,444,660		TRI 1	15.64
			TRI 2							125,126,769		TRI 2	32.37
			TRI 3							187,293,269		TRI 3	48.46
			TRI 4							265,288,444		TRI 4	68.64
			TRI 1					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		22,933,500		TRI 1	5.58
			TRI 2							63,000,350		TRI 2	15.33
			TRI 3							156,274,850		TRI 3	38.02
			TRI 4							288,856,950		TRI 4	70.27
			TRI 1					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		7,665,000		TRI 1	9.93
			TRI 2							28,965,050		TRI 2	37.51
			TRI 3							50,565,350		TRI 3	65.49
			TRI 4							76,621,850		TRI 4	99.24
			TRI 1					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		28,825,000		TRI 1	25.29
			TRI 2							55,150,000		TRI 2	48.38
			TRI 3							84,750,000		TRI 3	74.34
			TRI 4							111,750,000		TRI 4	98.03
			TRI 1					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		3,335,000		TRI 1	5.58
			TRI 2							8,725,000		TRI 2	14.59
			TRI 3							23,375,000		TRI 3	39.09
			TRI 4							45,555,000		TRI 4	76.18
			TRI 1					Penyediaan Alat Tulis Kantor		-		TRI 1	-
			TRI 2							-		TRI 2	-
			TRI 3							44,574,800		TRI 3	39.09
			TRI 4	100.00						44,574,800		TRI 4	81.68
			TRI 1					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3,500,000		TRI 1	9.99
			TRI 2							6,250,000		TRI 2	17.84
			TRI 3							21,765,000		TRI 3	62.14

3	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	TRI 4	Administrasi Perkantoran		32,759,000	TRI 4	93.53	
			TRI 1			930,000	TRI 1	4.65	
			TRI 2			5,295,000	TRI 2	26.48	
			TRI 3			12,785,000	TRI 3	63.93	
			TRI 4			19,389,396	TRI 4	96.95	
			TRI 1			-	TRI 1	-	
			TRI 2			1,580,000	TRI 2	0.45	
			TRI 3			16,355,000	TRI 3	4.65	
			TRI 4			327,310,440	TRI 4	93.04	
			TRI 1			1,000,000	TRI 1	16.67	
			TRI 2			2,500,000	TRI 2	41.67	
			TRI 3			4,500,000	TRI 3	75.00	
			TRI 4			6,000,000	TRI 4	100.00	
			TRI 1			-	TRI 1	-	
			TRI 2			6,570,000	TRI 2	34.93	
			TRI 3			7,920,000	TRI 3	42.11	
			TRI 4			17,250,000	TRI 4	91.71	
			TRI 1			116,274,306	TRI 1	18.51	
			TRI 2			420,687,359	TRI 2	66.98	
			TRI 3			628,042,734	TRI 3	100.00	
			TRI 4			826,033,898	TRI 4	100.00	
			TRI 1			17,930,000	TRI 1	5.81	
			TRI 2			29,300,000	TRI 2	9.50	
			TRI 3			30,465,000	TRI 3	9.88	
			TRI 4			31,795,000	TRI 4	29.33	
			TRI 1			331,500,000	TRI 1	25.00	
			TRI 2			663,000,000	TRI 2	50.00	
			TRI 3			994,500,000	TRI 3	75.00	
TRI 4	1,326,000,000	TRI 4	100.00						
TRI 1	2,293,500	TRI 1	7.89						
TRI 2	10,453,500	TRI 2	35.96						
TRI 3	13,192,800	TRI 3	45.38						
TRI 4	18,858,300	TRI 4	64.86						
4	Pelayanan administrasi keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	TRI 1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem		-	TRI 1	-	

			TRI 2		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		1,438,000	TRI 2	9.59
			TRI 3					5,286,100	TRI 3	35.24
			TRI 4					14,583,000	TRI 4	97.22
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA AIR (ESELON 3)										
1	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air Untuk Mendukung Pendayagunaan Sumber Daya Air Serta Pengendalian Daya Rusak Air	Persentase Luas Daerah Jaringan Irigasi dan Rawa Dalam Kondisi Baik	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi		270,000	TRI 1	0.03
			TRI 2	0				2,060,400	TRI 2	0.21
			TRI 3	86.39				52,136,100	TRI 3	5.21
			TRI 4	100.00				2,795,000,500	TRI 4	95.55
		TRI 1	0	Pembangunan Pintu Air			1,115,000	TRI 1	0.14	
		TRI 2	0				1,592,800	TRI 2	0.20	
		TRI 3	41.39				45,970,900	TRI 3	5.67	
		TRI 4	100.00				1,386,454,500	TRI 4	98.26	
		TRI 1	0	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai			972,700	TRI 1	0.08	
		TRI 2	0				1,703,700	TRI 2	0.14	
		TRI 3	100.00				548,035,300	TRI 3	43.79	
		TRI 4	100.00				1,619,608,500	TRI 4	98.07	
		TRI 1	0	Pemberdayaan Petani Pemakai Air			-	TRI 1	0.00%	
		TRI 2	0				-	TRI 2	-	
		TRI 3	0				-	TRI 3	-	
		TRI 4	0				13,649,900	TRI 4	20.65	
		TRI 1	0	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun			-	TRI 1		
		TRI 2	0				-	TRI 2		
		TRI 3	0				-	TRI 3		
		TRI 4	100.00				1,052,776,800	TRI 4	98.29	
	TRI 1	0	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)		5,460,000	TRI 1	0.01			
	TRI 2	25.40			11,239,783,114	TRI 2	28.22			
	TRI 3	76.98			21,130,546,188	TRI 3	53.05			
	TRI 4	100.00			37,941,226,200	TRI 4	95.25			
	Persentase Panjang Sungai dan Saluran Dalam Kondisi Baik	TRI 1	0	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampungan Air		1,128,000	TRI 1	0.19	
		TRI 2	0				1,353,000	TRI 2	0.22	

			TRI 3	36.67	Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pembangunan Pemukiman Air Lainnya		257,661,700	TRI 3	42.42	
			TRI 4	100.00				596,277,000	TRI 4	98.17	
	Persentase Kenaikan Luas Kawasan yang Terlindungi Akibat Daya Rusak Air		TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pemberdayaan Petani Pemakai Air		-	TRI 1	0.00%	
			TRI 2	0				-	TRI 2	-	
			TRI 3	0				-	TRI 3	-	
			TRI 4	0				13,649,900	TRI 4	20.65	
KEPALA BIDANG BINA MARGA (ESELON 3)											
1	meningkatnya kondisi mantap jaringan jalan dan jembatan Kabupaten	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang (%)	TRI 1	0%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jalan		-	TRI 1	-	
			TRI 2	-					-	TRI 2	-
			TRI 3	0%					-	TRI 3	-
			TRI 4	100.00					253,123,000	TRI 4	99.75
			TRI 1	0%		Pembangunan Jalan		1,172,000	TRI 1	0.01	
			TRI 2	5.60				2,028,600,500	TRI 2	12.35	
			TRI 3	97.62				13,273,446,300	TRI 3	80.78	
			TRI 4	100.00				19,532,056,750	TRI 4	97.04	
			TRI 1	0%		Perencanaan Pembangunan Jembatan		9,319,100	TRI 1	-	
			TRI 2	0%				-	TRI 2	-	
			TRI 3	0%				-	TRI 3	-	
			TRI 4	100.00				1,752,700,000	TRI 4	99.94	
			TRI 1	0%		Pembangunan Jembatan		-	TRI 1	0.05	
			TRI 2	20.65				1,905,294,600	TRI 2	9.69	
			TRI 3	81.15				9,741,888,482	TRI 3	49.56	
			TRI 4	100.00				19,343,952,800	TRI 4	95.98	
			TRI 1	-	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan		30,558,800	TRI 1	0.31	
			TRI 2	6.87				1,684,705,500	TRI 2	17.04	
			TRI 3	100.00				7,341,901,400	TRI 3	74.24	
			TRI 4	100.00				9,405,607,100	TRI 4	95.11	
			TRI 1	-	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan		-	TRI 1	-	
			TRI 2	-				-	TRI 2	-	
			TRI 3	-				-	TRI 3	-	
			TRI 4	100.00				253,190,000	TRI 4	99.78	
	Persentase Kenaikan Panjang Jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang (%)		TRI 1	-	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		-	TRI 1	-	
			TRI 2	-				-	TRI 2	-	
			TRI 3	-				-	TRI 3	-	
			TRI 4	100.00				1,052,998,000	TRI 4	99.93	
			TRI 1	-		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		1,149,250	TRI 1	0.01	
			TRI 2	29.62				1,913,467,250	TRI 2	16.57	
			TRI 3	100.00				8,862,948,498	TRI 3	76.75	
			TRI 4	100.00				12,266,347,850	TRI 4	94.57	

			TRI 1	0%		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)		-	TRI 1	-	
			TRI 2	8.58				4,083,599,300	TRI 2	18.92	
			TRI 3	61.76				10,709,487,103	TRI 3	49.63	
			TRI 4	100.00				20,406,589,000	TRI 4	94.57	
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI (ESELON 3)											
1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	Persentase kenaikan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yg aman atau Tambahan Jumlah Sambungan Rumah yang dapat dicapai kab/kota (SR)	TRI 1	0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	TRI 1	-		
			TRI 2	5.00			-	TRI 2	-		
			TRI 3	100.00			280,245,000	TRI 3	96.30		
			TRI 4	100.00			4,228,827,755	TRI 4	98.33		
			TRI 1	0			14,694,924	TRI 1	1.10		
			TRI 2	5.00			39,569,924	TRI 2	2.97		
			TRI 3	100.00			1,059,608,924	TRI 3	79.54		
			TRI 4	100.00			1,116,916,572	TRI 4	83.84		
	Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur	Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%) atau Jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (SR)		TRI 1		0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK PENUGASAN)	54,000,000	TRI 1	1.04
				TRI 2		16.67			2,654,350,000	TRI 2	51.27
				TRI 3		56.59			5,117,750,000	TRI 3	98.86
				TRI 4		100.00			5,177,000,000	TRI 4	100.00
				TRI 1		0			-	TRI 1	-
				TRI 2		15.00			888,861,600	TRI 2	19.55
				TRI 3		100.00			3,316,168,500	TRI 3	72.93
				TRI 4		100.00			4,476,258,000	TRI 4	98.44
2	Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur	Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%) atau Jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (SR)	TRI 1	0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	TRI 1	-		
			TRI 2	5.00			-	TRI 2	-		
			TRI 3	100.00			280,245,000	TRI 3	96.30		
			TRI 4	100.00			4,228,827,755	TRI 4	98.33		
			TRI 1	0			14,694,924	TRI 1	1.10		
			TRI 2	5.00			39,569,924	TRI 2	2.97		
			TRI 3	100.00			1,059,608,924	TRI 3	79.54		
			TRI 4	100.00			1,116,916,572	TRI 4	83.84		
	Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur	Jumlah tambahan cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yg memadai (%) atau Jumlah tambahan akses pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai (SR)		TRI 1		0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK PENUGASAN)	54,000,000	TRI 1	1.04
				TRI 2		16.67			2,654,350,000	TRI 2	51.27
				TRI 3		56.59			5,117,750,000	TRI 3	98.86
				TRI 4		100.00			5,177,000,000	TRI 4	100.00

			TRI 1	0				-	TRI 1	-		
			TRI 2	15.00		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK PENUKASAN)		888,861,600	TRI 2	19.55		
			TRI 3	100.00				3,316,168,500	TRI 3	72.93		
			TRI 4	100.00				4,476,258,000	TRI 4	98.44		
KEPALA BIDANG TATA RUANG (ESELON 3)												
1	Meningkatnya kuantitas regulasi bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Jumlah peraturan daerah untuk rencana detail tata ruang	TRI 1	0%	Program Perencanaan Tata Ruang	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang		31,593,100	TRI 1	10.04		
			TRI 2	0%					118,155,400	TRI 2	37.54	
			TRI 3	0%					203,827,900	TRI 3	64.76	
			TRI 4	0%					290,681,000	TRI 4	85.81	
2		Jumlah rapat koordinasi tim bkbrd dan keterangan tata ruang	TRI 1	0%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		31,618,700	TRI 1	10.56		
			TRI 2	0%					96,334,850	TRI 2	32.19	
			TRI 3	0%					154,076,150	TRI 3	51.48	
			TRI 4	0%					220,170,700	TRI 4	81.67	
KEPALA BIDANG PERTANAHAN (ESELON 3)												
1	Meningkatnya Pemanfaatan Tanah Negara oleh Masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	Nilai kumulatif penyelenggaraan penataan ruang kabupaten	TRI 1	0%	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2,902,000	TRI 1	0.24		
			TRI 2	0%					2,902,000	TRI 2	0.24	
			TRI 3	0%					4,662,000	TRI 3	0.39	
			TRI 4	0%					12,369,800	TRI 4	53.51	
	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di kabupaten tanah laut	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	TRI 1	0%	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		-	TRI 1	-		
			TRI 2	0%					-	TRI 2	-	
			TRI 3	0%					-	TRI 3	-	
			TRI 4	0%					493,200	TRI 4	3.02	
		Jumlah lahan / area tanah yang mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum	TRI 1	0%	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Toponomi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintahan		-	TRI 1	-		
			TRI 2	0%					-	TRI 2	-	
			TRI 3	0%					-	TRI 3	-	
			TRI 4	0%					8,206,000	TRI 4	89.59	
KASUBAG PERENCANAAN (ESELON 4)												
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	TRI 1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD		2,293,500	TRI 1	7.89		
			TRI 2						10,453,500	TRI 2	35.96	
			TRI 3						13,192,800	TRI 3	45.38	
			TRI 4						18,858,300	TRI 4	64.86	
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN (ESELON 4)												
	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	TRI 1			Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor		0	TRI 1	0		
			TRI 2						77,574,000	TRI 2	96.85	
			TRI 3							TRI 3		
			TRI 4							TRI 4		
			TRI 1			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		60,444,660	TRI 1	15.64		
			TRI 2						125,126,769	TRI 2	32.37	
			TRI 3						187,293,269	TRI 3	48.46	
			TRI 4						265,288,444	TRI 4	68.64	

TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4
TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4
TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4
TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4
TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4
TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4
TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4
TRI 1
TRI 2
TRI 3
TRI 4

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		22,933,500	TRI 1	5.58
		63,000,350	TRI 2	15.33
		156,274,850	TRI 3	38.02
		288,856,950	TRI 4	70.27
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		7,665,000	TRI 1	9.93
		28,965,050	TRI 2	37.51
		50,565,350	TRI 3	65.49
		76,621,850	TRI 4	99.24
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		28,825,000	TRI 1	25.29
		55,150,000	TRI 2	48.38
		84,750,000	TRI 3	74.34
		111,750,000	TRI 4	98.03
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja		3,335,000	TRI 1	5.58
		8,725,000	TRI 2	14.59
		23,375,000	TRI 3	39.09
		45,555,000	TRI 4	76.18
Penyediaan Alat Tulis Kantor		-	TRI 1	-
		-	TRI 2	-
		44,574,800	TRI 3	39.09
		44,574,800	TRI 4	81.68
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		3,500,000	TRI 1	9.99
		6,250,000	TRI 2	17.84
		21,765,000	TRI 3	62.14
		32,759,000	TRI 4	93.53
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		930,000	TRI 1	4.65
		5,295,000	TRI 2	26.48
		12,785,000	TRI 3	63.93
		19,389,396	TRI 4	96.95
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	TRI 1	-
		1,580,000	TRI 2	0.45
		16,355,000	TRI 3	4.65
		327,310,440	TRI 4	93.04
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1,000,000	TRI 1	16.67
		2,500,000	TRI 2	41.67
		4,500,000	TRI 3	75.00
		6,000,000	TRI 4	100.00
Penyediaan Makanan dan Minuman		-	TRI 1	-
		6,570,000	TRI 2	34.93
		7,920,000	TRI 3	42.11
		17,250,000	TRI 4	91.71
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah		116,274,306	TRI 1	18.51
		420,687,359	TRI 2	66.98
		628,042,734	TRI 3	100.00
		826,033,898	TRI 4	100.00

			TRI 1			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah		17,930,000	TRI 1	5.81
			TRI 2					29,300,000	TRI 2	9.50
			TRI 3					30,465,000	TRI 3	9.88
			TRI 4					31,795,000	TRI 4	29.33
		Jumlah Pemenuhan peningkatan daya aparatur	TRI 1			Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD		331,500,000	TRI 1	25.00
			TRI 2		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			663,000,000	TRI 2	50.00
			TRI 3					994,500,000	TRI 3	75.00
			TRI 4					1,326,000,000	TRI 4	100.00
KASUBAG KEUANGAN (ESELON 4)										
1	Menyusun administrasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	TRI 1		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		-	TRI 1	-
			TRI 2					1,438,000	TRI 2	9.59
			TRI 3					5,286,100	TRI 3	35.24
			TRI 4					14,583,000	TRI 4	97.22
KASI SDA (ESELON 4)										
1	Menyusun Dokumen Kajian, Studi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Kajian, Studi, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	TRI 1		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong		891,800	TRI 1	0.07
			TRI 2					1,858,600	TRI 2	0.15
			TRI 3	84.29				296,959,600	TRI 3	23.49
			TRI 4	100.00				2,339,517,200	TRI 4	98.49
			TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi		270,000	TRI 1	0.03
			TRI 2	0				2,060,400	TRI 2	0.21
			TRI 3	86.39				52,136,100	TRI 3	5.21
			TRI 4	100.00				2,795,000,500	TRI 4	95.55
2	Melaksanakan Pembangunan Tampung Air	Jumlah Tampung Air Yang Dibangun	TRI 1	0	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Kerservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Pembangunan Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		1,128,000	TRI 1	0.19
			TRI 2	0				1,353,000	TRI 2	0.22
			TRI 3	36.67				257,661,700	TRI 3	42.42
			TRI 4	100.00				596,277,000	TRI 4	98.17
	Melaksanakan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Irigasi Sungai dan Rawa	Panjang dan Jumlah Bangunan Jaringan Irigasi Sungai dan Rawa Yang Dibangun dan Direhabilitasi	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan Pintu Air		1,115,000	TRI 1	0.14
			TRI 2	0				1,592,800	TRI 2	0.20
			TRI 3	41.39				45,970,900	TRI 3	5.67
			TRI 4	100.00				1,386,454,500	TRI 4	98.26
			TRI 1	0		Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun		-	TRI 1	
			TRI 2	0				-	TRI 2	
			TRI 3	0				-	TRI 3	
			TRI 4	100.00				1,052,776,800	TRI 4	98.29

	Melaksanakan Pembangunan Pengendali Daya Rusak Air	Panjang dan Jumlah Bangunan Pengaman Pantai dan Sungai Yang Dibangun Dan Direhabilitasi	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai		972,700	TRI 1	0.08
			TRI 2	0				1,703,700	TRI 2	0.14
			TRI 3	100.00				548,035,300	TRI 3	43.79
			TRI 4					1,619,608,500	TRI 4	98.07
	Melaksanakan Pengembangan Jaringan Air Baku	Kapasitas Air Baku Yang Dibangun	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pembangunan Pintu Air		1,115,000	TRI 1	0.14
			TRI 2	0				1,592,800	TRI 2	0.20
			TRI 3	41.39				45,970,900	TRI 3	5.67
			TRI 4	100.00				1,386,454,500	TRI 4	98.26
3	Melaksanaa Pengelolaan Daerah Irigasi/Rawa Kewenangan (peningkatan, rehabilitasi & OP)	Jumlah Daerah Irigasi/Rawa Kewenangan Yang Direhabilitasi dan Dipelihara	TRI 1	0	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun		-	TRI 1	
			TRI 2	0				-	TRI 2	
			TRI 3	0				-	TRI 3	
			TRI 4	100.00				1,052,776,800	TRI 4	98.29
			TRI 1	0		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)		5,460,000	TRI 1	0.01
			TRI 2	25.40				11,239,783,114	TRI 2	28.22
			TRI 3	76.98				21,130,546,188	TRI 3	53.05
			TRI 4	100.00				37,941,226,200	TRI 4	95.25
	Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	Jumlah Pertemuan Kelompok Petani Pemakai Air Yang Dibina dan Diberdayakan	TRI 1		Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Pemberdayaan Petani Pemakai Air		-	TRI 1	0.00%
			TRI 2					-	TRI 2	-
			TRI 3					-	TRI 3	-
			TRI 4					13,649,900	TRI 4	20.65
KASI BINA MARGA (ESELON 4)										
1	Melaksanakan Peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten	Jumlah panjang jalan yang akan ditingkatkan dan di bangun pada tahun berjalan	TRI 1	-	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		1,149,250	TRI 1	0.01
			TRI 2	29.62				1,913,467,250	TRI 2	16.57
			TRI 3	100.00				8,862,948,498	TRI 3	76.75
			TRI 4	100.00				12,266,347,850	TRI 4	94.57
			TRI 1	0%		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)		-	TRI 1	-
			TRI 2	8.58				4,083,599,300	TRI 2	18.92
			TRI 3	61.76				10,709,487,103	TRI 3	49.63
			TRI 4	100.00				20,406,589,000	TRI 4	94.57
2	Melaksanakan Pembangunan Jalan sesuai dengan standar Bina Marga	Jumlah pembangunan jembatan dan panjang jalan yang akan dibangun pada tahun berjalan	TRI 1	0%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan		1,172,000	TRI 1	0.01
			TRI 2	5.60				2,028,600,500	TRI 2	12.35
			TRI 3	97.62				13,273,446,300	TRI 3	80.78
			TRI 4	100.00				19,532,056,750	TRI 4	97.04

			TRI 1	0%		Pembangunan Jembatan		-	TRI 1	0.05	
			TRI 2	20.65				1,905,294,600	TRI 2	9.69	
			TRI 3	81.15				9,741,888,482	TRI 3	49.56	
			TRI 4	100.00				19,343,952,800	TRI 4	95.98	
			TRI 1	-	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan		30,558,800	TRI 1	0.31	
			TRI 2	6.87				1,684,705,500	TRI 2	17.04	
			TRI 3	100.00				7,341,901,400	TRI 3	74.24	
			TRI 4	100.00				9,405,607,100	TRI 4	95.11	
3	Melaksanakan perencanaan pembangunan jalan dan jembatan yang akan di bangun	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan bidang bina marga	TRI 1	0%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jalan		-	TRI 1	-	
			TRI 2	-					-	TRI 2	-
			TRI 3	0%					-	TRI 3	-
			TRI 4	100.00					253,123,000	TRI 4	99.75
			TRI 1	0%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Perencanaan Pembangunan Jembatan		9,319,100	TRI 1	-	
			TRI 2	0%					-	TRI 2	-
			TRI 3	0%					-	TRI 3	-
			TRI 4	100.00					1,752,700,000	TRI 4	99.94
			TRI 1	-	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan		-	TRI 1	-	
			TRI 2	-					-	TRI 2	-
			TRI 3	-					-	TRI 3	-
			TRI 4	100.00					253,190,000	TRI 4	99.78
			TRI 1	-	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan		-	TRI 1	-	
			TRI 2	-					-	TRI 2	-
			TRI 3	-					-	TRI 3	-
			TRI 4	100.00					1,052,998,000	TRI 4	99.93
KASI CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI (ESELON 4)											
1	Menyiapkan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung Negara	TRI 1	5.12	Program Keciaptakaryaan	Pembangunan Gedung Kantor		146,326,900	TRI 1	0.45	
			TRI 2	25.38				962,514,400	TRI 2	2.94	
			TRI 3	44.11				7,320,429,013	TRI 3	22.35	
			TRI 4	100.00				30,932,026,000	TRI 4	95.46	
	Menyiapkan Dokumen Pengawasan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Pengawasan Bangunan Gedung Negara	TRI 1	-	Program Keciaptakaryaan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		146,326,900	TRI 1	0.45	
			TRI 2	24.00				35,250,000	TRI 2	2.06	
			TRI 3	38.00				305,250,000	TRI 3	17.80	
			TRI 4	100.00				1,368,512,000	TRI 4	97.69	
2	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Air Minum, dan sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Bersih	TRI 1	0		Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah		-	TRI 1	-	
			TRI 2	5.00				-	TRI 2	-	

			TRI 3	100.00			280,245,000	TRI 3	96.30	
			TRI 4	100.00			4,228,827,755	TRI 4	98.33	
			TRI 1	0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pengelolaan Sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)	14,694,924	TRI 1	1.10	
			TRI 2	5.00			39,569,924	TRI 2	2.97	
			TRI 3	100.00			1,059,608,924	TRI 3	79.54	
			TRI 4	100.00			1,116,916,572	TRI 4	83.84	
			TRI 1	0			Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK PENUKASAN)	-	TRI 1	-
			TRI 2	15.00				888,861,600	TRI 2	19.55
			TRI 3	100.00				3,316,168,500	TRI 3	72.93
			TRI 4	100.00				4,476,258,000	TRI 4	98.44
Meningkatnya Akses Pelayanan Air Limbah	Jumlah Kumulatif Rumah Tangga Yang Terlayani IPAL		TRI 1	0	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK PENUKASAN)	54,000,000	TRI 1	1.04	
			TRI 2	16.67			2,654,350,000	TRI 2	51.27	
			TRI 3	56.59			5,117,750,000	TRI 3	98.86	
			TRI 4	100.00			5,177,000,000	TRI 4	100.00	
Meningkatnya Akses Pelayanan Drainase Perkotaan	Jumlah Kawasan Yang Terlayani oleh saluran drainase perkotaan		TRI 1	0	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	4,769,685	TRI 1	0.40	
			TRI 2	6.43			10,859,685	TRI 2	0.91	
			TRI 3	85.71			956,828,185	TRI 3	79.74	
			TRI 4	100.00			1,662,659,485	TRI 4	92.38	
3	Meningkatnya Kinerja dan Produktivitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Total Penyedia Barang atau Jasa Yang aktif		TRI 1		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	17,644,000	TRI 1	3.31
				TRI 2				65,100,000	TRI 2	12.20
				TRI 3				103,302,026	TRI 3	19.36
				TRI 4				314,895,262	TRI 4	67.82
Meningkatnya Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	Jumlah Penyedia barang atau jasa yang terentry		TRI 1		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	17,644,000	TRI 1	3.31	
			TRI 2				65,100,000	TRI 2	12.20	
			TRI 3				103,302,026	TRI 3	19.36	
			TRI 4				314,895,262	TRI 4	67.82	
Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi		TRI 1		Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	17,644,000	TRI 1	3.31	
			TRI 2				65,100,000	TRI 2	12.20	
			TRI 3				103,302,026	TRI 3	19.36	
			TRI 4				314,895,262	TRI 4	67.82	
KASI TATA RUANG (ESELON 4)										
1	Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	jumlah pemanfaatan tata ruang sesuai dengan rtrw		TRI 1		Program Perencanaan Tata Ruang	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	31,593,100	TRI 1	10.04
				TRI 2				118,155,400	TRI 2	37.54
				TRI 3				203,827,900	TRI 3	64.76
				TRI 4				290,681,000	TRI 4	85.81
		Persentase kawasan bebas pelanggaran tata ruang		TRI 1		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan	31,618,700	TRI 1	10.56
				TRI 2				96,334,850	TRI 2	32.19

2	Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yang tertib	Persentase kawasan perkotaan yang diatur dalam zoning regulation	TRI 3		Pemanfaatan Ruang	Ruang		154,076,150	TRI 3	51.48	
			TRI 4					220,170,700	TRI 4	81.67	
			TRI 1		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		31,618,700	TRI 1	10.56	
			TRI 2				96,334,850	TRI 2	32.19		
			TRI 3				154,076,150	TRI 3	51.48		
	TRI 4		220,170,700	TRI 4			81.67				
	Persentase terselenggaranya rapat koordinasi tata ruang		Program Perencanaan Tata Ruang	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	TRI 1			31,593,100	TRI 1	10.04	
					TRI 2		118,155,400	TRI 2	37.54		
					TRI 3		203,827,900	TRI 3	64.76		
					TRI 4		290,681,000	TRI 4	85.81		
KASI PERTANAHAN (ESELON 4)											
1	Meningkatkan penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah rancangan regulasi penataan ruang, seperti draf PERDA/Pergub, maupun dokumen terkait tentang pertanahan	TRI 1		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2,902,000	TRI 1	0.24	
			TRI 2				2,902,000	TRI 2	0.24		
			TRI 3				4,662,000	TRI 3	0.39		
			TRI 4				12,369,800	TRI 4	53.51		
	Memfasilitasi konflik – konflik pertanahan	Jumlah Fasilitasi Penyelesaian konflik – konflik pertanahan	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	TRI 1				TRI 1		
					TRI 2				TRI 2		
					TRI 3				TRI 3		
					TRI 4		493,200	TRI 4	3.02		
	2	Melaksanakan inventarisasi aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	Jumlah area / lahan yang dapat diinventarisasi/diidentifikasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	TRI 1		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah		2,902,000	TRI 1	0.24
				TRI 2				2,902,000	TRI 2	0.24	
				TRI 3				4,662,000	TRI 3	0.39	
				TRI 4				12,369,800	TRI 4	53.51	
Melaksanakan Penamaan rupa Bumi/toponimi unsur pemerintah daerah	Jumlah dokumen terkait toponimi / penamaan rupa bumi	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Toponimi/Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintahan	TRI 1				TRI 1			
				TRI 2				TRI 2			
				TRI 3				TRI 3			
				TRI 4		8,206,000	TRI 4	89.59			

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut


Ir. H. AGUS SEKTYAJI

NIP. 19621002 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. SUKAMTA
Jabatan : BUPATI TANAH LAUT

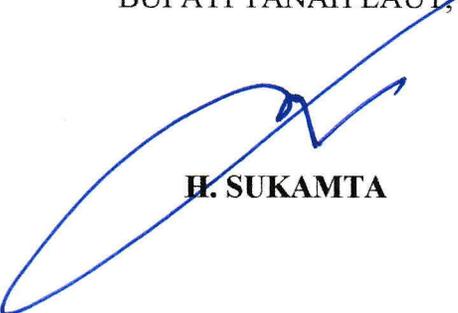
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


Ir. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatkan infrastruktur ke PU an	1	Persentase panjang sungai dalam kondisi baik	89%
		2	Persentase Jaringan Irigasi yang berfungsi baik	84%
		3	Jembatan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	25 Unit
		4	Jalan dalam kondisi baik dan sedang (Mantap)	21,215 Km
		5	Persentase Penyediaan Prasarana Air baku	19%
2	Meningkatkan Infrastruktur sumber daya air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air	1	Luas Sawah yang dapat dilayani (diairi dan dibuang) oleh jaringan irigasi kondisi baik	14.401,84 Ha
		2	Persentase luas kawasan yang terlindungi akibat daya rusak air	94,2 %
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air minum dan sanitasi	1	Persentase rumah tangga yang mendapat air minum yang aman	36,06 %
		2	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi yang layak	51,65 %
4	Meningkatnya persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	1	Persentase kesesuaian ruang dengan RTRW	100%
5	Meningkatnya pemanfaatan tanah negara oleh masyarakat, swasta dan pemerintah daerah untuk pembangunan	1	Persentase terfasilitasinya konflik/sengketa tanah pemerintah	100%

Program dan kegiatan		Anggaran
1	Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp 6.076.906.560,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 641.887.600,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Rp 45.000.000,00
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 30.203.500,00
5	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Rp 2.520.000,00
6	Peningkatan dan Pengembangan aset Daerah	Rp 275.490.000,00

7	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	9.999.750,00
8	Program rehabilitasi / pemeliharaan Talud / Bronjong	Rp	6.330.109.650,00
9	Program Pengembangan, pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Rp	1.525.000.000,00
10	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya	Rp	11.089.083.500
11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp.	75.935.026.204,00
12	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp.	32.192.612.086,00
14	Perencanaan Tata Ruang	Rp.	1.738.117.400,00
15	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp	26.668.413.590,00
17	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp	7.642.612.260,00
18	Keciptakaryaan	Rp.	13.742.317.990,00
19	Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp.	7.642.612.260,00
20	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp.	99.999.750,00
21	Program Penataan pengusaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Rp.	68.140.000,00
22	Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp.	53.710.000,00
23	Program Penataan Daerah Otonomi baru	Rp.	46.625.000,00
24	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp.	48.296.000,00

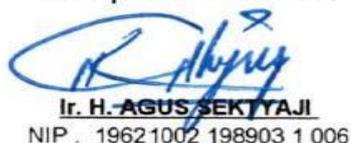
Pelaihari, 2 Oktober 2019

BUPATI TANAH LAUT



H. SUKAMTA

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut**



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP . 19621002 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. SAHRUDIN
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pertanahan	1	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70
2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana dan administrasi perkantoran	1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD	100%
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan	1	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang dsusun tepat waktu	100%
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi keuangan	1	Persentase dokumen keuangan yang dsusun tepat waktu	100%

Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp 6.076.906.560,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 444.172.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 496.511.200,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 10.453.500,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 75.400.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 170.588.100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 41.182.200,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 67.345.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 949.673.300,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.400.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 176.400.000,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Rp 1.394.102.500,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah	Rp 441.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Rp 1.804.678.160,00

2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	641.887.600,00
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp	300.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp	341.887.600,00
3	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	30.203.500,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp	30.203.500,00
4	Perencanaan pembangunan daerah	Rp	9.999.750,00
	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD	Rp	9.999.750,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI HADI PUTRA, ST
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

DWI HADI PUTRA ST
NIP. 19740517 200604 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya panjang jalan kondisi mantap Kabupaten	1	Persentase Kenaikan Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik dan Sedang	3.1%
2	Meningkatnya jumlah jembatan kondisi mantap Kabupaten	1	Persentase Jumlah jembatan Kabupaten Kondisi Baik dan sedang	4.9%

Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 75.935.026.204,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Reguler)	Rp. 37.508.881.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Penugasan)	Rp. 14.781.771.000,00
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Rp. 700.000.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Rp. 22.944.374.204,00
2	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 32.192.612.086,00
	Perencanaan Pembangunan Jalan	Rp. 700.000.000,00
	Pembangunan Jalan	Rp. 15.669.619.586,00
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Rp. 500.000.000,00
	Pembangunan Jembatan	Rp. 15.322.992.500,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut**


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

**Plt. Kepala Bidang Bina Marga
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut**


DWI HADI PUTRA, ST
 NIP. 19740517 200604 1 002



@KJK

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GT. NOVIAR KUSUMA, ST
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Plt. Kepala Bidang Cipta Karya
dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi	1	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Bersih	1,80%
		2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	0,30%
2	Menurunnya wilayah yang terdampak genangan air	1	Persentase wilayah dengan Drainase dalam kondisi baik	2,88%
3	Meningkatnya kualitas SDM Jasa Konstruksi	1	Persentase tenaga jasa Konstruksi yang memiliki sertifikat	8,70%
4	Meningkatnya pemenuhan fasilitas bangunan gedung dan fasilitas lainnya	1	Persentase bangunan gedung dan fasilitas lainnya yang dipenuhi	100%

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp		26.668.413.590,00
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rp		17.239.100.000
Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi (Pendamping PAMSIMAS)	Rp		2.049.999.600,00
Prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler)	Rp		2.704.890.990,00
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENUGASAN)	Rp.		3.174.423.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK	Rp.		1.500.000.000,00
2 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp		7.642.612.260,00
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp		7.642.612.260,00
3 Keciptakarya	Rp.		14.317.317.990,00
Pembangunan gedung kantor	Rp.		14.317.317.990
4 Pengaturan Jasa Konstruksi	Rp.		349.999.900,00
Pembinaan badan usaha jasa konstruksi	Rp.		349.999.900,00

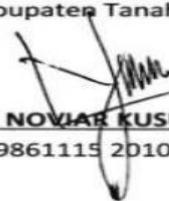
Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

Pt. Kepala Bidang
 Cipta Karya dan Jasa Kontruksi
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
 NIP. 19861115 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MYRZA FAZRINA, ST
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

MYRZA FAZRINA ST
NIP. 19800322 200604 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung pendayagunaan sumber daya air serta Pengendalian Daya Rusak Air	1	Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Irigasi	66,62%
2	Meningkatnya kualitas saluran sungai	1	Persentase Ketersediaan Air Baku	19%
		2	Persentase Panjang Sungai dalam Kondisi Baik	89%
		3	Persentase Irigasi Kabupaten Berfungsi Baik	84%
		4	Persentase areal terlindungi dari daya rusak air	14,77%

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Program rehabilitasi / pemeliharaan Talud / Bronjong Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan talud/ brojong	Rp	6.330.109.650,00 6.330.109.650,00
2	Program Pengembangan, pengelolaan, Dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Pembangunan embung dan pembangunan penampung airnya	Rp	1.525.000.000,00 1.525.000.000,00
3	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi , Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan pembangunan jaringan irigasi Pembangunan pintu air Pelaksanaan normalisasi saluran sungai Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Rp	11.089.083.500,00 Rp 2.869.897.800,00 Rp 2.539.943.700,00 Rp 2.036.155.000,00 Rp 3.643.087.000,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut


Ir. H. AGUS SEKTYAJI

NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Sumber Daya Air
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut


MYRZA FAZRINA, ST

NIP. 19800322 200604 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP
NIP. 19781213 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	1	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100%

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Perencanaan Tata Ruang	Rp.	1.738.117.400,00
	Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan tentang Rencana Tata Ruang	Rp.	56.677.150,00
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Rp.	1.661.928.550,00
	Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang	Rp.	19.511.700,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Tata Ruang
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP
 NIP. 19791213 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NORDIN, SST
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala Bidang Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

NORDIN, SST
NIP. 19650711 199203 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	1	Persentase Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%
2	Meningkatnya Penyelesaian Konflik/Sengketa tanah di kabupaten Tanah Laut	1	persentase penyelesaian masalah pertanahan	100%
3	Meningkatnya tertib administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	1	persentase administrasi penamaan rupabumi/toponimi, pemda dan fasilitas umum	100%

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Rp.	68.140.000,00
	Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah	Rp.	68.140.000,00
2	Program Penataan Daerah Otonomi baru	Rp.	46.625.000,00
	Kegiatan Toponimi/ Penamaan Rupa Unsur Administrasi Pemerintahan	Rp.	46.625.000,00
3	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp.	48.296.000,00
	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp.	48.296.000,00

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut


Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Bidang Pertanahan
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut


NORDIN, SST
 NIP. 19691002 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIANI ASTUTI, SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SAHRUDIN
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

Kepala Sub Bagian Perencanaan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

YULIANI ASTUTI, SE
NIP. 19741029 200501 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LAILATUL QADARIYAH, A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SAHRUDIN
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

LAILATUL QADARIYAH, A.Md
NIP. 19660103 198602 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NANA MARTIANA, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. SAHRUDIN
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Sekretaris
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

NANA MARTIANA, ST
NIP. 19860318 200803 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	1	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan sesuai ketentuan	7 Dokumen

Program dan Kegiatan

Anggaran

1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	9.999.750,00
	Penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana	Rp	9.999.750,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SAHRUDIN
 NIP. 19661210 199403 1 007

Kepala Sub Bagian Perencanaan
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



YULIANI ASTUTI, SE
 NIP. 19741029 200501 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana aparatur	1	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	1 Tahun
		2	Jumlah pemenuhan peningkatan daya aparatur	1 Tahun

Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp 5.958.331.560,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 444.172.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 496.511.200,00
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 10.453.500,00
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Rp 75.400.000,00
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 170.588.100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 41.182.200,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 67.345.600,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 949.673.300,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 5.400.000,00
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp 176.400.000,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	Rp 1.394.102.500,00
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam Daerah	Rp 441.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	Rp 1.804.678.160,00
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 641.887.600,00
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Rp 300.000.000,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Rp 341.887.600,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Rp 45.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Rp 45.000.000,00
4	Pembinaan dan pengembangan Aparatur	Rp 2.520.000,00
	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Rp 2.520.000,00
5	Peningkatan dan Pengembangan aset Daerah	Rp 27.549.000,00
	Penyusunan Tabulasi Data Aset Tetap	Rp 27.549.000,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut,



Ir. SAHRUDIN
 NIP. 19661210 199403 1 007

Kepala Sub Bagian
 Umum dan Kepegawaian
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



LAILATUL QADARIYAH, A.Md
 NIP. 19660103 198602 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Menyusun administrasi keuangan SKPD	1	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	17 Dokumen

Program dan Kegiatan		Anggaran
1 Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	30.203.500,00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp	30.203.500,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

**Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,**



Ir. SAHRUDIN
NIP. 19661210 199403 1 007

**Kepala Sub Bagian Keuangan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut**



NANA MARTIANA, ST
NIP. 19860318 200803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DWI HADI PUTRA, ST
Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

DWI HADI PUTRA, ST
NIP. 19740517 200604 1 002

Kepala Seksi Peningkatan Pemeliharaan dan
Pengawasan Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

DWI HADI PUTRA ST
NIP. 19740517 200604 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARID RAHMAN, ST
Jabatan : Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

DWI HADI PUTRA, ST
NIP. 19740517 200604 1 002

Kepala Seksi Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

FARID RAHMAN, ST
NIP. 19831230 201402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAMBANG PADMARAGA, ST
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : DWI HADI PUTRA, ST
Jabatan : Plt.Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

DWI HADI PUTRA, ST
NIP. 19740517 200604 1 002

Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

BAMBANG PADMARAGA, ST
NIP. 19811106 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melaksanakan Peningkatan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten	1	Jumlah panjang jalan yang direhabilitasi	64,927 Km

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	75.235.026.204,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Reguler)	Rp.	37.508.881.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK Penugasan)	Rp.	14.781.771.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Rp	22.944.374.204,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

DWI HADI PUTRA, ST
NIP. 19740517 200604 1 002

Kepala Seksi Peningkatan, Pemeliharaan &
Pengawasan Jalan & Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

DWI HADI PUTRA, ST
NIP. 19740517 200604 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan Pembangunan Jalan dan jembatan sesuai dengan standar Bina Marga	1	Jumlah jembatan yang terbangun	16 Unit
		2	Jumlah panjang jalan yang terbangun	21,215 Km

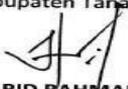
Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Program Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	30.992.612.086,00
	Pembangunan Jembatan	Rp	15.322.992.500,00
	Pembangunan Jalan	Rp	15.669.619.586,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut


DWI HADI PUTRA, ST
NIP. 19740517 200604 1 002

Kepala Seksi
Pembangunan jalan dan Jembatan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut


FARID RAHMAN, ST
NIP. 19831230 201402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan	1	Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan bidang bina marga	17 Dokumen

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp	1.200.000.000,00
	Perencanaan Pembangunan Jalan	Rp	700.000.000,00
	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Rp	500.000.000,00
2	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp	700.000.000,00
	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Rp	700.000.000,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Plt. Kepala Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

DWI HADI PUTRA, ST
NIP. 19740517 200604 1 002

Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

BAMBANG PADMARAGA, ST
NIP. 19811106 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO SHOLIHIN, ST
Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan Bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MYRZA FAZRINA, ST
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

MYRZA FAZRINA ST
NIP. 19800322 200604 2 012

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Seksi Perencanaan
Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,

RIDHO SHOLIHIN, ST
NIP. 19820419 201001 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NURMINDA WIDIASARI, ST
Jabatan : Kepala Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MYRZA FAZRINA, ST
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

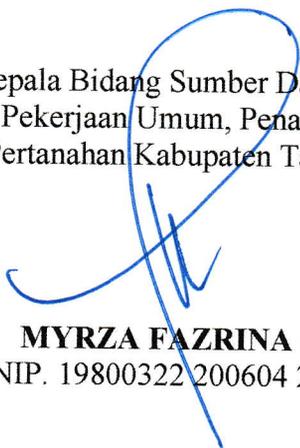
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

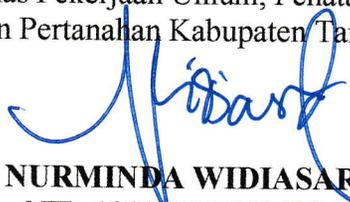
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,


MYRZA FAZRINA ST
NIP. 19800322 200604 2 012

Kepala Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai
Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,


NURMINDA WIDIASARI, ST
NIP. 19821203 201402 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, ST
Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : MYRZA FAZRINA, ST
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut,

MYRZA FAZRINA ST
NIP. 19800322 200604 2 012

Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan
Pengairan Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, ST
NIP. 19911020 201402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan Studi, Kelayakan terkait Bidang Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Bidang Sumber Daya Air	1 Dokumen
2	Melakukan Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Kajian dan Analisa Komprehensif Bidang Sumber Daya Air	1 Dokumen
3	Melakukan Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Studi Identifikasi Desain dan Survey Investigasi Bidang Sumber Daya Air dan Analisa Lainnya	2 Dokumen
4	Melaksanakan Proses Perencanaan dan Perancangan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah Dokumen Detail Engineering Desain Bidang Sumber Daya Air	9 Dokumen

Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Rp 2.869.897.800,00
	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	Rp 2.869.897.800,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

MYRZA FAZRINA, ST
NIP. 19800322 200604 2 012

Kepala Seksi Perencanaan
Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

RIDHO SHOLIHIN, ST
NIP. 19820419 201001 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air	1	Jumlah bangunan irigasi yang terbangun	10 Unit
2	Melaksanakan Normalisasi Saluran dan Sungai	1	Panjang jaringan irigasi yang terbangun	985 meter
		2	Panjang bangunan pengaman sungai dan pantai yang terbangun	790 m
		3	Jumlah bangunan Akses Pertanian yang terbangun	8,0%
		4	Panjang sungai yang Dinormalisasi	100,0%
		5	Jumlah Tampung Air yang dibangun	6

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Program pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp	2.539.943.700,00
	Pembangunan pintu air	Rp	2.539.943.700,00
	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	Rp	2.036.155.000,00
2	Program Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Rp	6.330.109.650,00
	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Rp	6.330.109.650,00
4	Program pengembangan dan pengelolaan , dan konservasi sungai, danau dan sumber daya lainnya	Rp	1.525.000.000,00
	Kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Rp	1.525.000.000,00

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

MYRZA FAZRINA, ST
NIP. 19800322 200604 2 012

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Seksi
Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

NURMINDA WIDIASARI, ST
NIP. 19821203 201402 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melaksanakan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa Sumber Daya Air	1	Jumlah Bangunan Irigasi yang dipelihara	7
		2	Panjang Jaringan Irigasi yang dipelihara	10.500
		3	Jumlah Tampungan Air yang dipelihara	2
		4	Jumlah Sarana Pendukung Irigasi yang dipelihara	7
2	Melaksanakan Pemeliharaan Bangunan Sungai dan Pantai	1	Panjang garis pantai yang dipelihara	20
3	Melaksanakan Pertemuan, Pembinaan dan Pelatihan Kelembagaan Pengoperasian Irigasi, Petani Pemakai Air, Kelompok Tani/Masyarakat	1	Jumlah Pertemuan Kelembagaan SDA	2
		2	Jumlah Pengamat, Juru, Kelompok Tani/Masyarakat dan P3A yang dibina	2

Program dan Kegiatan

Anggaran

1	Program pengembangan, pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	Rp	9.788.581.000,00
	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Rp	3.643.087.000,00
	Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)	Rp	193.734.000,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	Rp	5.951.760.000,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Bidang Sumber Daya Air
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

MYRZA FAZRINA, ST
NIP. 19800322 200604 2 012

Kepala Seksi
Operasi dan Pemeliharaan Pengairan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

MUHAMMAD GALIH SAPUTRA, ST
NIP.19911020 201402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GT. NOVIAR KUSUMA, ST
Jabatan : Kepala Seksi Tata Bangunan Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GT. NOVIAR KUSUMA, ST
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Kepala Bidang Cipta Karya
Dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006

Kepala Seksi Tata Bangunan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FREDDY NOORHARI S, ST
Jabatan : Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

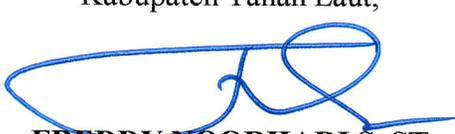
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Kepala Bidang Cipta Karya
Dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006

Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


FREDDY NOORHARI S, ST
NIP. 19850523 201402 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETIYO, ST
Jabatan : Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : GT. NOVIAR KUSUMA, ST
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

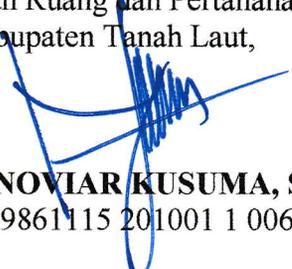
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

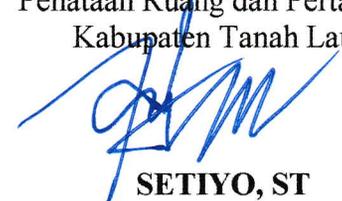
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Kepala Bidang Cipta Karya
Dan Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
NIP. 19861115 201001 1 006

Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


SETIYO, ST
NIP. 19840916 200501 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan Pembangunan Gedung/Bangunan/Fasilitas Lainnya	1	Jumlah Gedung/Bangunan/ Fasilitas Lainnya yang dibangun	20 konstruksi
2	Melakukan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung/Bangunan/Fasilitas Lainnya	1	Jumlah Gedung/Bangunan/ Fasilitas Lainnya yang terpelihara	5 konstruksi
3	Melakukan Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten	1	Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga Konstruksi Kabupaten	1 dokumen

Programdan Kegiatan	Anggaran
1 Keciptakaryan	Rp 14.317.317.990,00
Pembangunan Gedung Kantor	Rp 14.317.317.990,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Plt. Kepala Bidang
 Cipta Karya dan Jasa Kontruksi
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
 NIP. 19861115 201001 1 006

Kepala Seksi Tata Bangunan
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
 NIP. 19861115 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	1	Jumlah Panjang drainase/Gorong-gorong yang terbangun	7.848,05 m
		2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Sanitasi	260 Rumah
2	Melakukan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih	1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Sambungan Rumah (SR)	1.252 SR
3	Melakukan Fasilitas program Pamsimas			
4	Melakukan Fasilitas program KOTAKU	1	Jumlah luas Wilayah kumuh yang difasilitasi KOTAKU	5 kali

Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Rp. 7.642.612.260,00
	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 7.642.612.260,00
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 2.704.890.990,00
	Prasarana dan sarana air limbah (DAK Reguler)	Rp. 2.704.890.990,00
3	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 23.118.413.990,00
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rp. 17.239.100.000,00
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK PENERUGASAN)	Rp. 3.174.423.000,00
	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Reguler)	Rp. 2.704.890.990,00
	Pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi (pendamping PANSIMAS)	Rp. 2.049.999.600,00
4	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 99.999.750,00
	Pendamping PNPM mandiri perkotaan (P2KP)	Rp. 99.999.750,00

Pit. Kepala Bidang
 Cipta Karya dan Jasa Kontruksi
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
 NIP. 19861115 201001 1 006

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Seksi Air Bersih dan Sanitasi
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut

FREDDY NOORHARI S, ST

NIP. 19850523 201402 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan Pembinaan Badan Usaha Jasa Konstruksi	1	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang mendapatkan Sertifikat	150 orang
		2	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi / bimtek terkait Per-UU Jasa Konstruksi	120 orang

Program dan Kegiatan	Anggaran
1 Pengaturan Jasa Kontruksi	Rp. 349.999.900,00
Pembinaan badan usaha jasa konstruksi	Rp. 349.999.900,00

Plt. Kepala Bidang
 Cipta Karya dan Jasa Kontruksi
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut

GUSTI NOVIAR KUSUMA, ST
 NIP. 19861115 201001 1 006

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Seksi Bina Jasa Konstruksi
 Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut

SETIYO, SST
 NIP. 19790916 200501 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GT M. TAJUDIN NOOR, MS
Jabatan : Kepala Seksi Pemanfaatan Tata Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

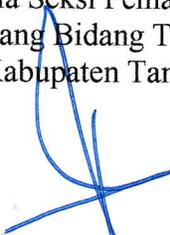
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Kepala Seksi Pemanfaatan Tata
Ruang Bidang Tata Ruang
Kabupaten Tanah Laut,


ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP
NIP. 19781213 200604 1 011


GT M. TAJUDIN NOOR, MS
NIP. 19760603 201101 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

No.	Kinerja Utama	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang sesuai dengan RTRW	1	Jumlah layanan pertimbangan teknis tata ruang yang sesuai dengan RTRW	100%
		2	Jumlah dokumen berita acara tinjau lapangan	100%
		3	Jumlah pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang	100%

Program dan Kegiatan

Anggaran

1	Perencanaan Tata Ruang	Rp.	19.511.700,00
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Rp.	19.511.700,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP
NIP. 19791213 200604 1 011

Kepala Seksi
Pemanfaatan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

GT M. TAJUDIN NOOR, ST. MS
NIP. 19760603 201101 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	No.	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan penyusunan perencanaan RDTR	1	Jumlah Dokumen Perencanaan RDTR	2 Dokumen
2	Melakukan Sosialisasi RTRW	1	Jumlah kelompok masyarakat, SKPD yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW)	9 Kecamatan
3	Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perencanaan tata ruang	1	Jumlah peraturan zonasi dan pedoman yg tersusun	1

Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Perencanaan Tata Ruang	Rp. 1.718.605.700,00
	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Rp. 1.661.928.550,00
	Sosialisasi peraturan perundang - undangan tentang rencana tata ruang	Rp. 56.677.150,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

ULIL AMRI BAHTIAR, ST, MP.
NIP. 19791213 200604 1 011

Kepala Seksi
Perencanaan Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

NIP. _____



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI ANDRIANI, ST
Jabatan : Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NORDIN, SST
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab. Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama pada Tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Bidang Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

NORDIN, SST

NIP. 19691002 198903 1 006

Kepala Seksi Administrasi Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

DEWI ANDRIANI, ST

NIP. 19860914 201502 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIDHO RIFANI, ST
Jabatan : Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum Bidang
Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NORDIN, SST
Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

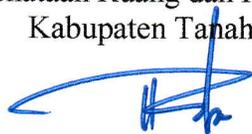
Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Bidang Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


NORDIN, SST

NIP. 19650711 199203 1 012

Kepala Seksi Pengaturan Tanah
Pemerintah dan Fasilitas Umum
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


RIDHO RIFANI, ST

NIP. 19850601 201001 1 016

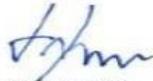
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan	1	Jumlah Dokumen Administrasi Pertanahan untuk penataan penguasaan penggunaan dan pemanfaatan tanah	10 Dok
2	Memfasilitasi penyelesaian masalah pertanahan	1	Jumlah masalah pertanahan yang terfasilitasi	3 Konflik/Sengketa tanah

Program dan Kegiatan		Anggaran	
Bidang Pertanahan		Rp.	116.436.000,00
1	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Rp.	68.140.000,00
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rp.	68.140.000,00
2	Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Rp.	48.296.000,00
	Fasiitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Rp.	48.296.000,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Bidang Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut



NORDIN, SST

NIP. 19691002 198903 1 006

Kepala Seksi Administrasi Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,



DEWI ANDRIANI, ST

NIP. 19860914 201502 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Melaksanakan inventarisasi aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	1	Jumlah data aset pemerintah daerah dan fasilitas umum	10 Dok. Inventarisasi
2	Melakukan fasilitasi Penamaan rupabumi/toponimi unsur pemerintah daerah	1	Jumlah data penamaan rupabumi/toponimi	1 Dok

Program dan Kegiatan		Anggaran	
Bidang Pertanahan		Rp.	100.335.000,00
1	Penataan Tata Guna Tanah	Rp.	53.710.000,00
	Inventarisasi tanah pemerintah daerah dan fasilitas umum	Rp.	53.710.000,00
2	Penataan Daerah Otonomi Baru	Rp.	46.625.000,00
	Toponimi/penamaan rupa unsur administrasi pemerintahan	Rp.	46.625.000,00

Kepala Bidang Pertanahan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut



NORDIN, SST

NIP. 19691002 198903 1 006

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah
dan Fasilitas Umum
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,



RIDHO RIFANI, ST

NIP. 19850601 201001 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALFIAN NOOR RIVANI, S.Sos
Jabatan : Kepala UPT. Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala UPT. Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

ALFIAN NOOR RIVANI, S.Sos
NIP. 19710515 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHMADANI, A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Peralatan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ALFIAN NOOR RIVANI, S.Sos
Jabatan : Kepala UPT. Peralatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

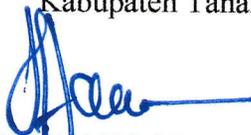
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala UPT. Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


ALFIAN NOOR RIVANI, S.Sos
NIP. 19710515 199403 1 008

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT. Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,


RACHMADANI, A.Md
NIP. 19830617 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya retribusi sewa alat berat	1	Persentase peningkatan retribusi daerah	158%
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana Alat Berat	2	Persentase alat berat yang dipenuhi	75%

Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 161.010.000,00
	Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp. 161.010.000,00

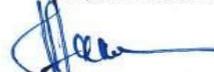
Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19691002 198903 1 006

Kepala UPT Peralatan
 Dinas Pekerjaan Umum
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



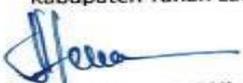
ALFIAN NOOR RIVANI, S.Sos
 NIP. 19710515 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasanana alat berat	1	Jumlah alat berat yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	6 bh
2	Melakukan pelayanan administrasi UPT Peralatan	2	Jumlah fasilitas pelayanan administrasi UPT Peralatan	50 pelayanan
3	Melakukan fasilitasi peningkatan SDM UPT Peralatan	3	Jumlah SDM UPT Peralatan yang bersertifikat	0 orang

Program dan Kegiatan		Anggaran
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 136.086.900,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 51.041.300,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp. 1.937.400,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp. 3.978.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	Rp. 16.196.600,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 9.720.000,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 5.423.700,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 46.709.900,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 1.080.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	5.233.750,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala UPT Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

ALFIAN NOOR RIVANI, S.Sos
NIP. 19710515 199403 1 008

Kasubbag TU Peralatan
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

RACHMADANI, A.Md
NIP. 19830617 201001 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gagas (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUBI HARTATI, ST
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. H. AGUS SEKTYAJI
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. AGUS SEKTYAJI
NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala UPT. Laboratorium
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

SUBI HARTATI, ST
NIP. 19690421 200701 2 032



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran gases (0512) 21065 Fax (0512) 21157 Pelaihari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RAHMI BUDIARTI, ST
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SUBI HARTATI, ST
Jabatan : Kepala UPT. Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Juli 2019

Kepala UPT. Laboratorium
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

SUBI HARTATI, ST
NIP. 19690421 200701 2 032

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT. Laboratorium
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,

RAHMI BUDIARTI, ST
NIP. 19840508 201101 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya retribusi sewa alat uji material konstruksi	1	Persentase peningkatan retribusi daerah	61%
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana alat uji material konstruksi	1	Persentase alat uji material konstruksi yang dipenuhi	100%

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Pengembangan Teknologi Konstruksi	Rp.	16.666.200,00
	Optimalisasi laboratorium pengujian	Rp.	16.666.200,00
2	Pengembangan Teknologi Konstruksi	Rp.	45.675.000,00
	Identifikasi dan informasi teknik konstruksi	Rp.	45.675.000,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut



Ir. H. AGUS SEKTYAJI
 NIP. 19621002 198903 1 006

Kepala UPT Laboratorium
 Dinas Pekerjaan Umum
 Penataan Ruang dan Pertanahan
 Kabupaten Tanah Laut,



SUBI HARTATI, ST
 NIP. 196890421 200701 2 032

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target
1	Melakukan pemeliharaan Sarana dan Prasanana alat uji material konstruksi	1	Jumlah alat uji material konstruksi yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	4 jenis
2	Melakukan pelayanan administrasi UPT Laboratorium	1	Jumlah fasilitasi pelayanan administrasi UPT Laboratorium	77 pelayanan

Program dan Kegiatan		Anggaran	
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.655.000,00
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp.	2.655.000,00
2	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	62.334.550,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp.	1.077.000,00
	Penyediaan alat tulis kantor	Rp.	9.336.900,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp.	3.374.950,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp.	1.345.200,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	40.045.500,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp.	1.080.000,00
	Penyediaan makanan dan minuman	Rp.	6.075.000,00
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	29.062.500,00
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Rp.	29.062.500,00

Pelaihari, 2 Oktober 2019

Kepala UPT Laboratorium
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,



SUBI HARTATI, ST
NIP. 196890421 200701 2 032

Kasubbag TU UPT Laboratorium
Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Tanah Laut,



RAHMI BUDIATI
NIP. 19840508 201101 2 005